

DR. BAMBANG RUSTANTO, M.HUM



Masyarakat
MULTIKULTUR
di **INDONESIA**





Masyarakat
MULTIKULTUR
di INDONESIA

KK.PH020-01-2015

Penulis: DR. Bambang Ruzbinto, M.Hum.
Editor: Adrian Kariyasa
Proofreader: Nur Asri
Desain sampul: Tito Rianto
Layout: Mamsul

Diterbitkan oleh **PT REMAJA ROSDAKARYA**

Jln. Buluhgambuh No. 40

Bandung 40132

Telp. (022) 5200387

Fax. (022) 5202525

e-mail: rosdakarya@ptremaja.com

www.ptremaja.com

Anggota Ikapi

Cetakan pertama, September 2015

Hak cipta dilindungi undang-undang pada Penulis

ISBN 978-675-092-648-0

Dicetak oleh PT Remaja Rosdakarya Offset - Bandung

KATA PENGANTAR

Buku *Masyarakat Multikultur di Indonesia* ini digunakan untuk menuntun mahasiswa program pendidikan Diploma IV (D-IV) dan pasca sarjana spesialis satu (Sp-1) Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, serta mahasiswa jurusan pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial lainnya. Bahan ajar ini lebih menyajikan panduan dan acuan bagi mahasiswa dalam melatih dan bekerja sama dengan masyarakat dalam praktik pekerjaan sosial komunitas.

Metode pembelajaran yang dilakukan di kelas lebih banyak diskusi seorok dan juga juga dengan di masyarakat. Materi ini untuk memahami konsep dan pemahaman mahasiswa diharapkan untuk mencari dan untuk. Bagi pekerja sosial sebagai pengembang masyarakat merupakan guru yang paling efektif.

Selamat menerapkan keterampilan pekerjaan sosial komunitas dengan masyarakat. Keterampilan ini bisa menjadi bekal praktis yang memperkaya *body of skill* pekerja sosial dalam bekerja bersama masyarakat.

Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama yang telah membantu Pengerjaan buku Masyarakat Multikultur Indonesia ini.

Bandung, September 2015

Penulis

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN—ii

KATA PENGANTAR—v

DAFTAR ISI—vi

BAB I INDIVIDU DAN KELOMPOK—1

A. Individu—1

B. Kelompok—3

BAB II	INTERAKSI DAN STRATIFIKASI SOSIAL-7
	A. Interaksi Sosial-7
	B. Stratifikasi Sosial-11
BAB III	KEBUDAYAAN DAN HAK ASASI MANUSIA-25
	A. Kebudayaan-25
	B. Kebudayaan Multikultural-27
	C. Hak Asasi Manusia-28
BAB IV	KEMAJEMUKAN DAN ETNISITAS-33
	A. Kemajemukan-33
	B. Etnisitas-36
BAB V	MULTIKULTURAL DAN ETNOSENTRIS-39
	A. Multikulturalisme-39
	B. Etnosentrisme-45
BAB VI	PRIMORDIALISME DAN RASISME-49
	A. Primordialisme-49
	B. Rasisme-51
	C. Hubungan Primordialisme dan Rasisme-53
BAB VII	PRASANGKA SOSIAL DAN DISKRIMINASI-55
	A. Prasangka Sosial-55
	B. Diskriminasi-59
BAB VIII	KONFLIK DAN KESERASIAN SOSIAL-67
	A. Konflik Sosial-67
	B. Keserasian Sosial-73
BAB IX	PEKERJAAN SOSIAL DENGAN KELOMPOK MINORITAS-77
	A. Minoritas-77
	B. Pelopor dengan Minoritas-85
BAB X	PEKERJA SOSIAL DENGAN KELOMPOK INDIGENOUS-89
	A. Indigenous-89
	B. Hak Indigenous-91
	C. Program Pemberdayaan-98
	D. Proses Pemberdayaan-98
	E. Jenis Kegiatan Pemberdayaan-99
BAB XI	PEKERJAAN SOSIAL DENGAN GENDER-101
	A. Feminisme-101
	B. Gender-103
	C. Praktik Pekerjaan Sosial-106

BAB XIII PEKERJAAN SOSIAL DENGAN MULTIKULTUR--119

- A. Belajar dengan Peksos Lokal--120
- B. Pendekatan Pekerjaan Sosial Lokal--120
- C. Memprioritaskan Pekerjaan Sosial Lokal--121
- D. Budaya Lokal sebagai Ilmu--122
- E. Peksos dengan Teori Barat vs. Teori Indigen dengan Teori Barat--122
- F. Peksos dengan Teori Indigenous--125

DAFTAR PUSTAKA--131

TENTANG PENULIS--133



BAB I

INDIVIDU DAN KELOMPOK

Untuk memahami materi pembelajaran pekerja sosial dalam masyarakat multikultur ini maka perlu terlebih dahulu kita kenali konsep individu dan kelompok sebagai berikut.

A. Individu

Individu (Gerungan, 2004) berasal dari kata Yunani yaitu "*individum*" yang artinya "tidak terbagi". Dalam ilmu sosial paham individu, menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan

dalam pergaulan hidup manusia. Individu merupakan kesatuan yang terbatas yaitu sebagai manusia perseorangan bukan sebagai manusia keseluruhan. Maka dapat disimpulkan bahwa individu adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Dan terdapat 3 aspek dalam individu, yaitu aspek organik jasmaniah, aspek psikis rohaniyah, dan aspek sosial. Di mana aspek-aspek tersebut saling berhubungan. Apabila salah satu rusak maka akan merusak aspek lainnya. Berkaitannya antarindividu dengan individu lainnya, maka menjadi lebih bermakna manusia apabila pola tingkah lakunya hampir identik dengan tingkah laku massa yang bersangkutan. Proses yang meningkatkan ciri-ciri individualitas pada seseorang sampai pada dirinya sendiri, disebut proses individualisasi atau aktualisasi diri.

Oleh karena proses itu, individu terbetani berbagai peranan yang berasal dari kondisi kebersamaan hidup, yang akhirnya muncul suatu kelompok yang akan menentukan kemantapan satu masyarakat. Individu dalam tingkah laku menurut pola pribadinya ada 3 kemungkinan: pertama, menyimpang dari norma kolektif kehilangan individualitasnya. Kedua, taat terhadap kolektif, dan ketiga, memengaruhi masyarakat. (Hartomo, 2004: 64). Dengan demikian manusia merupakan makhluk individual tidak hanya dalam arti keseluruhan jiwa-raga, tetapi merupakan pribadi yang khas, menurut corak kepribadiannya dan kecakapannya. Individu mempunyai ciri-ciri memiliki suatu pikiran dan diri. Di mana individu sanggup menetapkan kenyataan, interpretasi situasi, menetapkan aksi dari luar dan dalam dirinya.

Dartikan sebagai proses komunikasi individu dalam berinteraksi dan bertubungin. Individu tidak akan jelas identitasnya tanpa adanya suatu masyarakat yang menjadi latar individu tersebut ditandai dengan di mana individu tersebut berusaha menempatkan perilaku pada dirinya sesuai dengan norma dan kebudayaan lingkungan tersebut, seperti di Indonesia, individunya menjunjung tinggi perilaku sopan santun, dan beretika dalam bersosialisasi. Individu selalu berada di dalam kelompok, peranan kelompok tersebut adalah untuk mematangkan individu tersebut menjadi seorang pribadi. Di mana prosesnya bergantung terhadap kelompok dan lingkungan dapat menjadi faktor pendukung proses juga dapat menjadi penghambat proses menjadi suatu pribadi. Faktor pendukung dan faktor penghambat juga dapat berdasarkan individu itu sendiri.

B. Kelompok

Kelompok (Gerungan 2004) adalah agregat sosial di mana anggota-anggotanya yang saling bergantung, dan sedikit-banyaknya memiliki potensi untuk melakukan interaksi satu sama lain.

Kelompok adalah suatu kolektif yang terdiri atas berbagai organisme dimana eksistensi semua anggota sangat penting untuk memuaskan berbagai kebutuhan individu. Artinya, kelompok merupakan suatu alat untuk mendapatkan berbagai kebutuhan individu. Individu menjadi milik kelompok karena mereka mendapatkan berbagai kepuasan sebaik mungkin melalui organisasi yang tidak dengan mudah mereka dapatkan melalui cara lainnya (Cortwright & Zander, 1971).

Sedangkan menurut *Wekley dan Yulk (1977)* mengemukakan bahwa kelompok merupakan suatu kumpulan orang yang berinteraksi satu sama lain secara teratur dalam suatu periode tertentu, dan merasakan adanya ketergantungan di antara mereka dalam rangka mencapai satu atau lebih tujuan bersama.

Dari tiga pengertian di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa pengertian kelompok tidak terlepas dari unsur-unsur berupa keberadaan dua orang atau lebih yang melakukan interaksi dan saling memengaruhi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun ini tidak berlaku bagi sekumpulan individu yang tidak memenuhi unsur-unsur di atas, maka belum bisa dikatakan sebagai kelompok misalnya penonton sepak bola yang menjadi sekumpulan individu namun mereka tidak saling mengenal dan tidak melakukan interaksi.

1. Jenis Kelompok

Kelompok dapat dibedakan berdasarkan klasifikasinya. Sejalan dengan definisi yang dilakukan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, maka ada jenis kelompok formal dan kelompok non-formal.

Kelompok formal adalah subunit sah dari organisasi yang telah ditetapkan oleh anggaran dasar atau suatu ketetapan manajemen. Jadi kelompok ini sengaja dibentuk untuk memenuhi tugas yang nyata guna mendukung tugas organisasi.

Kelompok non-formal adalah kelompok yang muncul sebagai upaya pemenuhan kebutuhan individu dengan mengembangkan tata hubungan dengan anggota lain dalam organisasi. Kelompok informal hanya dapat

terbentuk apabila lokasi fisik anggota-anggotanya, sifat pekerjaan, dan jadwal kerja memungkinkan untuk terbentuknya kelompok. Oleh karena itu kelompok informal muncul dari kombinasi antara faktor-faktor formal dan kebutuhan manusia sebagai anggotanya.

2. Fungsi-Fungsi Kelompok

Pada dasarnya fungsi kelompok dibagi menjadi dua yaitu, fungsi organisasi formal dan fungsi kebutuhan individual. Fungsi kelompok formal sebagai sarana untuk mengerjakan tugas-tugas yang kompleks yang saling berkaitan dan terlalu sukar untuk dikerjakan oleh siapa pun, sebagai sarana untuk mencetuskan gagasan-gagasan yang baru atau pemecahan masalah yang memerlukan kreativitas tertentu, dan sebagai wahana sosialisasi serta pelaksanaan keputusan yang rumit.

Fungsi kelompok individual yang didasarkan bahwa setiap individu memiliki beraneka macam kebutuhan, dan kelompok dapat memenuhi kebutuhan yang meliputi pemenuhan kebutuhan persahabatan, dukungan, dan kasih sayang, sebagai sarana untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menegaskan rasa identitas dan memelihara harga diri, sebagai sarana untuk menguji kenyataan sosial melalui diskusi dengan orang lain, pengembangan perspektif, dan konsensus bersama yang dapat mengurangi keragu-raguan dalam lingkungan sosial sehingga dapat diambil sebuah keputusan.

3. Ciri-Ciri Utama Kelompok

Penelitian mendalam mengenai sifat-sifat dan hasil-hasil interaksi dalam kehidupan (empat) ciri kelompok yaitu:

1. Terdapat dorongan (motif) yang sama pada individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi di antaranya ke arah tujuan yang sama.
2. Terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu-individu yang satu dari yang lain berdasarkan reaksi-reaksi dan kecakapan-kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, lambat laun mulai terbentuk pembagian tugas serta struktur tugas-tugas tertentu dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan yang sama itu. Di sisi lain, terbentuk pula norma-norma yang khas. Dalam interaksi kelompok ke arah tujuannya sehingga mulai terbentuk kelompok sosial dengan ciri-ciri yang khas.

3. Pembentukan dan penegasan struktur (*organisasi*) kelompok yang jelas dan terdiri atas peranan-peranan dan kedudukan hierarkis yang lambat laun berkembang dengan sendirinya dalam usaha pencapaian tujuan. Terjadi pembatasan yang jelas antara usaha-usaha dan orang yang termasuk *ingroup* serta usaha-usaha dan orang *outgroup*.
4. Terjadinya penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok dalam merealisasikan tujuan kelompok. Norma-norma dan pedoman tingkah laku ini sebagaimana juga struktur pembagian tugas anggotanya merupakan norma dan struktur yang khas bagi kelompoknya itu.



BAB II

INTERAKSI DAN STRATIFIKASI SOSIAL

A. Interaksi Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berinteraksi dengan sesamanya karena untuk mencapai kebutuhan-kebutuhannya yang dikerendaki bergantung bantuan dari orang lain. Inilah dasar dan alasan antara individu yang satu dan yang lain melakukan interaksi sosial. Di lingkungan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat tidak lepas adanya hubungan sosial ini. Interaksi sosial seperti ini, seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto (1990), yaitu "hubungan-hubungan sosial yang

dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perseorangan dengan kelompok manusia.”

Hal ini dikemukakan lagi oleh Slamet Santosa (2006) yang menjelaskan bahwa “interaksi sosial yang pada pokoknya memandang tingkah laku sosial yang selalu dalam kerangka kelompok seperti struktur dan fungsi dalam kelompok. Atas dasar uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah proses interaksi yang dilakukan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Komunikasi verbal dengan nonverbal adalah sarana yang digunakan dalam berinteraksi tersebut. Dengan memelihara dan mengembangkan komunikasi yang baik akan mempererat hubungan mereka.

1. Aspek-Aspek Interaksi Sosial

Menurut Slamet Santosa (2006) aspek-aspek interaksi sosial yaitu adanya hubungan, adanya individu, ada tujuan dan adanya hubungan dengan struktur dan fungsi kelompok aspek-aspek interaksi sosial adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan

Setiap interaksi sudah barang tentu terjadi karena adanya hubungan antara individu dan individu maupun antara individu dan kelompok.

2. Ada individu

Setiap interaksi sosial menuntut tampilnya individu-individu yang melaksanakan hubungan.

3. Ada tujuan

Setiap interaksi sosial memiliki tujuan tertentu seperti memengaruhi individu lain.

4. Adanya hubungan dengan struktur dan fungsi kelompok

Interaksi sosial yang ada hubungan antara struktur dan fungsi kelompok ini terjadi karena individu dalam hidupnya tidak terpisah dari kelompok. Di samping itu, tiap-tiap individu memiliki fungsi di dalam kelompoknya.

Aspek-aspek ini saling melengkapi sehingga terbentuk suatu interaksi sosial. Hubungan terdiri dari berbagai individu ini mempunyai tujuan-tertentu dengan saling pengaruh-memengaruhi. Jika individu berada dalam suatu kelompok, dirinya mempunyai fungsi baik itu untuk sendi-maupun kelompoknya.

Aspek-aspek interaksi sosial lain menurut Achis (1983) yaitu "adanya ekspektasi, interaksi, dan interdependensi antara individu yang satu dan yang lainnya." Ketiga aspek ini dijadikan alat dan sarana untuk melakukan pertolongan karena dengan interaksi sosial, penanganan dilakukan dengan lebih intens. Penanganan ini dengan menyediakan sumber-sumber tertentu agar dapat digunakan oleh individu-individu yang membutuhkannya.

2. Faktor-Faktor Interaksi Sosial

Soerjono Soekanto (1990) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya interaksi sosial adalah:

1. Faktor Imitasi,

Terjadi apabila seseorang menerima atau meniru pandangan atau sikap yang datang dari luar dirinya. Faktor ini mempunyai segi atau pengaruh positif karena dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah dan nilai-nilai yang berlaku, sedangkan nilai negatifnya adalah bilamana yang ditiru adalah tindakan-tindakan yang menyimpang.

2. Faktor Sugesti,

Berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya, kemudian diterima pihak lain.

3. Faktor Identifikasi,

Merupakan kecenderungan-kecenderungan atau kemungkinan-kemungkinan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Identifikasi ini sifatnya lebih mendalam daripada imitasi karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses.

4. Faktor Simpati,

Merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Di dalam proses ini, perasaan memegang peran penting, walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya.

Faktor-faktor ini dijadikan dasar dari proses interaksi sosial walaupun sangat kompleks dan sulit dibedakan dengan setiap faktor-faktor tersebut. Dapat dikatakan bahwa imitasi dan sugesti terjadi lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya. Sedangkan identifikasi dan simpati membutuhkan proses yang cukup lama dalam pendalaman hubungan. Sedangkan menurut Slamet Santosa (2006) faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya interaksi sosial, yaitu:

1. Situasi sosial akan memberikan bentuk tingkah terhadap individu yang berada pada situasi tersebut.
2. Norma kelompok, pengaruh kekuasaan norma-norma kelompok sangat berpengaruh terhadap terjadinya interaksi sosial antara individu.
3. Kepentingan pribadi, masing-masing individu memiliki tujuan-keperluan sehingga berpengaruh terhadap tingkah lakunya.
4. Kelelahan, setiap individu berinteraksi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya yang bersifat sementara.
5. Penilaian situasi sosial, setiap situasi mengandung arti bagi individu sehingga hal ini mempengaruhi individu untuk melihat dan menafsirkan situasi tersebut.

Setiap individu dalam melaksanakan interaksi sosial dengan individu yang lain dipengaruhi oleh situasi di lingkungan yang sering kali mempunyai norma atau aturan dalam berkehidupan masyarakat. Kepentingan pribadi yang dibawa dalam interaksi membuat individu mempunyai peran atau posisi. Peran ini yang membuat individu menafsirkan tentang keadaan yang sedang ditemuinya.

3. Sifat-Sifat Antarperson

Pada respons setiap orang terbentuk sebagai hasil pembiasaan dari tiga faktor yaitu:

- Faktor pembiasaan
- Faktor lingkungan sosial yang mempengaruhinya
- Faktor masa lalu, baik dalam bentuk pengalaman keberhasilan atau kegagalan.

Beberapa ahli berpendapat bahwa gaya dalam memberikan respon dipengaruhi juga oleh posisi, peranan, dan situasi pada saat interaksi sosial berlangsung. Menurut Krach Outchifflet dan Belachey, di dalam bukunya "Individual in Society" (1962) dinyatakan bahwa ada 2 sifat respon antar-pribadi besar, yaitu:

- a. *Role disposition*, terdiri dari:
 - Sifat berpengaruh (*Ascendancy*)
 - Sifat menguasai (*Dominance*)
 - Sifat yang memperhatikan masalah sosial (*Social interest*)
 - Sifat tidak bergantung pada orang lain (*Independence*)

Keempat sifat di atas menggambarkan cara seseorang melihat perannya di dalam interaksi sosial.

- 1. *Sociometric dispositions*, terdiri dari:
 - Sifat menerima orang lain (*accepting of others*)
 - Sifat bermasyarakat (*socialbility*)
 - Sifat berteman (*friendliness*)
 - Sifat bersimpati (*simpothetic*)
 Keempat sifat di atas menggambarkan dapat terlihat dalam interaksi yang ditekankan pada hubungan sosiometriknya.
- 2. *Expressive dispositions*, terdiri dari:
 - Sifat berkompetisi atau bersaing (*competitiveness*)
 - Sifat agresif (*aggressiveness*)
 - Sifat sadar akan dirinya (*self consciousness*)
 - Sifat pamer diri (*exhibitionistic*)
 Keempat sifat di atas menggambarkan gaya seseorang di dalam menjalankan fungsi antar-person.

2. Bentuk Interaksi Sosial

Orang yang beraliran *neo-freudian* menemukan tiga tipe respons antar-person yang diperlihatkan pada saat berinteraksi yaitu:

- 1. Bergerak menghadapi orang lain
- 2. Bergerak melawan orang lain
- 3. Bergerak menjauhi orang lain

Ketiga tipe itu masing-masing dapat memberi bentuk kepada interaksi di mana mereka berinteraksi. Bentuk interaksi di mana individu-individunya bergerak mendekati individu lain yang menunjukkan adanya kebutuhan afeksi, kesepakatan dan terutama kebutuhan mendapatkan persetujuan.

Bentuk interaksi di mana individunya bergerak melawan individu lain menunjukkan adanya kebutuhan menjadi unggul, mencapai keberhasilan dan mendapat penghargaan kebutuhan-kebutuhan tersebut disertai adanya keinginan untuk menguasai orang lain.

Bentuk interaksi di mana individunya menjauhi individu lain menunjukkan adanya kebutuhan menyendiri, tidak mau diganggu orang lain. Selain itu terdapat pula adanya ketidakbergantungan kepada orang lain, di mana ada kecenderungan untuk tidak senang dipengaruhi, tidak senang dipaksa, tidak dikat dan tidak senang diwajibkan oleh orang lain.

B. Stratifikasi Sosial

1. Pengertian Stratifikasi Sosial

Pemahaman antara stratifikasi sosial dan kelas sosial sering kali disamakan, padahal di sisi lain pengertian antara stratifikasi sosial dan kelas sosial terdapat perbedaan. Perseamaan dua konsep pengertian stratifikasi sosial dan kelas sosial akan melahirkan pemahaman yang rancu. Stratifikasi sosial lebih menjiplak pada pengelompokan orang ke dalam tingkatan atau strata dalam hierarki secara vertikal. Membicarakan stratifikasi sosial berarti menguji posisi atau kedudukan antar-orang/ sekelompok orang dalam keadaan yang tidak sederajat. Adapun pengertian kelas sosial sebenarnya berada dalam ruang lingkup lapisan yang lebih sempit, artinya kelas sosial lebih menapak pada satu lapisan atau strata tertentu dalam sebuah stratifikasi sosial. Kelas sosial cenderung diartikan sebagai kelompok yang anggota-anggotanya memiliki orientasi politik, nilai budaya, sikap dan perilaku sosial yang secara umum sama.

Menurut para ahli mengemukakan definisi stratifikasi sosial sebagai berikut:

- Stratifikasi sosial menurut Parson A. Sorokin (1991) adalah perbedaan penduduk/masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat (hierarki).
- Parson A. Sorokin (1991) dalam karangannya yang berjudul "Social Stratification" mengatakan bahwa sistem lapisan dalam masyarakat itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam masyarakat yang hidup teratur.
- Stratifikasi sosial menurut Robert M.Z. Lawang (2005) adalah pengelompokan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilege dan prestise.

2. Pembentukan Pelapisan Sosial

Ukuran atau kriteria yang memungkil atau dominan sebagai dasar pembentukan pelapisan sosial adalah sebagai berikut:

- Ukuran kekayaan
Kekayaan (materi atau kebendaan) dapat dijadikan ukuran pemenggalan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada, barang

siapa memiliki kekayaan paling banyak maka ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial, demikian pula sebaliknya, yang tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan yang rendah. Kekayaan tersebut dapat dilihat antara lain pada bentuk tempat tinggal, benda-benda mewah yang dimilikinya, cara berpakaian, maupun ketidaksiannya dalam berbelanja.

b. Ukuran kekuasaan dan wewenang

Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran kekuasaan sering tidak lepas dari ukuran kekayaan, sebab orang yang kaya dalam masyarakat biasanya dapat menguasai orang-orang lain yang tidak kaya, atau sebaliknya, kekuasaan dan wewenang dapat mendatangkan kekayaan.

c. Ukuran kehormatan

Ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang yang dianggap atau dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial masyarakatnya. Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional, biasanya mereka sangat menghormati orang-orang yang banyak jasanya kepada masyarakat, para orang tua ataupun orang-orang yang berperilaku dan berbudi luhur.

d. Ukuran ilmu pengetahuan

Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik (kesarjanaan), atau profesi yang disandang oleh seseorang, misalnya dokter, insinyur, sarjana, dan sebagainya, atau gelar profesional seperti profesor. Namun sering timbul akibat-akibat negatif dari kondisi ini jika gelar-gelar yang disandang tersebut lebih dinilai tinggi daripada ilmu yang dikuasainya, sehingga banyak orang yang berusaha dengan cara-cara yang tidak benar untuk memperoleh gelar kesarjanaan, misalnya dengan membeli skripsi, membuat ijazah palsu, dan seterusnya.

3. Kelas dan Stratifikasi Sosial

Menurut pandangan para ahli kelas dan stratifikasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

A. Menurut Karl Marx

Seorang yang mengguncangkan dunia dengan analisis yang tajam dan akurat tentang keadaan manusia di era kapitalisme. Perbedaan dua situasi ekonomi dan politik yang dilakukannya dalam kondisi pelajaran politik dan kemutihan tragic anak-anaknya. Tak ada ungkapan yang tepat selain revolusioner baginya. Lahir di Jerman pada tanggal 5 Mei 1818. Semuanya berawal ketika ia kuliah di Berlin, dan sudah amatang pelajaran untuk mengemukakan dirinya lewat perjuangan kelas akibat ketertindasan dan penghapusan yang dilakukan oleh para kapitalis.

Seluruh pemikiran Karl Marx berdasarkan bahwa pelaku utama dalam masyarakat adalah kelas-kelas sosial. Salah satu kesulitan dalam teori kelasnya Marx adalah meskipun Marx sering berbicara tentang kelas-kelas sosial, namun ia tidak pernah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan istilah "kelas". Ada baiknya kita ambil saja salah satu definisi tentang kelas dari seorang Marx sekaligus pemimpin revolusi Bolshevik 1917 yang terkenal, Lenin mendefinisikan kelas sebagai berikut:

"Classes are large groups of people differing from each other by the place they occupy in a historically determined system of social production, by their relation (in most cases fixed and formulated in law) to the means of production, by their role in the social organization of labour, and consequently, by the dimensions and mode of acquiring the share of social wealth of which they dispose. Classes are groups of people one of which can appropriate the labour of another owing to the different places they occupy in a definite system of social economy"

Itulah definisi kelas klas kaum Marx. Kelas-kelas sosial pun dibedakan menjadi berdasarkan posisinya dalam produksi, menurut mereka:

"Kriteria fundamental yang membedakan kelas-kelas adalah posisi yang mereka duduki dalam produksi sosial, dan konsekuensinya menentukan kelas mereka terhadap alat-alat produksi."

Relasi yang kelas-kelasnya menempati posisi atas atau produksi menentukan peran mereka dalam organisasi sosial kerja, sebab kelas-kelas memiliki fungsi-fungsi yang berbeda dalam produksi sosial. Dalam masyarakat antagonis beberapa kelas mengatur produksi, mengatur pemerintahan dan mengatur seluruh urusan sosial, misalnya mereka yang memiliki keunggulan dalam kerja mental. Sementara kelas-kelas lainnya menduduki di bawah beban kewajiban kerja fisik yang berat. Biasanya,

dalam masyarakat yang terbagi atas kelas-kelas, manajemen produksi dijalankan oleh kelas yang memiliki alat produksi. Namun segera setelah beberapa relasi produksi menjadi sebuah halangan bagi perkembangan tenaga-tenaga produktif, kelas-kelas penguasa pun harus mulai memainkan peran yang berbeda dalam organisasi sosial kerja. Ia berangsur-angsur kehilangan signifikansinya sebagai organisator produksi, dan merosot posisinya menjadi sebuah sampah parasitis dalam tubuh masyarakat dan hidup atas kerja keras orang lain. Seperti pada nasib tuan tanah feodal dulu, hal inilah yang dialami oleh para borjuis atau kapitalis kini. Menurut Marx kehancuran feodalisme dan lahirnya kapitalisme telah membuat terpecahnya masyarakat menjadi dua kelas yang sifatnya antagonis, yaitu kelas borjuis yang memiliki alat produksi dan kelas proletar yang tidak mempunyai alat produksi. Dua kelas inilah yang dalam terminologi Marxis disebut kelas fundamental karena sifatnya yang tak terdamaikan atau antagonis. Penghancuran atas salah satunya merupakan gerak sejarah yang dimanifestasikan lewat perjuangan kelas.

Marx membuktikan bahwa masyarakat kapitalis adalah masyarakat terakhir dalam sejarah manusia dengan kelas-kelas antagonistisnya. Jalan yang mengarahkan kepada masyarakat tanpa kelas terletak pada perjuangan kelas proletariat melawan segala bentuk penindasan, demi membangun kekuatannya dalam masyarakat yang diciptakan untuk melindungi kepentingan rakyat pekerja.

Marx memandang kelas pekerja sebagai kekuatan sosial utama di zaman kapitalisme yang memiliki kemampuan untuk mengeliminasi sistem kapitalis dan menciptakan sebuah masyarakat baru tanpa kelas yang terbebas dari eksploitasi.

b. Asal Mula Kelas menurut Karl Marx

Hukum perkembangan masyarakat Marx berdasarkan salah satu ajarannya tentang materialisme historis. Pada awalnya tidak ada kelas dalam masyarakat yaitu pada zaman komunal primitif. Pada zaman ini, orang harus saling tolong menolong dalam rangka terus bertahan hidup dan melindungi diri dari berbagai macam binatang pemangsa. Hal ini memaksa orang harus tinggal menetap, untuk bertahan hidup manusia saat itu berburu hewan, mengumpulkan makanan (tanaman dan buah-buahan) yang dapat dimakan bersama. Tempat tinggal mereka pun dibedakan, dan menjadi pembeda antara kelompok manusia yang satu atas yang lainnya. Berbagai macam keterampilan bahasa muncul. Semua hal ini diidentifikasi sebagai suku atau klan.

Pada saat ini kerja seninya dibedakan antara laki-laki dan perempuan, lalu dibedakan atas dasar kelompok-kelompok usia. Lalu berkembang pada kebiasaan pekerjaan rutin yang dilakukan oleh komunitas penanjan, petani, dan pemburu. Pembagian kerja merupakan hak prerogatif dari anggota komunitas yang tentu dan paling berpengalaman. Namun demikian, mereka tidaklah dianggap sebagai kelas yang memiliki privilese istimewa karena jumlah mereka yang sedikit itu dibandingkan dengan mayoritas dewasa di komunitas di samping hak mereka didapat melalui pemahaman pada kepemilikan properti atau kekuatan mereka. Pada zaman ini produksi yang dihasilkan orang dibuat hanya untuk mencukupi kebutuhan kebutuhan langsung, jadi tidak terdapat lahan untuk mengukurnya berdasarkan sosial.

Setelah zaman komunal period berakhir anggur putar, banyak hal yang menjadi penyebab hal ini terjadi, salah satunya adalah berahalnya zaman ini tidak terjadi secara berbarengan berbagai daerah di dunia ini sebagai contoh negara-negara Afrika, formal kelas-kelas baru mulai terbentuk setelah resim-resim kolonial beringsikan, yaitu sejak tahun 1750-an sedangkan kelas di Meksiko pada akhir milenium ke-4 dan di Asia milenium ke-3 sebelum Masehi.

Kemunculan kelas-kelas sosial ini terjadi akibat dari pembagian kerja secara sosial, di saat kepemilikan pribadi atas alat produksi menjadi sebuah kenyataan. Maka melakukan stratifikasi terhadap masyarakat berdasarkan dimensi ekonomi, di mana hal yang paling pokok menurutnya adalah kepemilikan atas alat produksi, seperti yang selalu dia katakan dalam berbagai tulisannya, pembagian kerja yang merupakan sumber ketidaksolidan sosial terjadi saat memudarnya masyarakat komunal period.

"Salah satu dari prasyarat yang paling umum dari kehadiran masyarakat yang terbagi atas kelas adalah perkembangan tenaga-tenaga produktif. Dalam proporsinya yang signifikan, proses ini membutuhkan tingkat keahlian yang berprestasi jauh lebih tinggi daripada yang dibutuhkan orang untuk memelihara hidupnya. Jadi, surplus produk memberikan kepada orang manusia lebih dari yang dibutuhkan mereka, dan sebagai konsekuensinya, ketidaksolidan sosial secara bertahap tumbuh dengan sendirinya dalam masyarakat."

Berlawanan dengan kepemilikan pribadi atas alat produksi yang menghambat perkembangan tenaga-tenaga produktif, dan produksi individu atau keluarga telah menghapuskan produksi komunal sebelumnya, ketidaksolidan ekonomi menjadi tidak terhindarkan lagi dan hal ini mengondisikan masyarakat ke dalam kelas-kelas.

Para pemimpin dan tetua komunitas yang mempunyai otoritas dalam komunitas untuk melindungi kepentingan bersama ini. Termasuk dalam hal pengawasan dan pengambilan putusan yang dianggal adil oleh komunitas. Hal demikian juga dapat kita sebut sebagai kekuasaan negara elementer, namun pada dasarnya mereka tidak pernah berhenti mengabdikan pada komunitas.

Perkembangan tenaga-tenaga produktif dan penggabungan komunitas-komunitas tersebut ke dalam entitas yang lebih besar mengarah pada pembagian kerja lebih lanjut. Dalam perkembangannya terbentuklah badan-badan khusus yang berfungsi untuk melindungi kepentingan bersama serta juri dalam perselisihan antarkomunitas. Secara bertahap badan-badan ini mendapat otonomi yang semakin besar dan memisahkan dirinya dari masyarakat sekaligus merepresentasikan kepentingan kelompok sosial utama. Otonomi ini dari pejabat urusan publik berubah menjadi bentuk dominasi terhadap masyarakat yang membentuknya, dulunya abdi publik sekarang para pejabat itu berubah menjadi tuan-tuan (*lords*).

"Pada umumnya, perkembangan produksi sosial menuntut adanya tenaga kerja manusia yang lebih banyak guna terlibat dalam produksi material. Tidak ada komunitas yang sanggup menyediakan hal itu sendiri, dan tenaga kerja manusia tambahan disediakan oleh peperangan."

Cara lain pembentukan kelas adalah melalui pembudakan terhadap bala tentara musuh yang tertangkap saat perang. Para peserta perang mulai menyadari bahwa lebih bermanfaat untuk membiarkan para tawanan mereka terus hidup dan memaksa mereka untuk bekerja. Jadi hak-hak mereka sebagai manusia dicabut dan diperlakukan tak ubahnya seperti binatang pekerja.

Dalam perkembangan masyarakat selanjutnya, kita akan mengenal kelas-kelas yang saling bertentangan. Hal ini disebabkan kepentingan mereka selalu tidak dapat diketemukan. Dalam terminologi Marxis kita akan mengenal bahwa kelas dibedakan menjadi dua macam bentuk dan sifatnya yaitu kelas-kelas fundamental dan kelas-kelas nonfundamental.

Kelas-kelas fundamental adalah kelas-kelas yang keberadaannya ditentukan oleh corak produksi yang mendominasi dalam formasi sosial ekonomi tertentu. Setiap formasi sosial ekonomi yang antagonis memiliki dua kelas fundamental. Kelas-kelas ini bisa berupa pemilik budak dan budak, tuan feodal dan hambanya, ataupun borjuis dan proletar. Kontradiksi-kontradiksi antagonis di antara kelas-kelas tersebut berubah oleh penggantian sistem yang bertakut dengan sebuah sistem baru yang progresif.

Kelas-kelas nonfundamental adalah bekas-bekas atau sisa-sisa dari kelas dalam sistem yang lama dan masih bisa dilihat dalam sistem yang baru. Biasanya kelas ini menumbuhkan corak produksi yang baru dalam bentuk struktur ekonomi yang spesifik. Sebagai contoh para pedagang, lintah darat, petani-petani kecil yang terdapat dalam masyarakat kepemilikan budak dengan kelas yang fundamental pemilik budak dan budak.

Kelas-kelas fundamental dan nonfundamental saling bergantung secara erat, karena dalam perkembangan sejarahnya, kelas fundamental bisa menjadi nonfundamental, dan demikian pula sebaliknya. Sebuah kelas fundamental merosot menjadi sebuah kelas nonfundamental saat corak produksi yang dominan yang mendasarinya secara bertahap berubah menjadi sebuah struktur sosial ekonomi yang sekunder. Sebuah kelas nonfundamental menjadi fundamental saat sebuah struktur sosial ekonomi baru yang terdapat di dalam sebuah formasi sosial ekonomi berubah menjadi corak produksi yang dominan.

Masyarakat juga bisa memiliki lapisan orang-orang yang tidak termasuk ke dalam kelas-kelas tertentu, yaitu elemen-elemen tak berkelas yang telah kehilangan ikatan-ikatan dengan kelas asalnya. Hal ini berlaku bagi lumpen-lumpen kapitalisme yang terdiri atas orang-orang tanpa pekerjaan tertentu atau yang biasa disebut sebagai sampah-sampah masyarakat, seperti pengemis, pelacur, pencuri, dan sejenisnya.

Selain kelas, terdapat kelompok sosial besar lain yang garis pembatasannya terletak pada latar yang berbeda dengan latar-latar pembagian kelas, ia mungkin saja didasarkan pada usia, jenis kelamin, ras, profesi, kebangsaan, dan pembeda lainnya.

C. Menurut Max Weber

Lahir di Jerman pada 1864. Belajar ilmu hukum di Universitas Berlin dan Universitas Heidelberg, selepas studinya ia bekerja sebagai dosen ilmu hukum di Universitas tempat ia belajar dulu. Selain mengajar ia pun berperan sebagai konsultan dan peneliti, dan semasa Perang Dunia I ia mengabdikan diri di angkatan bersenjata Jerman. Pada 1889, ia menulis sebuah disertasi yang berjudul *A Contribution to the History of Medieval Business Organization*. Salah satu bukunya yang terkenal adalah *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Dalam bukunya ini Weber menggambarkan hubungan antara Etika Protestan dan Kapitalisme di Eropa Barat.

Max Weber termasuk di antara salah satu sosiolog yang tidak sepekat dengan penggunaan dimensi ekonomi semata-mata untuk menentukan stratifikasi sosial. Giddens dalam bukunya *Sociology* menunjukkan persamaan antara Marx dan Weber:

"Like Marx, Weber regarded society as characterized by conflict over power and resources."

Sekaligus perbedaannya,

"Although Weber accepted Marx's view that class is founded on objectively given economic factors as important in class formation than were recognized by Marx"[8].

Baik Marx maupun Weber keduanya melihat bahwasanya kelas adalah stratifikasi atas masyarakat berdasarkan dimensi ekonomi. Namun seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa Weber termasuk ilmuwan sosial yang menolak penggunaan dimensi stratifikasi ekonomi semata-mata dalam menentukan stratifikasi sosial masyarakat.

Menurut Weber, stratifikasi sosial tidak sesederhana demikian hingga dapat dijelaskan lewat kelas, ia menambahkan dalam uraiannya tentang kekuasaan dalam masyarakat bahwa perbedaan masyarakat dapat dilihat melalui kelompok status, partai, dan kelas.

Kelas menurut Weber adalah sejumlah orang yang mempunyai persamaan dalam hal peluang untuk hidup atau nasib (*life chances*). Peluang untuk hidup orang tersebut ditentukan oleh kepentingan ekonomi berupa penguasaan atas barang serta kesempatan untuk memperoleh penghasilan dalam pasaran komoditas atau pasaran kerja. Sebagai akibat dari dipunyai-persamaan untuk menguasai barang dan jasa sehingga diperoleh penghasilan tertentu, maka orang yang berada di kelas yang sama mempunyai persamaan yang dinamakan situasi kelas.

Situasi kelas adalah persamaan dalam hal peluang untuk menguasai persediaan barang, pengalaman hidup pribadi, atau cara hidup. Kategori dasar untuk membedakan kelas ialah kekayaan yang dimilikinya, dan faktor yang menciptakan kelas ialah kepentingan ekonomi, pada titik ini konsep kelas Marx dan Weber adalah sama, yaitu perbedaan kelas dan faktor yang mendorong terciptanya kelas.

Dimensi lain yang digunakan Weber adalah ialah dimensi kehormatan. Manusia dikelompokkan dalam kelompok status. Kelompok status merupakan

orang yang berada dalam situasi status yang sama, di mana orang yang peluang hidupnya ditentukan oleh ukuran kehormatan, coba lihat perbedaan sultan dan abdi dalam yang ada di Yogyakarta. Persamaan kehormatan status dinyatakan dalam persamaan gaya hidup. Dalam bidang pergaulan hal ini dapat berupa pembatasan dalam pergaulan dengan orang yang statusnya lebih rendah. Selain adanya pembatasan dalam pergaulan, menurut Weber kelompok status ditandai oleh adanya hak istimewa dan monopoli atas barang dan kesempatan ideal maupun material. Dalam hal gaya hidup, hal ini bisa kita lihat dari gaya konsumsi.

Di samping perbedaan lewat dimensi ekonomi dan kehormatan, Weber menambahkan bahwa masyarakat juga dibeda-bedakan berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya. Kekuasaan menurut Weber adalah peluang bagi seseorang atau sejumlah orang untuk mewujudkan keinginan mereka sendiri melalui suatu tindakan komunal meskipun mengalami tentangan dari orang lain yang ikut serta dalam tindakan komunal itu. Bentuk dari tindakan komunal ini adalah partai yang diorientasikan pada diperolehnya kekuasaan.

d. Menurut Erik Olin Wright

Sosiolog dari Amerika ini telah membangun teori kelas kombinasi dari pendekatan Marx dan Weber. Sulit rasanya untuk menulis tentang ilmuwan sosial yang satu ini, hal ini disebabkan Wright sendiri tidak pernah mendefinisikan kelas menurut dia sendiri, di samping buat saya adalah referensi tentang pikirannya dalam bentuk buku masih jarang ditemui, beberapa bahan dapat saya temukan lewat internet namun hal ini juga ternyata tidak cukup memuaskan. Dari berbagai tulisannya tentang Sosiologi, Erik Olin Wright dapat digolongkan ke kelompok Neo Marxis. Tulisannya tentang kelas banyak ditemukan di Internet. Menurut Wright:

"There are three dimensions of control economic resources in modern capitalist production, and these allow us to identify the major classes which exist."

1. *Control over investments or money capital.*
2. *Control over the physically means of production (land or factories and offices).*
3. *Control over labour power.*

Ketiga poin di atas seluruhnya dikuasai oleh kelas kapitalis, sedangkan kelas pekerja sendiri tidak menguasai satu pun dari tiga hal di atas. Padahal menurut Marx bahwa poin pertama dan kedua di atas ditasifikan

dari poin ketiga, ironis memang jika melihat hal demikian, bayangkan ada sekelompok orang yang telah seharian bekerja keras, namun hasil kerja tidak dapat ia nikmati sendiri.

Di antara dua kelas utama ini ada kelompok yang posisinya ambigu menurut dia, sebut saja seperti yang dia contohkan yaitu para manajer dan pekerja kerah putih atau para profesional. Letak ambiguitas orang-orang ini dalam sistem produksi adalah mereka mampu memengaruhi beberapa aspek dari produksi, namun mereka tidak mampu menguasainya. Sama seperti para pekerja manual mereka menjual tenaga mereka kepada kaum kapitalis lewat kontrak kerja, namun di satu sisi mereka mempunyai wewenang dalam perencanaan kerja atau kerja mental.

Kita tentu masih ingat apa yang dikatakan Marx, bahwa di antara kelas borjuis dan kelas proletar ada kelas yang dinamakan kelas borjuis kecil, yang dalam perkembangannya akan jatuh ke dalam barisan kaum proletariat disebabkan mereka tidak mempunyai modal yang cukup besar dalam usahanya. Dalam perjalanan kapitalisme besar tidak adanya modal menentukan dalam usaha mempertahankan produksi dan mendapatkan surplus guna memperbesar modal produksi. Sistem monopoli dan persaingan bebas yang berlaku di dalam kapitalisme telah memaksa orang-orang yang seperti disebut oleh Wright "contradictory class locators" akhirnya habis dimakan oleh kapitalis-kapitalis besar.

Tentu ada sebab-sebab yang menjadikan kelompok ini muncul, yaitu keahlian dan kemampuan. Dalam konsep mobilitas sosial, faktor pendidikan memainkan peranan yang cukup penting di sini lewat pendidikan individu yang berasal dari status rendah, namun berpendidikan tinggi, dalam masyarakat kapitalis yang membutuhkan para pekerja ahli misalnya manajer guna mengawasi berjalannya sistem produksi. Kelas pekerja tidak mempunyai keahlian yang cukup dalam hal manajemen ini karena cuma tenaga yang mereka punya. Itu pun akan digantikan oleh mesin-mesin seiring dengan kemajuan teknologi. Tentu ada aspek-aspek lain dari hal ini. Biasanya, pekerja yang mempunyai keahlian dan berpengalaman dalam bidangnya dapat memperoleh upah kerja di atas rata-rata yang diterima oleh pekerja biasa. Kesempatan kerja pun terbuka lebih jauh dan lebar dari kelompok ini akibat dari keahlian yang dimilikinya. Menurut Wright:

"employees with knowledge and skills are more difficult to monitor and control, employers are obliged to secure their loyalty and cooperation by rewarding them accordingly."

Dimensi kekuasaan dalam sistem produksi dari kelompok ini juga ikut memasukkan konsepnya Weber dalam stratifikasi sosialnya Erik Olin Wright. Pada hakikatnya sifat dari kelompok ini adalah oportunis dan pragmatis.

Berdasarkan pengalaman sehari-hari, menurut saya pendekatan Marx dalam melakukan stratifikasi terhadap masyarakat di mana saya hidup cukup relevan. Masyarakat di dalam negara dunia ketiga seperti Indonesia di mana kesenjangan antara yang kaya dan yang dimiskinkan demikian lebarnya, pendekatan Marx bisa menjelaskan apa yang saya alami sehari-hari.

Zaman yang sedang berlangsung ini adalah zaman kapitalisme yang telah mencapai tahapnya yang tertinggi, yaitu imperialisme, dan sedang berjalan menuju kehancurannya, seperti yang diyakini Marx dan para Marxis. Dua kelas utama dalam masyarakat ini adalah borjuis dan proletar. Borjuasi terdiri dari para pemilik properti pertanian dan industri besar yang hanya kerja di perusahaannya, dan menikmati surplus dalam bentuk keuntungan yang didapatnya dari hasil kerja para buruh upahan yang tetap tidak terbayar sesuai dengan kebutuhannya di dalam zaman kapitalisme. Kelas yang berseberangan dengan borjuis, yang di satu sisi merupakan prakondisi dari kemunculannya, dan di sisi lain adalah proletar, yaitu kelas yang harus menjual tenaganya kepada para kapitalis sekadar untuk terus bertahan hidup.

Ketergantungan kelas ini terhadap para kapitalis cukup besar dan hal ini diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Seorang pekerja tidak berhak atas alat produksi. Ia bergantung pada tenaganya sendiri dalam kehidupan, dalam zaman ini tak seorang pun kecuali para kapitalis yang memiliki alat produksi dapat membeli dan mempergunakan tenaga kerja. Konsekuensi dari hal ini adalah para pekerja terpaksa bekerja untuk para kapitalis tersebut. Borjuis bergerak terus dalam perkembangannya yang sesuai dengan tahap-tahap perkembangan ekonomi masyarakat kapitalis. Munculnya borjuis sebagai kelas dihubungkan dengan zaman yang disebut akumulasi modal primitif. Indikasi zaman ini adalah perampasan tanah dan instrumen kerja milik masyarakat luas, melalui elemen terpentingnya yaitu perampasan barang-barang kolonial dan ekspansionisme. Di saat semua syarat telah tersedia bagi mulainya sebuah corak produksi kapitalis. Syarat-syarat itu termasuk telah hadirnya massa pekerja upahan independen dan konsentrasi kapital di tangan borjuasi.

Di Indonesia, hal ini berlangsung dengan masuknya kolonialisme Belanda. VOC sebagai serikat dagangnya waktu itu. Bentuk-bentuk pengisapan yang

dilakukan VOC waktu itu adalah *leverentien* dan *contingenten*. *Leverentien* adalah sistem penyerahan hasil pertanian oleh para bupati pesisir kepada VOC dalam jumlah yang ditentukan oleh VOC. *Contingenten* adalah sistem jatah penyerahan hasil pertanian yang dikenakan kepada bupati di pesisir Jawa oleh VOC, dengan demikian kaum tani pada masa itu menderita dua macam penindasan, dari raja-raja, dan dari VOC. Hal ini terus berjalan hingga sampai ke masa imperialisme yang telah menimbulkan situasi baru di Indonesia. Kemunculan pabrik-pabrik, perkebunan-perkebunan besar, pelabuhan-pelabuhan, hingga perusahaan swasta membutuhkan tenaga kerja terdidik untuk melaksanakan pekerjaan yang serba-modern. Perubahan tanah-tanah pertanian yang kini telah berubah menjadi kawasan perdirinya berbagai fasilitas produksi. Bersamaan dengan terjadinya hal ini kelas pekerja pun muncul.

Perkembangan borjuasi dikaitkan dengan revolusi industri dan kapitalisme zramonopoli sampai periode monopoli kapitalisme dan revolusi sains dan teknologi. Awal abad ke-20 adalah tahun oligarki finansial timbul ke permukaan. Sebagai akibat munculnya jutawan-jutawan, kebangkrutan banyak pengusaha kecil dan menengah, konsentrasi modal dan produksi, itulah basis ekonomi kapitalisme mulai masuk ke tahapannya yang tertinggi yaitu imperialisme. Dalam imperialisme, borjuasi cenderung secara terus-menerus mengecil jumlahnya hal ini diakibatkan oleh persaingan bebas yang menjadi hukum di zaman imperialisme ini. Konsekuensi logis dari hal ini adalah meningkatnya jumlah kaum pekerja.

Proses pembentukan kelas pekerja di negara berkembang, yang ekonominya seringkali merupakan kombinasi antara elemen kapitalis, feodal bahkan patriarkal, merupakan proses yang rumit dan pelik. Hampir tidak ada negara di dunia ini di mana kapitalisme hadir dalam bentuk aslinya. Biasanya, kelas warisan dari sistem sosial ekonomi sebelumnya terus bertahan dan berdampingan dengan kapitalis, khususnya sisa-sisa dari kelas feodal atau pemilik tanah yang mendominasi terus bertahan di beberapa negara bahkan di bawah kapitalisme seperti di Indonesia saat kita jumpai hubungan-hubungan itu di beberapa daerah misalnya Yogyakarta dan daerah Jawa lainnya.

Pada masyarakat kapitalis, terdapat beberapa strata kecil yang terdiri dari pemilik alat produksi kecil strata ini terbentuk dari petani dan borjuasi kecil perkotaan. Namun dalam perkembangan selanjutnya strata ini akan hancur jika relasi-relasi produksi akan menajam dalam perkembangannya.

Seperti yang dapat kita lihat di dalam kondisi di Indonesia di masa engka tenaga kerja yang terus meningkat tak pernah terpenuhi oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Negara yang merupakan alat dari kelas yang berkuasa di Indonesia adalah kelas kapitalis dan kaum komprador telah melegitimasi atas kondisi yang terjadi dan bahkan mengondisikan hal itu demi kepentingan kelas yang berkuasa.



BAB III

KEBUDAYAAN DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Kebudayaan

1. Pengertian Kebudayaan

a. E. B. Tylor (1992)

Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

b. R. Linton (1995)

Kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dari hasil tingkah laku yang dipelajari, di mana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya.

c. Koentjaraningrat (1999)

Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, milik diri manusia dengan belajar.

d. Selo Soemardjan (1998)

Kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

e. Herkovits (1991)

Kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia.

Kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia baik material maupun nonmaterial. Sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan seperti ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan evolusionisme, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks.

Jadi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan bisa dikatakan sebagai suatu sistem dalam masyarakat di mana terjadi interaksi antarindividu/ kelompok dengan individu/kelompok lain sehingga menimbulkan suatu pola tertentu, kemudian menjadi sebuah kesepakatan bersama (baik langsung ataupun tidak langsung).

2. Unsur-Unsur Kebudayaan

Ada 7 unsur kebudayaan, yaitu:

- a. Unsur pakaian dan perlengkapan hidup, seperti: rumah, pakaian, kendaraan, dan lain-lain.
- b. Unsur mata pencaharian/sistem ekonomi, seperti: pegawai, petani, buruh, dan lain-lain.

- c. Unsur sistem kemasyarakatan, yang meliputi hukum, kekerabatan, perkawinan, dan lain-lain.
- d. Unsur bahasa baik lisan maupun tulisan yang berfungsi sebagai alat komunikasi.
- e. Unsur kesenian, seperti seni tari, seni musik, seni rupa, dan lain-lain.
- f. Unsur ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti: pengetahuan alam, perbintangan, pertambangan, komputer, dan lain-lain.
- g. Unsur agama dan kepercayaan.

B. Kebudayaan Multikultural

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan. Tercakup dalam pengertian kebudayaan adalah para pendukung kebudayaan, baik secara individu maupun secara kelompok dan terutama ditujukan terhadap golongan sosial askrpsi yaitu suku bangsa (dan ras), gender dan umur. Ideologi multikulturalisme ini secara bergandengan tangan saling mendukung dengan proses demokratisasi, yang pada dasarnya adalah kesederajatan pelaku secara individual dalam berhadapan dengan kekuasaan dan komuniti atau masyarakat setempat. Jadi tidak ada kebudayaan yang lebih tinggi demikian pula sebaliknya.

Konteks nilai hak asasi manusia, di mana saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. HAM merupakan bagian dari kerangka kerja yang sifatnya saling melengkapi satu sama lain. Pemenuhan atas satu hak, secara keseluruhan atau sebagian, seringkali bergantung pada pemenuhan yang lain. Sebagai contoh, kemampuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara langsung dipengaruhi oleh hak berekspresi, hak atas pendidikan dan bahkan hak untuk memperoleh hidup yang layak. Tiap hak berkontribusi terhadap perwujudan martabat kemanusiaan seseorang, lewat pemenuhan kebutuhan pengembangan fisik, psikis dan spiritual. Karena itu, tidak bisa diterima jika ada prioritas terhadap hak yang satu, sembari melecehkan hak yang lain.

Sikap Kritis, Toleransi, dan Empati

Mengatasi masyarakat majemuk, Parsudi Supartan (2002) menawarkan sebuah penyebaran konsep multikulturalisme melalui LSM, dan pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi. Alternatif penyelesaian masalah akibat

keanekaragaman budaya adalah dengan melakukan strategi kebudayaan di mana memungkinkan tumbuh kembangnya keberagaman budaya yang menuju integrasi bangsa dengan tetap memperhatikan kesederajatan budaya-budaya yang berkembang. Untuk itu komunikasi antarbudaya perlu dibangun disertai dengan sikap kritis, toleransi, dan empati.

Hubungan antara suku bangsa dan ras sangatlah erat. Perbedaan ras banyak ditunjukkan dengan perbedaan biologis fisik. Misalnya ada anggapan bahwa berkulit hitam pasti berambut keriting, sedangkan berkulit kuning berambut lurus. Faktor rasa ini sampai sekarang tidak dapat diubah dengan teknologi dan tidak dapat disembunyikan.

C. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian HAM

HAM merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sehingga bersifat kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabutnya. Pada hakikatnya, HAM terdiri atas dua hak dasar yang fundamental, yaitu hak persamaan dan kebebasan. Berikut ini beberapa pengertian HAM.

a. UU No. 39 Tahun 1999

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

b. Tap MPR No. XVII/MPR/1999

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapa pun.

c. Universal Declaration of Human Rights

Hak asasi manusia merupakan pengakuan akan martabat yang terpadu dalam diri setiap orang akan hak-hak yang sama dan tidak teralihkan dari semua anggota keluarga manusia, yaitu dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia.

2. Unsur-Unsur HAM

Ada 6 unsur HAM, yaitu:

1. Hak dasar yang dimiliki oleh manusia;
2. Hak dasar tersebut merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa;
3. Bersifat universal;
4. Tidak dapat dialihkan kepada orang lain;
5. Segala hak dasar itu harus dihormati, dijunjung tinggi, atau dihargai oleh semua pihak, termasuk dalam hal ini negara;
6. Dasar dari semua Hak Asasi adalah manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, kemampuan, dan cita-citanya.

3. Hubungan Kebudayaan dengan HAM

Potensi Keberagaman Budaya

Tiap suku bangsa ini memiliki ciri fisik, bahasa, kesenian, adat istiadat yang berbeda. Dengan demikian dapat dikatakan bangsa Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya. Beberapa aspek keberagaman budaya Indonesia antara lain suku, bahasa, agama dan kepercayaan, serta kesenian. Kekayaan budaya ini merupakan daya tarik tersendiri dan potensi yang besar untuk pariwisata serta bahan kajian bagi banyak ilmuwan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan. Hal yang utama dari kekayaan budaya yang kita miliki adalah adanya kesadaran akan adanya bangsa akan kebudayaan yang kita miliki serta bagaimana dapat memperkuat budaya nasional sehingga "kesatuan kesadaran atau *notion* bahwa kebudayaan yang berkembang adalah budaya yang berkembang dalam sebuah NKRI sehingga memperkuat integrasi."

Seperti halnya dalam pengertian kebudayaan, di mana keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan bisa dikatakan sebagai suatu sistem dalam masyarakat di mana terjadi interaksi antarindividu/kelompok dengan individu/kelompok lain sehingga menimbulkan suatu pola tertentu, kemudian menjadi sebuah kesepakatan bersama (baik langsung ataupun tidak langsung).

Di satu sisi bangsa Indonesia juga mempunyai permasalahan berkaitan dengan keberagaman budaya, yaitu adanya konflik yang berlatar belakang perbedaan suku dan agama. Banyak pakar menilai akar masalah

konflik ialah kemajemukan masyarakat, atau adanya dominasi budaya masyarakat yang memiliki potensi tinggi dalam kehidupan serta adanya ikatan primordialisme baik secara vertikal dan horisontal. Di samping itu, kesenjangan antara dua kelompok masyarakat dalam bidang ekonomi, kesempatan memperoleh pendidikan atau mata pencaharian, maupun sosial dan budaya yang mengakibatkan kecemburuan sosial, terdapat adanya perbedaan dalam mengakses fasilitas pemerintah juga berpengaruh (pelayanan kesehatan, pembuatan KTP, SIM atau sertifikat serta hukum). Semua perbedaan tersebut menimbulkan prasangka atau kontroversi hingga dapat berakhir dengan konflik.

Mempelajari kebudayaan terdapat beberapa pendekatan: materi behaviorisme, dan ideasional. Pendekatan materi yakni memandang kebudayaan sebagai materi: pada produk yang dihasilkan sehingga bisa diobservasi. Pendekatan behaviorisme kebudayaan dipandang sebagai suatu pola tindakan dan perilaku atau sebagai suatu sistem adaptif. Sedangkan pada pendekatan ideasional kebudayaan dipandang sebagai suatu ide, yaitu keseluruhan pengetahuan yang memungkinkan produk dan perilaku ditampilkan.

Memahami kebudayaan kita harus mengacu pada sejumlah karakteristik kebudayaan, antara lain adalah bahwa kebudayaan itu dimiliki bersama, diperoleh melalui belajar, bersifat simbolis, bersifat adaptif dan maladaptif, bersifat relatif dan universal.

Konteks HAM, Kesadaran akan pentingnya hak-hak semakin menguat seiring dengan kesadaran moral umat manusia yang juga makin berkembang. Penghargaan dan pengakuan terhadap hak-hak, berhubungan erat dengan penghayatan nilai-nilai, khususnya moral. Dalam hubungannya dengan HAM, penghargaan tersebut merupakan suatu imperatif moral dan bukan soal bebas kasih dan keputusan pribadi (Ceunfin, 2004). Imperatif tersebut hadir ke permukaan sebagai kebajikan manusia yang melahirkan keyakinan tentang adanya hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran atau pengurangan hak-hak tersebut akan mengurangi martabat manusia, sehingga untuk alasan apa pun hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi, dilanggar maupun diabaikan. Meskipun seseorang melakukan perjanjian untuk menyerahkan atau mengurangi kebebasannya, kontrak tersebut tidak akan dianggap sah dan esensi HAMnya tidak akan dikurangi (Onaga & Manuel, 2004).

▲ Sikap Toleransi dan Empati

Masyarakat majemuk sering diidentikkan oleh orang awam sebagai masyarakat multikultural. Uraian dari Supardi Suparlan dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Masyarakat majemuk terbentuk dari dipersatukannya masyarakat-masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional yang biasa dilakukan secara paksa (*coercy by force*) menjadi sebuah bangsa dalam wadah nasional. Setelah PD II contoh masyarakat majemuk antara lain, Indonesia, Malaysia, Afrika Selatan dan Suriname. Ciri yang mencolok dan kritikal majemuk adalah hubungan antara sistem nasional atau pemerintahan nasional dengan masyarakat suku bangsa dan hubungan di antara masyarakat suku bangsa yang dipersatukan oleh sistem nasional.

Menurut Pierre L. Van den Berghe (2001) mengemukakan karakteristik masyarakat majemuk:

1. terjadi segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok subkebudayaan yang berbeda satu dengan yang lain,
2. memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer,
3. kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota-anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar,
4. secara relatif seringkali mengalami konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain,
5. secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi,
6. adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lain.

Di sini Supardi Suparlan (2002) melihat adanya dua kelompok dalam perspektif dominan-minoritas, tetapi sulit memahami mengapa golongan minoritas didiskriminasi, karena besar populasinya belum tentu besar kekuatannya. Konsep diskriminasi sebenarnya hanya digunakan untuk mengacu pada tindakan-tindakan perlakuan yang berbeda dan merugikan terhadap mereka yang berbeda secara asripsi oleh golongan yang dominan. Yang termasuk golongan asripsi adalah suku bangsa (termasuk ras, kebudayaan suku bangsa, dan keyakinan beragama), gender, dan umur.

Dalam menganalisis hubungan antarsuku bangsa dan golongan menurut Koentjoroningrat:

- (1) sumber-sumber konflik
- (2) potensi untuk toleransi

- (3) sikap dan pandangan dari suku bangsa atau golongan terhadap sesama suku bangsa.
- (4) hubungan pergaulan antarsuku – bangsa atau golongan tadi berlainan

Adapun sumber konflik antarsuku bangsa dalam negara berkem seperti Indonesia, paling sedikit ada 5 macam yakni:

- (1) jika dua suku bangsa masing-masing bersaing dalam hal mendapatkan lapangan mata pencaharian hidup yang sama,
- (2) jika warga suatu suku bangsa mencoba memasukkan unsur-ur dari kebudayaan kepada warga dari suatu suku bangsa lain
- (3) jika warga satu suku bangsa mencoba memaksakan konsep-kon agamanya terhadap warga dari suku bangsa lain yang berbeda agama
- (4) jika warga satu suku bangsa berusaha mendominasi suatu suku bangsa secara politis
- (5) potensi konflik terpendam dalam hubungan antarsuku bangsa yang telah bermusuhan secara adat.



BAB IV

KEMAJEMUKAN DAN ETNISITAS

Kemajemukan

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat :

- Secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan lokal berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan kelas antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat dan kedaerahan sering disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, suatu istilah yang mula-mula sekali diperkenalkan oleh Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda.

Menurut J. S. Furnivall (1991) Masyarakat Majemuk adalah suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu keadaan politik. Sebagai masyarakat majemuk, masyarakat Indonesia ia sebut sebagai suatu tipe masyarakat daerah tropis di mana mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai memiliki perbedaan ras.

Kesimpulan dari konsep Furnivall tentang pengertian masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat bagaimana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain.

Menurut Clifford Geertz, (1995) Masyarakat Majemuk adalah merupakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dalam mana masing-masing subsistem terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial.

1. Ciri-Ciri Masyarakat Majemuk

Ciri-ciri masyarakat majemuk menurut Pierre L. Van Den Berghe (1991):

- a. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain.
- b. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer.
- c. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar.
- d. Secara relatif sering kali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.
- e. Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi.
- f. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain.

2. Faktor Penyebab Masyarakat Majemuk

Faktor penyebab masyarakat majemuk:

a. Letak suatu negara/masyarakat

Kenyataan bahwa Indonesia terletak di antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik, sangat memengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, karena letaknya berada di tengah-tengah lalu-lintas perdagangan laut, maka masyarakat Indonesia telah sejak lama memperoleh pengaruh-pengaruh kebudayaan asing melalui para pedagang asing.

b. Keadaan geografis suatu negara

Keadaan geografis yang membagi wilayah Indonesia kurang lebih 3.000 pulau merupakan faktor yang sangat berpengaruh besar terhadap terciptanya pluralitas suku bangsa di Indonesia. Keadaan geografis telah memaksa nenek moyang bangsa Indonesia untuk tinggal menetap di daerah yang terpisah-pisah satu sama lain. Isolasi geografis ini mengakibatkan penduduk yang menghuni setiap pulau atau sebagian pulau di Nusantara tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa yang sedikit banyak terisolasi dari kesatuan suku bangsa yang lain.

Setiap kesatuan suku bangsa terdiri dari sejumlah orang yang dipersatukan oleh ikatan-ikatan emosional, serta memandang diri mereka masing-masing sebagai suatu jenis tersendiri. Mereka pada umumnya memiliki bahasa dan warisan kebudayaan yang sama. Mereka biasanya mengembangkan kepercayaan bahwa mereka memiliki asal-usul keturunan yang sama, suatu kepercayaan yang sering didukung oleh mitos-mitos yang hidup dalam masyarakat tersebut. **Hildred Greetz (1995)**, menyebutkan bahwa jumlah suku-bangsa di Indonesia adalah berjumlah lebih dari 300 ribu suku-bangsa yang masing-masing memiliki bahasa dan identitas kultural yang berbeda-beda. Sedangkan menurut **Skinner (1992)**, jumlah suku-bangsa Indonesia adalah lebih dari 35 suku-bangsa yang masing-masing dengan bahasa dan adat yang tidak sama.

c. Iklim yang berbeda dan keadaan struktur tanah yang berbeda di setiap daerah

Perbedaan curah hujan dan kesuburan tanah merupakan kondisi yang menciptakan dua macam lingkungan ekologis yang berbeda di Indonesia, yaitu: daerah pertanian sawah (*wet rice cultivation*) yang terutama banyak kita jumpai di Pulau Jawa dan Bali, serta daerah pertanian ladang (*shifting cultivation*) yang banyak kita jumpai di luar Pulau Jawa. Perbedaan tersebut

menyebabkan terjadinya perbedaan yang kontras antara Jawa dan luar Jawa dalam bidang kependudukan, ekonomi, dan sosial-budaya.

3. Jenis-jenis Masyarakat Majemuk

Menurut konfigurasi dari komunitas etnisnya, masyarakat majemuk dapat dibedakan menjadi 4 kategori sebagai berikut.

- a. **Masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang**, yaitu masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah komunitas atau kelompok etnis yang memiliki kekuatan kompetitif seimbang.
- b. **Masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan**, yaitu masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah komunitas atau kelompok etnis yang kekuatan kompetitif tidak seimbang.
- c. **Masyarakat majemuk dengan minoritas dominan**, yaitu masyarakat yang antara komunitas atau kelompok etnisnya terdapat kelompok minoritas, tetapi mempunyai kekuatan kompetitif di atas yang lain, sehingga mendominasi politik dan ekonomi.
- d. **Masyarakat majemuk dengan fragmentasi**, yaitu masyarakat yang terdiri atas sejumlah besar komunitas atau kelompok etnis, dan tidak ada satu kelompok pun yang mempunyai posisi politik atau ekonomi yang dominan.

B. Etnisitas

Erikson mengatakan bahwa kemunculan etnisitas adalah kelompok tersebut sedikitnya telah menjalin hubungan, kontak dengan kelompok etnis yang lain dan masing-masing menerima gagasan serta ide-ide perbedaan di antara mereka, baik secara kultural maupun politik. Etnisitas muncul dalam kerangka hubungan relasional, dalam interaksinya dengan dunia luar dan komunitas kelompoknya.

1. Perspektif Mengenai Etnisitas

Dalam antropologi ada tiga perspektif teori utama yang digunakan untuk membahas mengenai etnisitas, selain teori primordial, dua lainnya adalah teori situasional, dan teori relasional. Teori situasional berseberangan dengan teori primordial. Teori situasional memandang bahwa kelompok etnis adalah entitas yang dibangun atas dasar kesamaan para warganya.

bagi mereka yang lebih penting bukan wujud kesamaan itu sendiri melainkan perihal penentuan dan pemeliharaan batas-batas etnis yang diyakini bersifat selektif dan merupakan jawaban atas kondisi sosial historis tertentu (Barth dalam Simatupang, 2003). Teori ini menekankan bahwa kesamaan kultural merupakan faktor yang lebih besar dibanding kesamaan darah dalam penggolongan orang-orang ke dalam kelompok etnik.

Menurut perspektif teori situasional, etnik merupakan hasil dari adanya pengaruh yang berasal dari luar kelompok. Salah satu faktor luar yang sangat berpengaruh terhadap etnisitas adalah kolonialisme, yang demi kepentingan administratif pemerintah kolonial telah mengotak-ngotakkan warga jajahan ke dalam kelompok-kelompok etnik dan ras (Rex dalam Simatupang, 2003). Untuk seterusnya sisa warisan kolonial itu terus dipakai sampai sekarang. Contoh yang paling jelas adalah pembentukan identitas etnik Dayak. Istilah Dayak diberikan oleh kolonial Belanda untuk menyebut seluruh penduduk asli pulau Kalimantan. Padahal sesungguhnya etnik Dayak terdiri dari banyak subetnik (yang sebenarnya sebagai etnik sendiri yang sangat berbeda satu sama lain, seperti Benuaq dan Ngaju). Istilah Dayak sendiri tidak dipergunakan sebagai identitas mereka. Mereka menyebut diri sebagai orang Benuaq jika itu etnis Benuaq (Trisnadi, 1996). Teori relasional mendasarkan pada pandangan bahwa kelompok etnik merupakan penggabungan dua entitas atau lebih yang memiliki persamaan maupun perbedaan yang telah dibandingkan dalam menentukan pembentukan etnik dan pemeliharaan batas-batasnya. Kesamaan-kesamaan yang ada pada dua atau lebih entitas yang disatukan akan menjadi identitas etnik. Menurut perspektif relasional ini, etnik ada karena adanya hubungan antara entitas yang berbeda-beda; etnik Sasak tidak akan menjadi etnik Sasak bila tidak mengalami hubungan dengan entitas di luar kelompok itu. Etnik bergantung pada pengakuan entitas lain di luar kelompok.

2. Dampak Negatif dan Dampak Positif

Primordialisme dapat berdampak negatif dan berdampak positif. Dampak negatif primordialisme antara lain sebagai berikut:

1. Menghambat hubungan antarbangsa.
2. Menghambat proses asimilasi dan integrasi.
3. Mengurangi bahkan menghilangkan objektivitas ilmu pengetahuan.
4. Penyebab terjadinya diskriminasi (pembedaan secara sengaja terhadap golongan tertentu yang didasarkan pada ras, agama, mayoritas, dan minoritas masyarakat).

5. Merupakan kekuatan terpendam (potensi) terjadinya antarebudayaan suku-suku bangsa.

Sedangkan dampak positif dari primordialisme antara lain berikut:

1. Menumbuhkan cinta tanah air.
2. Mempertinggi kesetiaan terhadap bangsa.
3. Mempertinggi semangat patriotisme.
4. Menjaga keutuhan dan kestabilan budaya.

3. Dampak Negatif dan Dampak Positif Etnisitas

Etnisitas yang berdampak negatif, antara lain:

1. Mengurangi keobjektifan ilmu pengetahuan.
2. Menghambat pertukaran budaya.
3. Menghambat proses asimilasi kelompok yang berbeda.
4. Mengacu timbulnya konflik sosial.

Etnisitas dalam hal tertentu juga merupakan sesuatu yang tidak seperti anggapan umum yang mengatakan bahwa etnisitas merupakan sesuatu yang semata-mata buruk, etnisitas juga merupakan sesuatu yang fungsional karena mendorong kelompok dalam perjuangan mencari kekuasaan dan kekayaan. Pada saat konflik, etnisitas benar-benar bermanfaat. Dengan adanya etnisitas, kelompok yang terlibat konflik dengan kelompok lain akan saling dukung satu sama lain. Salah satu contoh fenomena ini adalah ketika terjadi pengusiran terhadap etnis Madurese di Kalimantan, banyak etnis Madura di lain tempat mengancam pengusiran itu dan membantu para pengungsi.



BAB V

MULTIKULTURAL DAN ETNOSENTRIS

A. Multikulturalisme

1. Pengertian Multikulturalisme

Secara etimologis, multikultural berasal dari kata multi, yang artinya banyak/beragam dan kultural, yang berarti budaya. Keragaman budaya, itulah arti dari multikultural. Keragaman budaya mengindikasikan bahwa

terdapat berbagai macam budaya yang memiliki ciri khas tersendiri, ya saling berbeda dan dapat dibedakan satu sama lain. Paham atau ideologi mengenai multikultural disebut dengan multikulturalisme. "Multikulturalism pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen, baik itu suku, ras, agama, pendidikan, ekonomi, politik bahasa dan lain-lain yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki satu pemerintahan tetapi dalam masyarakat itu masing-masing terdapat segmen-segmen yang tidak bisa disatukan.

Konsep multikulturalisme, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat.

Ada beberapa definisi mengenai masyarakat multikultural yang dikemukakan oleh para ahli yaitu sebagai berikut.

1. Fumvall

Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik.

2. Clifford Geertz

Masyarakat multikultural adalah merupakan masyarakat yang terbagi dalam sub-subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri dan masing-masing subsistem terkait oleh ikatan-ikatan primordial.

3. Nasikun

Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat bersifat majemuk, sejauh masyarakat tersebut secara struktur memiliki sub-subkebudayaan yang bersifat *diverse* yang ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan juga sistem nilai dari satu-kesatuan sosial, serta seringnya muncul konflik-konflik sosial.

2. Ciri-Ciri Masyarakat Multikulturalisme

Adapun ciri-ciri dari masyarakat multikulturalisme adalah sebagai berikut.

1. **Terjadi segmentasi**, yaitu masyarakat yang terbentuk oleh bermacam-macam suku, ras, agama, pendidikan, ekonomi, politik, bahasa, dan lain-lain, tapi masih memiliki pemisah. Yang biasanya pemisah itu adalah suatu konsep yang disebut primordial. Contohnya, di Jakarta terdiri dari berbagai suku dan ras, baik itu suku dan ras dari daerah dalam negeri maupun luar negeri, dalam kenyataannya mereka memiliki segmen berupa ikatan primordial keadaannya.
2. **Memiliki struktur dalam lembaga yang nonkomplementer**, maksudnya adalah dalam masyarakat majemuk suatu lembaga akan mengalami kesulitan dalam menjalankan atau mengatur masyarakatnya alias karena kurang lengkapnya persatuan yang terpisah oleh segmen-segmen tertentu.
3. **Konsensus rendah**, maksudnya adalah dalam kelembagaan pastinya perlu adanya suatu kebijakan dan keputusan. Keputusan berdasarkan kesepakatan bersama itulah yang dimaksud konsensus, berarti dalam suatu masyarakat majemuk sulit sekali dalam pengambilan keputusan.
4. **Relatif potensi ada konflik**, dalam suatu masyarakat majemuk pastinya terdiri dari berbagai macam suku adat dan kebiasaan masing-masing. Dalam teorinya semakin banyak perbedaan dalam suatu masyarakat, kemungkinan akan terjadinya konflik itu sangatlah tinggi dan proses pengintegrasian juga susah.
5. **Integrasi dapat tumbuh dengan paksaan**, seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa dalam masyarakat multikultural itu susah sekali terjadi pengintegrasian, maka jalan alternatifnya adalah dengan cara paksaan, walaupun dengan cara seperti ini integrasi itu tidak bertahan lama.
6. **Adanya dominasi politik terhadap kelompok lain**, karena dalam masyarakat multikultural terdapat segmen-segmen yang berakibat pada *ingroup feeling* (keikutsertaan dalam kelompok) tinggi maka bila suatu ras atau suku memiliki suatu kekuasaan atas masyarakat itu maka dia akan mengedepankan kepentingan suku atau rasnya.

3. Jenis Multikulturalisme

Berbagai macam pengertian dan kecenderungan perkembangan konsep serta praktik multikulturalisme yang diungkapkan oleh para ahli,

membuat seorang tokoh bernama Parekh (1997) membedakan 5 macam multikulturalisme (Azra, 2007, meringkas uraian Parekh):

Multikulturalisme isolasionis, mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain.

Multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak meruntang kultur dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara Eropa.

Multikulturalisme otonomis, masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok-pokok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar.

Multikulturalisme kritis atau interaktif, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus (*concern*) dengan kehidupan kultural otonom; tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka.

Multikulturalisme kosmopolitan, berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu dan, sebaliknya, secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

4. Faktor Penyebab Terjadinya Multikulturalisme

Adapun faktor penyebab dan terjadinya multikulturalisme adalah sebagai berikut.

1. Latar Belakang Historis

Dalam pelajaran sejarah, kita telah mengetahui bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sekarang ini berasal dari Yunan, yaitu suatu wilayah di

One bagian selatan yang pindah ke pulau-pulau di Nusantara. Perpindahan ini terjadi secara bertahap dalam waktu dan jalur yang berbeda. Ada kelompok mengambil jalur barat melalui selat Malaka menuju pulau Sumatera dan Jawa. Sedangkan kelompok lainnya mengambil jalan ke arah timur, yaitu melalui kepulauan Formosa atau Taiwan, di sebelah selatan Jepang, menuju Filipina dan kemudian meneruskan perjalanan ke Kalimantan. Dari Kalimantan ada yang pindah ke Jawa dan sebagian lagi ke pulau Sulawesi.

Perbedaan jalur perjalanan, proses adaptasi di beberapa tempat peringgahan yang berbeda, dan perbedaan pengalaman serta pengetahuan mual yang menyebabkan timbulnya perbedaan suku bangsa dengan budaya yang beraneka ragam di Indonesia.

2. Kondisi Geografis

Merupakan suatu kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri atas pulau-pulau yang satu sama lain dihubungkan oleh laut dangkal yang sangat potensial. Selain itu, bentuk pulau-pulau itu memperlihatkan relief yang beraneka ragam. Perbedaan-perbedaan lainnya menyangkut curah hujan, suhu dan kelembapan udara, jenis tanah, flora dan fauna yang berkembang di atasnya.

Perbedaan-perbedaan kondisi geografis ini telah melahirkan berbagai suku bangsa, terutama yang berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi mereka dan perwujudan kebudayaan yang dihasilkan untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut, misalnya nelayan, pertanian, kehutanan, perdagangan, dan lain-lain.

3. Keterbukaan terhadap Kebudayaan Luar

Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keanekaragaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing pertama yang mewarnai sejarah kebudayaan Indonesia adalah ketika orang-orang India, Cina, dan Arab mendarat di wilayah Indonesia, disusul oleh kedatangan bangsa Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang membawa kebudayaan yang beragam.

Daerah-daerah yang relatif terbuka, khususnya daerah pesisir, paling cepat mengalami perubahan. Dengan semakin baiknya sarana dan prasarana transportasi, hubungan antarkelompok masyarakat semakin intensif dan



semakin sering pula mereka melakukan pembauran. Sedangkan daerah yang terletak jauh dari pantai umumnya hanya terpengaruh sedikit, sehingga berkembang corak budaya yang khas pula.

5. Perkembangan Multikultural

1. Kelompok Sosial berdasarkan Ras

Pola pergaulan di Indonesia tidak mengenal adanya rasialisme atau superioritas satu ras di atas ras lainnya, walaupun terdapat beberapa kelompok ras yang jumlahnya lebih banyak daripada kelompok ras lainnya. Namun, hal ini tidak berarti ras tersebut ditempatkan secara istimewa atau dianggap lebih unggul yang akhirnya mengarah pada sikap rasialis yang bertentangan dengan konsepsi masyarakat majemuk.

2. Kelompok Sosial berdasarkan Bahasa

Setelah melalui proses panjang, akhirnya individu maupun kelompok yang memiliki perbedaan-perbedaan tadi ternyata mampu menghasilkan suatu persamaan yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai, yaitu bahasa Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena bahasa-bahasa suku yang mereka miliki berasal dari satu rumpun, yaitu keluarga bahasa Austronesia. Jadi, mereka dapat cukup mudah saling menerima dan mempelajari bahasa suku bangsa lainnya dan menerima serta mempelajari bahasa baru seperti bahasa Indonesia.

3. Kelompok Sosial berdasarkan Suku Bangsa

Di Indonesia terdapat sekitar 300 suku bangsa dan menggunakan kurang lebih 250 bahasa daerah. Masing-masing suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, yang tercermin pada pola dan gaya hidup mereka masing-masing. M.A Jaspri menyatakan bahwa masyarakat Indonesia terdiri atas 366 suku bangsa. Pernyataan ini menggunakan patokan atau kriteria yang didasarkan pada bahasa, daerah, kebudayaan dan susunan masyarakatnya.

4. Kelompok Sosial berdasarkan Perbedaan Agama

Masyarakat Indonesia terbagi menjadi beberapa kelompok sosial yang dikat oleh unsur-unsur religi. Sedikitnya terdapat 5 kelompok religi yang jumlah anggotanya cukup besar, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Buddha

dan Hindu. Yang paling besar adalah kelompok Muslim, mencapai 90% dari jumlah penduduk di Indonesia. Selain itu, masih terdapat kelompok masyarakat yang menganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, kebebasan beragama sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing dijamin oleh negara.

B. Etnosentrisme

1. Pengertian Etnosentrisme

Etnosentrisme adalah kecenderungan yang menganggap nilai-nilai dan norma-norma kebudayaannya sendiri sebagai suatu yang prima, yang terbaik, mutlak dan dipergunakannya sebagai tolok ukur untuk membedakannya dengan kebudayaan lain.

Sikap etnosentrisme adalah sikap yang menggunakan pandangan dan cara hidup dari sudut pandangnya sebagai tolok ukur untuk menilai kelompok lain. Apabila tidak dikelola dengan baik, perbedaan budaya dan adat istiadat antarkelompok masyarakat tersebut akan menimbulkan konflik sosial akibat adanya sikap etnosentrisme. Sikap tersebut timbul karena adanya anggapan suatu kelompok masyarakat bahwa mereka memiliki pandangan hidup dan sistem nilai yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Atau kecenderungan yang menganggap nilai-nilai dan norma-norma kebudayaannya sendiri sebagai suatu yang prima, yang terbaik, mutlak dan dipergunakannya sebagai tolok ukur untuk membedakannya dengan kebudayaan lain. Etnosentrisme tampaknya merupakan gejala sosial yang bersifat universal dan secara tidak sadar telah kita lakukan. Dengan demikian etnosentrisme merupakan kecenderungan tak sadar untuk menilai atau membandingkan budaya yang satu dan yang lainnya.

Etnosentrisme bisa dibilang merupakan bagian dari masalah-masalah sosial yang sebaiknya kita hindari karena dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa kita. Etnosentrisme terjadi jika masing-masing budaya bersikukuh dengan identitasnya, menolak bercampur dengan kebudayaan lain. Porter dan Samovar mendefinisikan etnosentrisme seraya menuturkan, "Sumber utama perbedaan budaya dalam sikap adalah etnosentrisme, yaitu kecenderungan memandang orang lain secara tidak sadar dengan menggunakan kelompok kita sendiri dan kebiasaan kita sendiri sebagai kriteria untuk penilaian. Makin besar kesamaan kita dengan mereka, makin dekat mereka dengan kita; makin besar ketidaksamaan, makin jauh mereka

dari kita. Kita cenderung melihat kelompok kita, negeri kita, budaya kita sendiri, sebagai yang paling baik, sebagai yang paling bermoral.”

Etnosentrisme membuat kebudayaan kita sebagai patokan untuk mengukur baik-buruknya kebudayaan lain dalam proporsi kemiripannya dengan budaya kita.

Tidak seperti anggapan umum yang mengatakan bahwa etnosentrisme merupakan sesuatu yang semata-mata buruk, etnosentrisme juga merupakan sesuatu yang fungsional karena mendorong kelompok dalam perjuangan mencari kekuasaan dan kekayaan.

Etnosentrisme memiliki dua tipe yang satu sama lain saling berlawanan yaitu sebagai berikut:

1. Tipe pertama adalah etnosentrisme fleksibel. Seseorang yang memiliki etnosentrisme ini dapat belajar cara-cara meletakkan etnosentrisme dan persepsi mereka secara tepat dan bereaksi terhadap suatu realitas didasarkan pada cara pandang budaya mereka serta menafsirkan perilaku orang lain berdasarkan latar belakang budayanya.
2. Tipe kedua adalah etnosentrisme infleksibel. Etnosentrisme ini dicirikan dengan ketidakmampuan untuk keluar dari perspektif yang dimiliki atau hanya bisa memahami sesuatu berdasarkan perspektif yang dimiliki dan tidak mampu memahami perilaku orang lain berdasarkan latar belakang budayanya.

Etnosentrisme jelas bukan sesuatu yang harus dihilangkan sama sekali, ia patut dipelihara karena etnosentrisme memang fungsional. Dalam hal ini etnosentrisme fleksibel yang harus dikembangkan. Dengan etnosentrisme fleksibel, kehidupan multikultur yang damai bisa berlangsung sementara masing-masing kultur tidak kehilangan identitasnya.

Mengingat pentingnya memiliki etnosentrisme yang fleksibel dalam masyarakat multikultur seperti Indonesia maka diperlukan upaya-upaya untuk memperkuatnya. Tiga cara yang bisa kita lakukan untuk memperkuat etnosentrisme fleksibel menurut Matsumoto (1996), adalah:

Mengetahui bagaimana cara kita memahami realitas sebagaimana yang biasa kita lakukan dalam cara tertentu. Misalnya saja kita mengerti bagaimana kita melakukan penilaian tentang ketidaksopanan. Sebab apa yang sopan menurut budaya kita mungkin saja bukan merupakan kesopanan dalam budaya yang lain.

Mengakui dan menghargai kenyataan bahwa orang-orang yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda memiliki perbedaan cara dalam memahami realitas, dan bahwa versi mereka tentang sebuah realitas adalah

dan benar bagi mereka sebagaimana versi kita sah dan benar untuk
Sebuah joke yang cukup populer untuk menggambarkan adanya
perbedaan cara pandang terhadap realitas adalah joke tentang seorang
Minang, etnis Madura, dan etnis Jawa. Ketiga orang berbeda etnis
mengikuti lomba lari maraton. Tebak siapa pemenangnya? Jawabnya
adalah orang Jawa. Alasannya di setiap persimpangan, orang Jawa
menikirkan angkernya tempat itu sehingga bergegas. Sementara itu orang
Madura akan berhenti melihat-lihat peluang cocok tidak tempat itu untuk
jualan sate. Dan orang Minang akan berhenti di setiap persimpangan
untuk melihat apakah tempat itu cocok atau tidak untuk membuka
toko makan.

Mengetahui mengenai budaya sendiri dan budaya orang lain serta
pengaruhnya terhadap cara-cara memahami realitas dalam keadaan
tertentu tidak cukup untuk menumbuhkan etnosentrisme fleksibel. Kita
juga harus belajar untuk membedakan antara emosi, penilaian terhadap
moralitas, dan penilaian terhadap kepribadian yang sering disamakan
dengan etnosentrisme dan cara pandang budaya.

2. Dampak dari Etnosentrisme

Etnosentrisme membawa dampak, baik dampak positif maupun
dampak negatif yaitu sebagai berikut.

1. Dampak positif

Etnosentrisme dapat menimbulkan solidaritas kelompok yang sangat
kuat. Buktinya adalah hampir setiap individu merasa bahwa kebudayaannya
adalah yang paling baik dibanding kebudayaan lain.

2. Dampak negatif

Bila suatu suku bangsa menganggap suku bangsa lain lebih rendah,
maka akan menimbulkan konflik yang bisa menjerumus ke dalam kasus
SARA. Selain itu dampak negatif yang lebih luas dari sikap etnosentrisme
adalah terhambatnya proses integrasi nasional.



BAB VI

PRIMORDIALISME DAN RASISME

1. Primordialisme

Primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan sekitarnya.

Secara etimologi, primordial atau primordialisme berasal dari kata bahasa latin, *primus* yang artinya pertama dan *ordini* yang artinya tenunan atau

ikatan. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Primordialisme adalah perasaan kesukuan yang berlebihan.

Ikatan seseorang pada kelompok yang pertama dengan segala nilai yang diperolehnya melalui sosialisasi akan berperan dalam membentuk sikap primordial. Di satu sisi, sikap primordial memiliki fungsi untuk melestarikan budaya kelompoknya. Namun, di sisi lain sikap ini dapat membuat individu atau kelompok memiliki sikap etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang cenderung bersifat subjektif dalam memandang budaya orang lain. Mereka akan selalu memandang budaya orang lain dari kacamata budayanya. Hal ini terjadi karena nilai-nilai yang telah tersosialisasi sejak kecil sudah menjadi nilai yang mendarah daging (*internalized value*) dan sangatlah susah untuk berubah dan cenderung dipertahankan bila nilai itu sangat menguntungkan bagi dirinya.

Terdapat 2 jenis etnosentris yaitu: 1. etnosentris infleksibel yakni suatu sikap yang cenderung bersifat subjektif dalam memandang budaya atau tingkah laku orang lain, 2. Etnosentris fleksibel yakni suatu sikap yang cenderung menilai tingkah laku orang lain tidak hanya berdasarkan sudut pandang budaya sendiri, tetapi juga sudut pandang budaya lain. Tidak selamanya primordial merupakan tindakan salah. Akan tetapi bisa saja dinilai sebagai sesuatu yang mesti dipertahankan. Sudut pandang ajaran (ritual) misalnya. Perilaku primordialisme merupakan unsur terpenting saat memberlakukan ajaran intinya.

Primordialisme berasal dari bahasa Latin, *primus* yang artinya pertama. *Primordial* artinya ikatan-ikatan dalam masyarakat yang bersifat asli keaslian (seperti kesukuan, kekerabatan, keagamaan, dan kelompok) yang dibawa sejak lahir.

Sebab terjadinya primordial:

- adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam satu kelompok atau perkumpulan sosial,
- adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok terhadap ancaman dari luar,
- adanya nilai-nilai yang dijunjung tinggi yang berkaitan dengan keyakinan dan pandangan hidup.

Adapun akibat negatif primordialisme, di antaranya:

- mengganggu kelangsungan hidup suatu bangsa,
- menghambat modernisasi, proses pembangunan,
- merusak integrasi internasional.

B. Rasisme

Rasisme memiliki dimensi yang luas dan tidak sekadar sesuatu yang berhubungan dengan aspek SARA. Seperti diungkap oleh Fairchild (1991) bahwa: *A recurrent feature of the social sciences has been efforts to prove that there are inherited racial and gender differences these efforts, though earlier debunked, become reincarnated under different guises.*

Rasisme telah bermetamorfosa dalam berbagai bentuk berbeda saat ini. Tidak hanya sebagai sentimen rasial antarsuku bangsa, rasisme bahkan terjadi dalam lingkup internal suatu ras, suatu golongan, bahkan suatu komunitas bisnis. *Today, the word racism is used more broadly to apply to racially unfair and discriminatory beliefs, actions, desires, projects, persons, groups, social institutions, and practices* (Garcia, 1991).

Rasisme sendiri secara umum adalah pendirian yang memperlakukan orang lain secara berbeda dengan memberikan *judgment* nilai berdasarkan karakteristik ras, sosial, dan kondisi mental tertentu yang merujuk pada *self-*

Ethnicity and racism (1990), Paul Spoonley merumuskan rasisme ke dalam wilayah yang lebih sempit dengan memproblematisir konsep ras. Ia meyakini bahwa ras merupakan konsepsi kolonialisme yang tumbuh bersamaan dengan semangat ekspansi wilayah bangsa Eropa. Spoonley menacak kemunculan rasisme secara historis ketika bangsa Eropa berhadapan dengan keragaman manusia yang mereka temui di tanah jajahan.

Keragaman itu lebih cenderung dimaknai sebagai keberbedaan. Sejarah, demikian Spoonley, menunjukkan bahwa rasisme pada akhirnya muncul akibat kemajasan bangsa Eropa untuk mengenal orang lain yang berbeda darinya. Kemajasan ini terwujud dalam upaya bangsa Eropa, yang berkulit putih, mengklasifikasi keragaman manusia yang ditemuinya berdasarkan karakteristik fisik. Di Indonesia barangkali pemisahan konseptual antara pribumi dan priyayi dapat dianggap berangkat dari kolonialisme dan berujung pada rasisme.

Istilah rasisme sendiri pertama kali digunakan sekitar tahun 1930-an, ketika istilah tersebut diperlukan untuk menggambarkan teori-teori rasis yang dipakai orang-orang Nazi (Fredricksen, 2005). Kendati demikian, bukan berarti jauh-jauh hari sebelum itu bentuk rasisme tidak ada. Dalam bukunya, *Racism: A Short History*, Fredricksen (2005) menulis: orang-orang Afrika di-Sahara diklaim terlahir sebagai budak karena kutukan (biblikal) dari nabi yang telah diperbuat Ham. Akibat dari dosa Ham itu, orang-orang Afrika diklaim telah ditakdirkan sebagai ras budak. Klaim itu anehnya terus dikukuhkan kebenarannya dan kemudian menjadi justifikasi rasisme.

Rasisme bahkan sengaja diciptakan oleh tokoh-tokoh dunia masa lalu melalui berbagai tulisan untuk mencapai posisi legitimasi akan suatu golongan tertentu. Knox (1850) menempatkan Slavonian dan Gothic di posisi ras teratas sementara Saxon, Celt, dan Italian ada di bawahnya. Di Asia dan kemudian di Afrika, kekuasaan Eropa secara brutal diterapkan pada masyarakat setempat, dan ekonomi mereka dieksploitasi untuk keuntungan modal Barat.

Untuk membenarkan perkembangan ini, maka para penguasa Eropa berargumentasi bahwa orang yang berkulit berwarna berkedudukan rendah. Para intelektual, jurnalis dan para pendeta mencoba menggagas untuk menggolkan teori ini menjadi hal yang bersifat umum dan bisa diterima oleh masyarakat luas. Gobineau (1973), seorang bangsawan Prancis dalam esainya, *On The Inequality of Human Races* adalah orang pertama yang mencetuskan superioritas ras Arya atas bangsa Negro dan Semit dengan mengatakan bahwa masyarakat Arya yang hebat dan brilian dapat dipertahankan sejauh mereka tetap mempertahankan darah keturunannya hanya dari spesies mereka. Sementara Bagehot (1873), seorang tokoh politik berpengaruh berpendapat bahwa negara yang terkuat adalah yang mampu mengalahkan negara lain dan yang terkuat adalah yang terbaik. Pernyataan ini mendukung argumentasi Social Darwinism tentang seleksi alam, yaitu mereka yang selamat harus menjadi yang terkuat, dan untuk tahu siapa yang terkuat adalah dengan menjadi yang selamat.

Social Darwinism kemudian menjadi sebuah pembenaran atas ekspansi bangsa Eropa ke Afrika India dan Timur Jauh. Hal ini dipertegas oleh ahli antropologi India, Vidyarthi (1983) yang menyatakan: *His (Darwin's) theory of the survival of the fittest was warmly welcomed by the social scientists of the day, and they believed mankind had achieved various levels of evolution culminating in the white man's civilization. By the second half of the nineteenth century racism was accepted as fact by the vast majority of Western scientists. (Lalita Prasad Vidyarthi, Racism, Science and Pseudo-Science, Unesco, France, Vendme, 1983).*

Namun begitu, rasisme awal justru berasal dari kaum Kristen terhadap kaum Yahudi. Kaum Yahudi ditengarai menolak Yesus Kristus sebagai Sang Mesias, dengan menerima Kitab Perjanjian Baru yang dianggap lebih terlegitimasi dan mempunyai substansi penting dibandingkan Kitab Perjanjian Lama. Hal itu dinilai sebagai sebuah pengingkaran atas penyaliban dan wafatnya Yesus sebagai tumbal atas dosa seluruh manusia. Atas hal itulah, maka umat Yahudi dianggap sebagai kriminal, termasuk sampai kepada keturunannya sekalipun. Segera setelah itu, pada akhir abad

bertengahan, terjadi penaklukan besar-besaran pasukan umat Kristen atas benua-benua yang sebelumnya tidak pernah mereka singgahi. Di sinilah mulai terjadi pergeseran nilai-nilai kesamaan bagi semua umat manusia tersebut. Hal ini yang disebut oleh seorang sejarawan bernama Robert Bartlett sebagai penjelas atas dominasi umat Kristen (yang semuanya saat itu masih berkulit putih) terhadap penduduk asli dari daerah yang mereka taklukan, termasuk Asia dan Afrika.

Masih menurut Fredericson (2005), hingga di titik inilah maka rasisme bukan merupakan sesuatu yang hanya dibebankan kepada umat Kristiani saja, melainkan menjadi sesuatu yang meluas pada konotasi supremasi kulit putih terhadap kulit hitam. Imperialisme Eropa dan perdagangan budak turut memperkuat perubahan makna ini. Budak-budak pertama di benua-benua "dunia baru" adalah para narapidana dan orang-orang Indian Karibia, namun mereka semua mati secara berangsur-angsur dan akhirnya diganti oleh orang Afrika yang lebih kuat.

Di banyak negara dunia ketiga saat ini, seperti Malaysia, Indonesia atau Filipina, ketegangan rasial antara kelompok-kelompok kulit berwarna sering kali timbul. Ini merupakan hasil dari politik penjajah Eropa, *divide et impera*.

Akhirnya perdagangan budak dihentikan karena secara ekonomi dianggap tidak menguntungkan, dan kolonialisme pun mengalami kemunduran. Namun sistem 40 kapitalis menemukan cara-cara baru untuk membuat rasisme menguntungkan. Orang-orang berkulit berwarna bisa digunakan sebagai tenaga kasar, sedangkan prasangka-prasangka buruk tentang orang-orang berkulit berwarna, yang dimiliki oleh pekerja yang berkulit putih diertahankan. Tujuannya adalah agar kelas buruh bisa terus dipecah-pecah. Selama bertahun-tahun taktik seperti ini digunakan oleh para majikan di Eropa, Amerika dan juga Australia. Dengan demikian rasisme terus meluas dari makna awalnya atau dengan kata lain rasisme terus-menerus berubah bergantung pada dinamika kehidupan dan interaksi sosial yang ada. Hal ini dikarenakan rasisme telah menginvasi ranah lain dalam aktivitas hidup manusia. Rasisme kini telah berada dalam ranah psikologi, sastra, politik, dan bahasa.

C. Hubungan Primordialisme dan Rasisme

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, primordialisme adalah rasa kesukuan yang sangat kuat dan rasisme adalah pendirian yang

memperlakukan orang lain secara berbeda dengan memberikan penilaian yang tak lebih baik dari dirinya atau kelompoknya.

Dari pengertian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa primordialisme dan rasisme saling memengaruhi satu sama lain. Karena rasa kesukuan yang tinggi seseorang atau suatu kelompok dapat memperlakukan orang atau kelompok lain sesuai dirinya dan menganggap orang atau kelompok lain lebih rendah dari dirinya atau kelompoknya. Hal merendahkan tersebut akhirnya berujung pada sikap rasis atau rasisme, yaitu mengotak-ngotakkan struktur masyarakat berdasarkan suku, ras, agama, dan perbedaan lainnya.

Rasa kesukuan dan rasa agung yang tinggi terhadap dirinya, kelompoknya, budayanya, dan masyarakatnya tentu akan berdampak buruk jika terus dibiarkan. Untuk itu perlu adanya pemecahan atau setidaknya meminimalisir dampak yang timbul akibat primordialisme dan rasisme. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari primordialisme dan rasisme, di antaranya:

1. menumbuhkan rasa kebhinekaan
2. memupuk rasa satu kesatuan
3. menanamkan nilai budaya bahwa setiap budaya memiliki kelebihan dan kekurangan
4. menciptakan kecintaan terhadap keragaman budaya karena Indonesia merupakan negara yang kaya. Kaya dalam sumber daya alam, kaya dalam keragaman masyarakat, juga kaya dalam kebudayaan dan tradisi.



BAB VII

PRASANGKA SOSIAL DAN DISKRIMINASI

Prasangka Sosial

Menurut Worchel (2000), pengertian prasangka dibatasi sebagai sikap negatif yang tidak dapat dibenarkan terhadap suatu kelompok dan anggotanya. Prasangka atau prasangka sosial merupakan perilaku yang mengarahkan kelompok pada individualis berdasarkan pada prasangka atau kesalahan informasi tentang kelompok. Prasangka juga didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat emosional, yang akan sekali menjadi motivator munculnya ledakan sosial.

Menurut Mar'at (1981), prasangka sosial adalah dugaan-dugaan yang memiliki nilai positif atau negatif, tetapi biasanya lebih bersifat negatif. Sedangkan menurut Brehm dan Kassir (1993), prasangka sosial adalah perasaan negatif terhadap seseorang semata-mata berdasar pada keanggotaan mereka dalam kelompok tertentu.

Menurut David O. Sears (1991), prasangka sosial adalah penilaian terhadap kelompok atau seorang individu yang terutama didasarkan pada keanggotaan kelompok tersebut, artinya prasangka sosial ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang berbeda dengannya atau kelompoknya. Prasangka sosial memiliki kualitas suka dan tidak suka pada objek yang diprasangkainya, dan kondisi ini akan memengaruhi tindakan atau perilaku seseorang yang berprasangka tersebut.

Prasangka sosial menurut Papalia dan Sally (1985) adalah sikap negatif yang ditujukan kepada orang lain yang berbeda dengan kelompoknya tanpa adanya alasan yang mendasar pada pribadi orang tersebut. Lebih lanjut diuraikan bahwa prasangka sosial berasal dari adanya persaingan yang secara berlebihan antarindividu atau kelompok. Selain itu proses belajar juga berperan dalam pembentukan prasangka sosial dan kesemuanya ini akan terintegrasi dalam kepribadian seseorang.

Allport (1984) menguraikan bahwa prasangka sosial merupakan suatu sikap yang membenci kelompok lain tanpa adanya alasan yang objektif untuk membenci kelompok tersebut.

Jadi, dalam hal ini prasangka melibatkan penilaian apriori karena memperlakukan objek sasaran prasangka (target prasangka) tidak berdasarkan karakteristik unik atau khusus dari individu, tetapi melekatkan karakteristik kelompoknya yang menonjol.

1. Ciri-Ciri Prasangka Sosial

Ciri-ciri prasangka sosial menurut Brigham (1991) dapat dilihat dari kecenderungan individu untuk membuat kategori sosial (*social categorization*). Kategori sosial adalah kecenderungan untuk membagi dunia sosial menjadi dua kelompok, yaitu "kelompok kita" (*in group*) dan "kelompok mereka" (*out group*). *In group* adalah kelompok sosial di mana individu merasa dirinya dimiliki atau memiliki ("kelompok kami"). Sedangkan *out group* adalah grup di luar grup sendiri ("kelompok mereka").

Timbulnya prasangka sosial dapat dilihat dari perasaan *in group* dan *out group* yang menguat. Ciri-ciri dari prasangka sosial berdasarkan penguatan perasaan *in group* dan *out group* adalah:

- 1. Proses generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok lain. Menurut Ancok dan Suroso (1995), jika ada salah seorang individu kelompok luar berbuat negatif, maka akan digeneralisasikan pada semua anggota kelompok luar.
- 2. Kompetisi sosial. Kompetisi sosial merupakan suatu cara yang digunakan oleh anggota kelompok untuk meningkatkan harga dirinya dengan membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain.
- 3. Penilaian ekstrem terhadap anggota kelompok lain. Individu melakukan penilaian terhadap anggota kelompok lain baik penilaian positif ataupun negatif secara berlebihan. Biasanya, penilaian yang diberikan berupa penilaian negatif.
- 4. Pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu. Pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu biasanya dikaitkan dengan stereotipe. Stereotipe adalah keyakinan (belief) yang menghubungkan kelompok individu dengan ciri-ciri sifat tertentu atau anggapan tentang orang-orang yang dimiliki oleh anggota kelompok luar.
- 5. Perasaan frustrasi (scope going). Menurut Bingham (1991), perasaan frustrasi (scope going) adalah rasa frustrasi seseorang sehingga membutuhkan pelampiasan sebagai objek ketidaktampunya menghadapi kegagalan.
- 6. Agresi antarkelompok. Agresi biasanya timbul akibat cara berpikir yang rasialis, sehingga menyebabkan seseorang cenderung berperilaku agresif.
- 7. Dogmatisme. Dogmatisme adalah sekumpulan kepercayaan yang dianut seseorang berkaitan dengan masalah tertentu, salah satunya adalah mengenai kelompok lain. Bentuk dogmatisme dapat berupa etnosentrisme dan favoritisme.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Prasangka Sosial

Proses pembentukan prasangka sosial menurut Mar'at (1981) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Proses generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok lain.
Menurut Ancok dan Suroso (1995), jika ada salah seorang individu dari kelompok luar berbuat negatif, maka akan digeneralisasikan pada semua anggota kelompok luar.
- b. Kompetisi sosial
Kompetisi sosial merupakan suatu cara yang digunakan oleh anggota kelompok untuk meningkatkan harga dirinya dengan membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain.
- c. Penilaian ekstrem terhadap anggota kelompok lain
Individu melakukan penilaian terhadap anggota kelompok lain baik penilaian positif ataupun negatif secara berlebihan. Biasanya, penilaian yang diberikan berupa penilaian negatif.
- d. Pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu
Pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu biasanya dikaitkan dengan stereotipe. Stereotipe adalah keyakinan (*belief*) yang menghubungkan sekelompok individu dengan ciri-ciri sifat tertentu atau anggapan tentang ciri-ciri yang dimiliki oleh anggota kelompok luar.
- e. Perasaan frustrasi (*scope gooting*)
Menurut Brigham (1991), perasaan frustrasi (*scope gooting*) adalah rasa frustrasi seseorang sehingga membutuhkan pelampiasan sebagai objek atas ketidakmampuannya menghadapi kegagalan.
- f. Agresi antarkelompok
Agresi biasanya timbul akibat cara berpikir yang rasialis, sehingga menyebabkan seseorang cenderung berperilaku agresif.
- g. Dogmatisme
Dogmatisme adalah sekumpulan kepercayaan yang dianut seseorang berkaitan dengan masalah tertentu, salah satunya adalah mengenai kelompok lain. Bentuk dogmatisme dapat berupa etnosentrisme dan favoritisme.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Prasangka Sosial

Proses pembentukan prasangka sosial menurut Mar'at (1981) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

Dari uraian singkat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa prasangka sosial terjadi disebabkan adanya perasaan berbeda dengan orang lain atau kelompok lain. Selain itu prasangka sosial disebabkan oleh adanya proses belajar, juga timbul disebabkan oleh adanya perasaan membenci antarindividu atau kelompok masalahnya antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas.

Hubungan sosial merupakan suatu media dalam mengatur atau membentuk prasangka sosial (Soari, 1985).

7. Pengaruh Hubungan Sosial

Komunikasi juga memiliki peranan penting dalam memberikan informasi yang baik dan komponen sikap akan banyak dipengaruhi oleh media massa seperti radio, televisi, video, yang kesemuanya hal ini akan mempengaruhi pembentukan prasangka sosial dalam diri seseorang.

6. Pengaruh Komunikasi

Politik dan ekonomi sering mendominasi pembentukan prasangka sosial. Pengaruh politik dan ekonomi telah banyak memicu terjadinya prasangka sosial terhadap kelompok lain misalnya kelompok minoritas.

5. Pengaruh Politik dan Ekonomi

Kelompok memiliki norma dan nilai tersendiri dan akan mempengaruhi pembentukan prasangka sosial pada kelompok tersebut. Oleh karenanya norma kelompok yang memiliki fungsi otonom dan akan banyak memberikan informasi secara realistis atau secara emosional yang mempengaruhi sistem sikap individu.

4. Pengaruh Kelompok

Dalam hal ini orang tua memiliki nilai-nilai tradisional yang dapat dikatakan berperan sebagai family ideology yang akan mempengaruhi prasangka sosial.

3. Pengaruh Pendidikan Anak oleh Orangtua

Semakin tinggi pendidikan seseorang dan semakin tinggi status yang dimilikinya akan mempengaruhi cara berpikirnya dan akan mereduksi prasangka sosial.

2. Pendidikan dan Status

Dalam perkembangan kepribadian seseorang akan terlihat pula pembentukan prasangka sosial.

1. Pengaruh Kepribadian

Komunikasi merupakan salah satu alat yang penting dalam belajar sosial. Banyak pengetahuan mengenai kelompok lain diperoleh melalui berita-berita yang ditayangkan baik melalui televisi, radio, maupun video. Bahkan opini yang terbentuk mengenai kelompok lain bergantung pada pemberitaan media. Misalnya bila kelompok tertentu dalam berita disajikan sebagai ekstremis, suka kekerasan, dan teroris maka prasangka terhadap kelompok itu di masyarakat akan menguat.

Dampak Prasangka Sosial

Stephan (1978) menguraikan bahwa prasangka sosial tidak saja memengaruhi perilaku orang dewasa, tetapi juga anak-anak sehingga dapat membatasi kesempatan mereka berkembang menjadi orang yang memiliki toleransi terhadap kelompok sasaran misalnya kelompok minoritas.

Rosenbreg dan Simmons, (1971) juga menguraikan bahwa prasangka sosial akan menjadikan kelompok individu tertentu dengan kelompok individu lain berbeda kedudukannya dan menjadikan mereka tidak mau bergabung atau bersosialisasi. Apabila hal ini terjadi dalam organisasi atau perusahaan akan merusak kerja sama. Selanjutnya diuraikan bahwa prasangka sosial dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama karena prasangka sosial merupakan pengalaman yang kurang menyenangkan bagi kelompok yang diprasangka tersebut.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian tentang dampak prasangka sosial di atas adalah bahwa dengan adanya prasangka sosial akan memengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang dalam berbagai situasi. Prasangka sosial dapat menjadikan seseorang atau kelompok tertentu tidak mau bergabung atau bersosialisasi dengan kelompok lain. Apabila kondisi tersebut terdapat dalam organisasi akan mengganggu kerja sama yang baik sehingga upaya pencapaian tujuan organisasi kurang dapat direalisasikan dengan baik.

Diskriminasi

Pengertian diskriminasi dalam ruang lingkup hukum hak asasi manusia Indonesia (*human rights law*) dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan

Yang langsung atau tak langsung didasarkan pada perbedaan masyarakat, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakar pada penggunaan, pemanfaatan, atau penghayatan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Diskriminasi merujuk pada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang dialami dalam masyarakat manusia, ini disebabkan kecenderungan manusia untuk membedakan-bedakan yang lain. Atau ketika seseorang dipisahkan secara tidak adil karena karakteristik suku, antargolongan, kelamin, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi.

Diskriminasi langsung • Terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan-jelas menyebabkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin dan sebagainya, dan menghambat adanya diskriminasi. Diskriminasi langsung • Terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminasi saat diterapkan di lapangan.

Menurut Theodorson & Theodorson, (1979): Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perseorangan, atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-kualitatif, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau kebangsaan, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau kebangsaan-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk menjelaskan suatu bentuk ketidakeadilan yang dominan dalam hubungannya dengan masyarakat yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu tidak bermoral dan tidak demokratis.

Dalam arti tersebut, diskriminasi adalah bersifat aktif atau pasif yang dapat terlihat (*overt*) dan dirasakan yang bersifat negatif (*intrinsic*) terhadap seorang individu atau suatu kelompok. Dalam arti (PBB) yang berwujud demikian: "Diskriminasi mencakup perilaku atau tindakan yang dibuat berdasarkan sifat atau hubungan yang ada atau pengabaian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya (*inert*)."

Perlu kiranya dicatat di sini, bahwa dalam arti tertentu diskriminasi mengandung arti perlakuan tidak seimbang terhadap sekelompok

pada baklatnya adalah sama dengan kelompok pelaku diskriminasi. Diskriminasi tersebut sebenarnya memiliki beberapa kapasitas dan yang sama, adalah bersifat universal. Apakah diskriminasi dianggap bergantung pada nilai-nilai yang dianut masyarakat bersangkutan, kepangkatan dalam masyarakat dan pelapisan masyarakat yang landaskan pada prinsip diskriminasi. Demikianlah para tamtama/serut (*private*) di dalam jajaran ketentaraan secara sah (*legitimated*) diskriminasi (diperlakukan tak seimbang), berdasarkan kedudukannya yang masih rendah, walaupun ia telah memiliki kemampuan sama, atau bahkan melebihi para perwira atasan mereka.

Namun beberapa komunitas khayalan (*utopian communities*) telah mencoba untuk menghapuskan perbedaan-perbedaan semacam itu, dalam kedudukan kepangkatan, seringkali berdasarkan keyakinan bahwa semua yang beragama adalah sama di mata Tuhan; dan di Amerika Serikat penyebaran nilai-nilai politik dan agama telah membawa perubahan-perubahan dalam struktur masyarakat, telah menyebabkan terjadinya perlawanan terhadap segala macam diskriminasi yang bersifat agama, ras, bahkan kelas-kelas masyarakat. Kriteria masyarakat, untuk apa yang dianggap perlakuan diskriminasi terhadap seorang maupun kelompok, selalu bergeser, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya.

Menurut Theodorson & Theodorson (1979:), kelompok minoritas (*minority groups*) adalah kelompok-kelompok yang diakui berdasarkan perbedaan ras, agama, atau suku bangsa, yang mengalami kerugian sebagai akibat prasangka (*prejudice*) atau diskriminasi. Istilah ini pada umumnya dipergunakan bukanlah sebuah istilah teknis, dan malahan, ia sering dipergunakan untuk menunjukkan pada kategori perseorangan, daripada kelompok-kelompok. Dan seringkali juga kepada kelompok mayoritas daripada kelompok minoritas. Sebagai contoh, meskipun kaum wanita bukan tergolong suatu kelompok (lebih tepat kategori masyarakat), ataupun suatu minoritas, yang oleh beberapa penulis sering digolongkan sebagai kelompok minoritas, karena biasanya dalam masyarakat, yang berorientasi pada pria/*male chauvinism*, sejak zaman Nabi Adam telah didiskriminasi sebaliknya, sekelompok orang, yang termasuk telah memperoleh hak-hak istimewa (*privileged*) atau tidak didiskriminasi, tetapi tergolong minoritas secara kuantitatif, tidak dapat digolongkan ke dalam kelompok minoritas. Oleh karenanya istilah minoritas tidak termasuk semua kelompok, yang berjumlah kecil, namun dominan dalam politik.

- Ada beberapa definisi, perasaan, tindakan di antara pihak yang terlibat untuk mendapatkan atau mencapai tujuan/sasaran
- Ada beberapa definisi, tindakan di antara pihak yang terlibat sumber konflik
- Ada tujuan yang dijadikan sasaran konflik. Tujuan itulah yang menjadi motivasi
- Ada dua pihak atau lebih yang terlibat, jadi ada interaksi di antara beberapa unsur, yaitu:
 - Dari beberapa pengertian tersebut, maka dalam setiap konflik terdapat suatu bentuk pertentangan yang melibatkan dua pihak secara antagonistis, dengan menyandingkan atau memisahkan para pesang.
 - Proses mendapatkan monopoli bangunan, kekuasaan, kepemilikan juga difungsional karena menghilangkan tampilan kelompok
 - Bentuk pertentangan bersifat fungsional, karena pertentangan mendukung tujuan kelompok dan memperbesar tampilan, namun lain, perasaan dan faktanya terganggu
 - Pihak lain, dengan melakukan kekerasan fisik yang membuat orang
 - Suatu proses yang terjadi ketika satu pihak secara nyata mengganggu nilai, motivasi peka atau yang terlibat di dalamnya
 - Pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan atau sejalan
 - tertentu namun dilaut pemilikan, perasaan atau peraturan yang kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran
 - Hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih (individu atau kepercayaan, nilai, dan kebutuhan
 - kelompok, karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap
 - Bentuk pertentangan adalah yang diabaikan oleh individu atau

Menurut Alo Liwen (2001) bahwa yang disebut konflik adalah:

Konflik Antar-Etnik

Dampak prasangka sosial terhadap diskriminasi salah satunya adalah

1. Dampak Prasangka terhadap Diskriminasi Sosial

- Perbedaan latar belakang
- Perbedaan keyakinan, kepercayaan dan agama
- Perkembangan sosokultural dan situasional
- Perbedaan kepribadian
- Perbedaan individu

Ada situasi konflik antara dua pihak yang bertentangan. Ini meliputi situasi antarpribadi, antarkelompok, dan antarorganisasi (Barge, 1994, dalam Liliweri, 2005, 250).

Secara umum konflik disebabkan atau bersumber dari:

Konflik yang bersumber dari nilai, yakni perbedaan rasa percaya, keyakinan, dan ideologi.

Konflik yang bersumber karena kurang komunikasi.

Konflik yang bersumber dari pengambilan keputusan yang tidak adil.

Konflik yang bersumber karena ketidakcocokan peran dalam organisasi.

Konflik yang bersumber dari perbedaan keuntungan.

Konflik yang bersumber dari perubahan keseimbangan, baik karena alam atau mutasi/rotasi dan promosi dalam berorganisasi.

Konflik yang belum terpecahkan, sehingga seperti api dalam sekam, yang setiap waktu dapat membara.

Usaha-usaha Mengurangi/menghilangkan Prasangka dan Diskriminasi

Perbaikan Kondisi Sosial Ekonomi

Pemerataan dan usaha peningkatan pendapatan bagi warga negara Indonesia masih tergolong di bawah garis kemiskinan akan mengurangi daya kesenjangan-kesenjangan sosial antar si kaya dan si miskin. Melalui program-program pembangunan yang mantap yang didukung oleh lembaga-lembaga ekonomi pedesaan seperti BUUD dan KUD. Juga melalui program KCK (kredit candak kulak), KMKP (kredit modal kerja permanen), dan dalam sektor pertanian dengan intensifikasi khusus (Insus), proyek perkebunan inti rakyat (PIR), juga proyek tebu rakyat diharapkan golongan ekonomi lemah lambat laun akan dapat menikmati usaha-usaha pemerintah dalam perbaikan sektor perekonomian. Dengan begitu prasangka-prasangka ketidakadilan dalam sektor perekonomian antara kelompok kuat dan kelompok ekonomi lemah sedikit banyak dapat dikurangi dan akhirnya akan sama.

Perluasan Kesempatan Belajar

Jika dapat mencapai prestasi tinggi dan dapat mempertahankan secara konsisten, beasiswa yang aneka ragam itu dapat diraih dan kantong pun tidak akan kering kerontang.

Dengan memberi kesempatan luas untuk mencapai tingkat pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali, prasangka dan perasaan tidak adil pada sektor pendidikan cepat atau lambat akan hilang lenyap.

3. Sebab-Sebab Timbulnya Prasangka dan Diskriminasi

- **Konflik langsung antarkelompok.** Berdasarkan Teori Konflik Realistik (*Realistic Conflict Theory*) di mana prasangka muncul karena kompetisi antarkelompok sosial untuk memperoleh kesempatan atau komoditas yang berharga yang berkombang menjadi rasa kebencian, prasangka dan dasar emosi. Contoh: konflik antara para migran dan masyarakat setempat, masyarakat setempat cenderung memiliki prasangka terhadap para migran ini karena para migran lebih mampu untuk survive dan berhasil di wilayah barunya sehingga menimbulkan rasa kebencian pada diri masyarakat setempat terhadap para migran. Hal ini dapat dilihat pada konflik yang terjadi di Ambon atau Kalimantan.
- **Pengalaman awal.** Berdasarkan Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*), prasangka dipelajari dan dikembangkan dengan cara yang sama serta melalui mekanisme dasar yang sama, seperti sikap yang lain yakni melalui pengalaman langsung dan observasi/*vicarious*. Contoh: Santi sejak kecil sering mendengar orangtuanya melontarkan komentar-komentar negatif terhadap orang dari golongan etnis Tionghoa, maka Santi juga akan ikut meyakini pandangan negatif orangtuanya tentang etnis Tionghoa tersebut. Selain itu, media massa juga memiliki peran dalam pembentukan prasangka.
- **Kategorisasi Sosial**, yakni kecenderungan untuk membuat kategori sosial yang membedakan antara *in-group*—"kita"—dan *out-group*—"mereka". Kecenderungan untuk memberi atribusi yang lebih baik dan menyanjung anggota kelompoknya sendiri daripada anggota kelompok lain terkadang dideskripsikan sebagai kesalahan atribusi utama (*ultimate attribution error*), yang sama seperti *self serving bias* hanya saja terjadi dalam konteks antarkelompok. Kategori sosial ini menjadi prasangka, dapat dijawab berdasarkan Teori Identitas Sosial (*Identity Theory*) dari Tajfel. Teori ini mengatakan bahwa individu berusaha meningkatkan *self-esteem* mereka dengan mengidentifikasi diri dengan kelompok sosial tertentu. Namun, hal ini terjadi hanya bila orang tersebut mempersepsikan kelompoknya lebih superior daripada kelompok lain yang menjadi pesaingnya.

Stereotype—kerangka berpikir kognitif yang terdiri dari pengetahuan dan keyakinan tentang kelompok sosial tertentu dan *traits* tertentu yang mungkin dimiliki oleh orang yang menjadi anggota kelompok-kelompok ini. Ketika sebuah stereotype diaktifkan, *trait-trait* inilah yang dipikirkan. Stereotype memengaruhi pemrosesan informasi sosial (diproses lebih cepat dan lebih mudah diingat), sehingga mengakibatkan terjadinya seleksi pada informasi-informasi yang konsisten terhadap stereotype akan diproses sementara yang tidak sesuai stereotype akan ditolak atau diubah agar konsisten dengan stereotype. Reaksi lain terhadap informasi yang tidak konsisten adalah membuat kesimpulan implisit yang mengubah arti informasi tersebut agar sesuai dengan stereotype. Stereotype seperti penjara kesimpulan (*inferential prisons*): ketika stereotype telah terbentuk, stereotype akan membangun perspsi kita terhadap orang lain, sehingga informasi baru tentang orang ini akan diinterpretasikan sebagai penguatan terhadap stereotype kita, bahkan ketika hal ini tidak terjadi.

- **Mekanisme kognitif lain:** a) **ilusi tentang hubungan** (*illusory correlation*) yaitu kecenderungan melebih-lebihkan penilaian tingkah laku negatif dalam kelompok yang relatif kecil. Efek ini terjadi karena peristiwa yang jarang terjadi menjadikannya lebih menonjol dan dengan mudah diingat; b) **ilusi homogenitas Out-Group** (*illusion of out-group homogeneity*) yaitu kecenderungan untuk mempersepsikan orang-orang dari kelompok lain yang bukan kelompoknya sebagai orang yang serupa. Lawan dari kecenderungan tersebut adalah **perbedaan in-group** (*in-group differentiation*) yaitu kecenderungan untuk mempersepsikan anggota kelompoknya dalam menunjukkan keragaman yang lebih besar satu sama lain (lebih heterogen) daripada kelompok-kelompok lain.

- **Stereotype**—kerangka berpikir kognitif yang terdiri dari pengetahuan dan keyakinan tentang kelompok sosial tertentu dan *traits* tertentu yang mungkin dimiliki oleh orang yang menjadi anggota kelompok-kelompok ini. Ketika sebuah stereotype diaktifkan, *trait-trait* inilah yang dipikirkan. Stereotype memengaruhi pemrosesan informasi sosial (diproses lebih cepat dan lebih mudah diingat), sehingga mengakibatkan terjadinya seleksi pada informasi-informasi yang konsisten terhadap stereotype akan diproses sementara yang tidak sesuai stereotype akan ditolak atau diubah agar konsisten dengan stereotype. Reaksi lain terhadap informasi yang tidak konsisten adalah membuat kesimpulan implisit yang mengubah arti informasi tersebut agar sesuai dengan stereotype. Stereotype seperti penjata kesimpulan (*inferential prisons*): ketika stereotype telah terbentuk, stereotype akan membangun persepsi kita terhadap orang lain, sehingga informasi baru tentang orang ini akan diinterpretasikan sebagai penguatan terhadap stereotype kita, bahkan ketika hal ini tidak terjadi.
- **Mekanisme kognitif lain:** a) **ilusi tentang hubungan** (*illusory correlation*) yaitu kecenderungan melebih-lebihkan penilaian tingkah laku negatif dalam kelompok yang relatif kecil. Efek ini terjadi karena peristiwa yang jarang terjadi menjadikannya lebih menonjol dan dengan mudah diingat; b) **ilusi homogenitas Out-Group** (*illusion of out-group homogeneity*) yaitu kecenderungan untuk mempersepsikan orang-orang dari kelompok lain yang bukan kelompoknya sebagai orang yang serupa. Lawan dari kecenderungan tersebut adalah **perbedaan in-group** (*in-group differentiation*) yaitu kecenderungan untuk mempersepsikan anggota kelompoknya dalam menunjukkan keragaman yang lebih besar satu sama lain (lebih heterogen) daripada kelompok-kelompok lain.



BAB VIII

KONFLIK DAN KESERASIAN SOSIAL

Konflik Sosial

Definisi Konflik

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan dalam jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, ras, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Karena masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari.

dan akan selalu terjadi. Istilah konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin *confingere* yang berarti saling memukul. Dari bahasa Latin diadopsi ke dalam bahasa Inggris, *conflict* yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia.

Menurut Joel A. Digirolamo (2010) konflik sebuah proses yang dimulai ketika individu atau kelompok merasakan perbedaan dan pertentangan antara dirinya dan individu atau kelompok lain tentang kepentingan dan sumber daya, keyakinan, nilai, atau praktik-praktik yang penting bagi mereka. Sedangkan menurut Jose L. Hocker & William W. Wilmot (1990) dalam Wirawan (2010) konflik adalah perjuangan yang diungkapkan antara setidaknya dua pihak saling bergantung yang dirasakan tidak sesuai tujuan, manfaat jangka, dan gangguan dari pihak lain untuk mencapai tujuan mereka.

J. Forst & W. Wilmot (1978) dalam Wirawan (2010) mengatakan konflik adalah interaksi interdependen dari orang yang merasa tujuan dan gangguan tidak kompatibel satu sama lain dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Stephen P. Robbins (1990) dalam Wirawan (2010) mengatakan *"We define conflict as a process in which an effort is purposely made by A to offset the efforts of B by some form of blocking that will result in frustrating B" in attaining his goals or furthering his interest.*"

Buku *"Konflik dan Manajemen Konflik"* Wirawani (2010) mengatakan bahwa konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling bergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik.

2. Teori-Teori Penyebab Konflik

- a. Teori hubungan masyarakat, teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:
 - 1) Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik.
 - 2) Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.
- b. Teori negosiasi prinsip, teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

- 1) Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap.
 - 2) Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.
- c. Teori kebutuhan manusia, teori ini berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia-fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi, keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:
- 1) Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu.
 - 2) Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.
- d. Teori identitas, teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:
- 1) Melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka.
 - 2) Meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.
- e. Teori kesalahpahaman antarbudaya, teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:
- 1) Menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain.
 - 2) Mengurangi stereotipe negatif yang mereka miliki tentang pihak lain.
 - 3) Meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya.

4. Teori transformasi konflik, teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:
- 1) Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi.
 - 2) Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik.
 - 3) Mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, pengakuan.

3. Faktor-Faktor Penyebab Konflik

Konflik seringkali merupakan salah satu strategi para pemimpin untuk melakukan perubahan. Jika tidak dilakukan secara damai, perubahan diupayakan dengan menciptakan konflik. Pemimpin menggunakan faktor-faktor yang dapat menimbulkan konflik untuk menggerakkan perubahan. Akan tetapi, konflik dapat terjadi secara alami karena adanya kondisi objektif yang dapat menimbulkan konflik. Berikut ini adalah kondisi objektif yang bisa menimbulkan konflik.

a. Keterbatasan sumber

Manusia selalu mengalami keterbatasan sumber-sumber yang diperlukannya untuk mendukung kehidupannya. Keterbatasan itu menimbulkan terjadinya kompetisi di antara manusia untuk mendapatkan sumber yang diperlukannya dan hal ini seringkali menimbulkan konflik. Dalam suatu organisasi, sumber-sumber yang dimaksud bisa berupa anggaran, fasilitas kerja, jabatan, dan kesempatan untuk berkarier.

b. Tujuan yang berbeda

Hocker dan Wilmot (1978) dalam Wirawan (2010) mengatakan "konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang berbeda." Konflik bisa terjadi karena tujuan pihak yang terlibat konflik sama, tetapi cara untuk mencapainya berbeda hal ini banyak terjadi dalam dunia politik dan bisnis.

c. Saling bergantung atau interdependensi tugas

Konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik memiliki tugas yang bergantung satu sama lain. Jika saling kebergantungan tinggi, maka

tinggi resolusi konflik akan tinggi. Jika saling kebergantungan rendah, maka
rendah resolusi konflik akan rendah. Jika tidak ada saling kebergantungan,
tidak konflik tidak akan terjadi. Jadi, konflik terjadi di antara pihak yang
saling membutuhkan saling berhubungan dan tidak bisa meninggalkan
satu sama lain tanpa konsekuensi negatif.

d. Komunikasi yang tidak baik

Komunikasi yang tidak baik seringkali menimbulkan konflik dalam organisasi. Faktor komunikasi yang menyebabkan konflik misalnya distorsi informasi yang tidak tersedia dengan bebas, dan penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Demikian juga, perilaku komunikasi yang berbeda seringkali menyinggung orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja.

e. Beragam karakteristik sistem sosial

Konflik dalam masyarakat sering terjadi karena anggotanya mempunyai karakteristik yang beragam: suku, agama, dan ideologi. Karakteristik ini sering diikuti dengan pola hidup yang eksklusif satu sama lain yang sering menimbulkan konflik.

f. Kepribadian individu

Orang yang memiliki sifat kepribadian yang mudah menimbulkan konflik, seperti selalu curiga dan berpikiran negatif kepada orang lain, egoistis, sombong, merasa selalu paling benar, kurang dapat mengendalikan emosinya, dan ingin meriang sendiri. Sifat-sifat seperti ini mudah untuk menyulut konflik jika berinteraksi dengan orang lain.

g. Kebutuhan

Orang yang memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain atau mempunyai kebutuhan yang sama mengenai sesuatu yang terbatas jumlahnya. Kebutuhan merupakan pendorong terjadinya perilaku manusia. Jika kebutuhan orang diabaikan atau terhambat, maka bisa memicu terjadinya konflik.

4. Jenis-Jenis Konflik

Konflik banyak jenisnya dan dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria. Sebagai contoh, konflik dapat dikelompokkan berdasarkan latar

terjadinya konflik, pihak yang terkait dalam konflik, dan substansi konflik. Adapun jenis-jenisnya sebagai berikut:

Konflik personal dan konflik interpersonal

Konflik dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah orang yang terlibat konflik yaitu:

a. Konflik personal

Konflik personal adalah konflik yang terjadi dalam diri seorang individu karena harus memilih dari sejumlah alternatif pilihan yang ada atau karena mempunyai kepribadian ganda. Konflik ini terdiri dari:

- Konflik pendekatan ke pendekatan (*approach to approach conflict*)
Konflik yang terjadi karena harus memilih dua alternatif pilihan yang berbeda, tetapi sama-sama menarik atau sama baik kualitasnya. Sebagai contoh, seorang lulusan SMA yang akan melanjutkan sekolah harus memilih dua universitas negeri yang sama kualitasnya.
- Konflik menghindar ke menghindar (*avoidance to avoidance conflict*)
Konflik yang terjadi karena harus memilih alternatif yang sama-sama harus dihindari. Sebagai contoh, seseorang harus memilih apakah harus menjual mobil untuk melanjutkan sekolah atau tidak menjual mobil, tetapi tidak bisa melanjutkan sekolah.
- Konflik pendekatan ke menghindar (*approach to avoidance conflict*)
Konflik yang terjadi karena seseorang mempunyai perasaan positif atau negatif terhadap sesuatu yang sama. Sebagai contoh, Ami mengambil telepon untuk menyatakan cintanya kepada Aminah. Aka tetapi, ia takut cintanya ditolak. Oleh karena itu, ia tutup kembali teleponnya.

b. Konflik interpersonal

Konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi di dalam suatu organisasi atau konflik di tempat kerja. Konflik yang terjadi di antara mereka yang bekerja untuk suatu organisasi profit atau nonprofit. Konflik interpersonal adalah konflik pada suatu organisasi di antara pihak-pihak yang terlibat konflik dan saling bergantung dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

- Konflik interes

Konflik interes adalah jenis konflik yang mempunyai ciri konflik individual dan konflik interpersonal, konflik ini berkaitan dengan konflik dalam diri seorang individu dalam suatu latar sistem sosial

(organisasi atau perusahaan) yang membawa implikasi bagi individu dan sistem sosialnya. Konflik interes adalah suatu situasi konflik di mana seorang individu-pejabat atau aktor sistem sosial mempunyai interes personal lebih besar daripada interes organisasinya sehingga memengaruhinya pelaksanaan kewajibannya sebagai sistem sosial dalam melaksanakan kepentingan (tujuan) sistem sosial.

Konflik realistik dan konflik nonrealistik

Lewis Coser seperti dikutip oleh Joseph P. Folger dan Marshal S. Poole (1984) dalam Wirawan (2010) mengelompokkan konflik menjadi konflik realistik dan konflik nonrealistik.

Keserasian Sosial

Keserasian sosial merupakan keadaan dan proses kehidupan bernama nusia yang mencerminkan adanya sikap dan perilaku harmonis yang meliputi rukun, tepo seliro, akrab, saling menghormati, kesatuan dan keseimbangan, tanggung jawab, saling kebergantungan fungsional, tidak jadi dominasi eksploitasi, pertukaran yang saling menguntungkan, saling pengertian, dan adanya kesamaan pandangan.

Keserasian sosial merupakan proses hubungan sosial, bersifat mutualitas dan berkelanjutan yang dilakukan antara korban bencana sosial dan warga setempat untuk mewujudkan kehidupan berdampingan secara adil, setara, harmonis, dan seimbang. Hakikat keserasian sosial ialah memulihkan, memantapkan, memperkuat serta memelihara kembali hidupan bersama (*livehood*) antara korban bencana sosial dan komunitas lokasi domisili (tempat tinggal), persaudaraan sejati (*brotherhood*), kebersamaan (*togetherness*), sentimen sosial (rasa senasib), dan soliditas (shesivitas, kesetiakawanan sosial dan solidaritas sosial).

Hubungan sosial ini dilandasi oleh saling percaya dan kesepakatan insama untuk hidup berdampingan secara damai, menjamin terhindarnya masalah baru antara korban bencana sosial dan komunitas, terselesaikan sebagai masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama dan menantapkan sistem kerukunan dan perdamaian sosial yang abadi di lingkungan masyarakat. Tujuan keserasian sosial yang sangat mendasar ialah mewujudkan integrasi sosial dan penerimaan sosial (*social acceptance*) dalam tatanan hidup berdampingan secara damai melalui sistem dan mekanisme kerukunan sosial antara korban bencana sosial dan komunitas setempat.

Fungsinya adalah membaurkan kembali korban bencana sosial dalam sistem kehidupan bersama, mempercepat pencapaian tujuan bersama yaitu hidup dalam sistem kerukunan dan berdampingan secara damai, mempercepat proses adaptasi dan akseptasi sosial serta memelihara dan memantapkan keharmonisan sosial yang bertumpu pada semangat nondiskriminasi, kesamaan hak dan kewajiban, kesepakatan bersama, nonprasangka dan berkelanjutan.

Sejumlah nilai dasar yang menjadi pijakan dalam menyelenggarakan keserasian sosial berdasarkan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI (2006) yaitu:

- a) Keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan artinya bahwa kegiatan keserasian sosial dilakukan untuk mewujudkan sebuah kehidupan bersama yang selaras, seimbang dan harmonis sehingga terwujud masyarakat tanpa konflik.
- b) Mutuafitas, artinya bahwa keserasian sosial akan terpelihara bilamana kegiatan yang diusulkan merupakan suatu kesepakatan bersama, tidak merugikan salah satu pihak dan saling menguntungkan.
- c) Kesetaraan, artinya bahwa setiap kegiatan keserasian sosial didasarkan pada nondiskriminasi, tidak berprasangka dan menghindarkan diri untuk memberikan labeling kepada kelompok lain. Setiap pihak yang terlibat memiliki kedudukan yang sama pada setiap proses.
- d) Kesepakatan bersama, artinya bahwa setiap kegiatan keserasian sosial dilandasi oleh konsensus atau kesepakatan bersama.
- f) Inisiatif bersama, artinya bahwa keserasian sosial yang dikembangkan di lingkungan komunitas didasarkan pada prakarsa dari bawah dengan inisiatif bersama.
- g) Keberlanjutan, artinya bahwa kegiatan keserasian sosial dilakukan secara berkelanjutan dengan menjadi sumber-sumber pembiayaan dari keswadayaan masyarakat.

Definisi keserasian sosial di atas tersebut mengacu pada beberapa definisi dan indikator keserasian sosial yang dikemukakan oleh beberapa sumber sebagai berikut. Menurut Lembaga Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (1988):

keserasian sosial sebagai kondisi kehidupan manusia di dalam kehidupannya berkelompok dan bermasyarakat yang terbentuk oleh unsur keakraban, tanggung jawab, kesatuan dan keseimbangan, sehingga memungkinkan berlangsungnya kehidupan dan perkembangan warga di dalam kelompok dan masyarakatnya.

Definisi keserasian sosial menurut Biro Pusat Statistik (1986) yaitu sebagai berikut:

keserasian sosial merupakan kondisi kehidupan manusia yang dinamis di berbagai bidang yang mencakup bidang-bidang sosial budaya, ekonomi, politik, dan teknologi, di dalam kehidupan antarindividu dan antarkelompok di dalam masyarakat yang ditandai antara lain oleh adanya kerja sama, akomodasi, akulturasi dan atau asimilasi.

Adapun indikator keserasian sosial berdasarkan definisi menurut Biro Pusat Statistik (1986) meliputi sistem sosial budaya, sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem teknologi yang ditunjang oleh adanya pertentangan atau konflik, kerja sama, persaingan, dan akomodasi. Wirutomo (1992), mengemukakan bahwa keserasian sosial menunjuk pada kualitas tertentu dari keteraturan sosial, yaitu keteraturan sosial yang menghasilkan perkembangan sosial (*socialsustainability*) bagi seluruh sistem maupun unsur-unsurnya.

Keteraturan sosial tidak selalu berhasil mencapai suatu kualitas keserasian yang tinggi karena keteraturan sosial sering hanya didefinisikan sebagai keadaan yang tanpa konflik. Padahal keadaan yang tanpa konflik itu justru merupakan kondisi yang seringkali terdapat suatu ketimpangan sosial yang meluas dan mendatar. Keserasian dalam sebuah masyarakat majemuk yang heterogen di perkotaan yang anggota-anggotanya hidup secara lebih mandiri dan dalam corak-corak hubungan yang bersifat *gesellschaft*, sudah dengan sendirinya harus dilihat dalam konotasi yang berbeda dengan keserasian dalam masyarakat paguyuban yang homogen di pedesaan.

Masyarakat paguyuban (*gemeinschaft*) di pedesaan yang hubungan-hubungan sosialnya lebih bersifat primer dan saling kenal-mengenal, keserasian diciptakan justru dengan setiap orang berupaya untuk mematuhi norma-norma tingkah laku seketat mungkin dan seseragam mungkin. Sebagai mekanisme kontrol yang ditekankan adalah "rasa malu" untuk berbuat salah dan berbeda dengan yang lainnya.

Keserasian sosial bersifat dinamis, artinya bahwa dalam kehidupan sosial yang sangat serasi pun di dalamnya masih mengandung konflik meskipun bersifat tersembunyi (laten). Sebaliknya kehidupan masyarakat yang tidak serasi sekalipun sejauh masih eksis, juga mengandung unsur-unsur keserasian. Pengertian dinamis berarti kemampuan dalam kehidupan bersama untuk mengelola hubungan positif agar tidak terjadi konflik terbuka, dan mengelola konflik dengan baik agar dapat meningkatkan hubungan positif.



BAB IX

PEKERJAAN SOSIAL DENGAN KELOMPOK MINORITAS

A. Minoritas

Kelompok Minoritas adalah kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dengan mayoritas penduduk. Kelompok minoritas ialah kelompok sosial yang tak menyusun mayoritas populasi total dari voting dominan secara politis dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Minoritas sebagai 'kelompok' yang dilihat dari jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan

jumlah penduduk lainnya dari negara bersangkutan dalam posisi yang tidak dominan. Keanggotaannya memiliki karakteristik etnis, agama, maupun bahasa yang berbeda dengan populasi lainnya dan menunjukkan setidaknya secara implisit sikap solidaritas yang ditujukan pada melestarikan budaya, tradisi, agama, dan bahasa. Sehubungan dengan hal tersebut beberapa wilayah di Indonesia akhir-akhir ini sering muncul kerusuhan sosial yang dilatarbelakangi etnis dan agama.

Hal ini merupakan masalah yang sangat serius apabila tidak segera diselesaikan akan dapat mengancam terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi berbagai daerah di Indonesia adalah masih banyak terjadi diskriminasi terhadap hak-hak kelompok minoritas, baik agama, suku, ras dan yang berkenaan dengan jabatan dan pekerjaan bagi penyandang cacat, sehingga sampai saat ini dirasakan masih 'belum terpenuhinya hak-hak kelompok minoritas'. Permasalahan yang dihadapi di berbagai daerah Indonesia adalah masih banyak diskriminasi terhadap kelompok minoritas baik etnis maupun agama, padahal mereka sebagai masyarakat atau suku bangsa harus diberlakukan sama dengan kelompok mayoritas lainnya. Dalam rangka pemajuan dan perlindungan kaum minoritas antara lain adanya larangan diskriminasi karena diskriminasi berdampak negatif pada kaum minoritas secara politik, sosial, budaya dan ekonomi serta merupakan sumber utama terjadinya ketegangan. Diskriminasi berarti menunjukkan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pengistimewaan apa pun berdasarkan alasan seperti ras, warna kulit, bahasa, agama atau asal-usul kebangsaan atau sosial, status kelahiran atau status lainnya, yang mempunyai tujuan atau pengaruh untuk meniadakan atau merusak pengakuan, penikmatan, pemenuhan semua hak dan kebebasan dari semua orang yang setara.

Rambu-rambu perlindungan yang penting yang akan menguntungkan kaum minoritas mencakup pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum, persamaan di hadapan badan-badan pengadilan, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hukum yang sama disamping hak penting seperti kebebasan beragama, menyatakan pendapat dan berserikat. Dalam hubungan ini telah banyak diberlakukan berbagai peraturan perundangan sebagai instrumen hukum dan HAM nasional di samping instrumen HAM Internasional seperti:

- (a) Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras 1965 (Pasal 1),

"Human beings are classified in various categories which can be placed into hierarchical order, some being superior to others. Each person can be classified in several ways, but the most important criteria are those that determine his status in the community. Social stratification refers to ranking categories of people. In any social system of social stratification, the people in each stratum tend to interact more with those identified as belonging to the same stratum, and to develop certain characteristic of lifestyle, models of speech, knowledge, clothing and manners which are distinctive from those in other strata."

(1970: 29) mengatakan sebagai berikut:
 dengan struktur hierarki yang ada di masyarakat. Shibutan dan Kwan ada di bawahnya. Keberadaan hubungan dominan tidak lepas dikaitkan dengan hubungan dominan kelas atas terhadap kelas sub-ordinate yang yang baru. Kajian ini banyak menyugut dengan kajian yang berhubungan konteks kehidupan etnik minoritas sesungguhnya bukanlah suatu studi Studi yang membahas hubungan antara mayoritas dan minoritas dalam

1. Masalah Keetnikan dan Kelas Sosial

Semua kelompok yang ada di masyarakat baik berdasarkan asas keterbukaan dan toleransi terhadap tata nilai antara kelompok minoritas dan kelompok lainnya untuk dilakukn dengan perlu untuk menjadi perhatian bersama. Hal ini mencakup pola interaksi terhadap kelompok minoritas, namun dalam implementasi masih diralat instrumen internasional maupun nasional yang berkaitan dengan HAM Secara normatif bentuk perlindungan hukum telah diatur melalui

bidang ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam penyempangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan HAM dan sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa yang berkaitan pengurangan, manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status pengujian yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan Manusia No. 39 tahun 1999, diskriminasi adalah pembatasan, pelecchan atau

- (b) Deklarasi UNESCO tentang Ras dan Prangka Ras 1978 (Pasal 1, 2 dan 3)
- (c) Deklarasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan 1981 (Pasal 2)

class is a class system as a social ranking based primarily on economic position in which achieved characteristics can influence mobility. Namun karakter ekonomi bukanlah satu-satunya faktor penentu utama dalam pembentukan kelas sosial. Berbeda dengan Weber, *social class* bagi Weber adalah ketika orang mempunyai kesamaan dalam *wealth* dan *income*.

Meskipun Weber setuju bahwa faktor ekonomi adalah penentu utama dalam faktor penentu apa itu kelas sosial, ia berpendapat bahwa manifestasi kelas sosial tidaklah selalu berujung pada tindakan individu yang selalu dalam konteks ekonomi. Weber lebih menekankan bahwa status seseorang tidak saja dipengaruhi faktor ekonomi, seperti yang dikemukakan oleh Marx, tetapi juga *power* yang dimilikinya berdasarkan kombinasi dengan status yang dimilikinya secara sosial dan dicapainya secara politik (*prestise & karisma*).

Ralf Dahrendorf (1959) berkaitan dengan kehidupan masyarakat industri, mempunyai definisi kelas sosial yang kemudian memadukan antara pemikiran Marx dan Weber, yaitu *social class are groups of people who share common interest resulting from authority relationship*. Dalam pemikiran Dahrendorf ini kemudian ia mendefinisikan bahwa kelompok kelas sosial adalah berdasarkan otoritas yang dimilikinya, *distribution of power*. Ia mengambil pemikiran Weber yang menggunakan *power* sebagai dasar stratifikasi sosial. Untuk itu, ia tidak memasukkan hanya kelas borjuis, tetapi juga para manajer, legislator, birokrasi, atau aparat pemerintah sebagai bagian dari kelas dominan.

Hubungan sosial, hubungan kesukuan faktanya tidaklah dapat dilepaskan secara sepihak. Marx sesungguhnya melihat bahwa semua hubungan dasarnya adalah hubungan ekonomi. Tulisan ini sesungguhnya ingin melihat hubungan kesukubangsaan dan kelas sosial itu. Hubungan koetnikon pada dasarnya juga hubungan kelas sosial yang dasarnya ekonomi juga.

2. Kapitalisme dan Keetnisan

Pengaruh kapitalisme memang memengaruhi sistem stratifikasi sosial masyarakat dunia di mana masyarakat dibagi atas peran dan statusnya dalam sistem produksi (*mode of production*), sehingga kemudian memunculkan kelas penguasa dan kelas pekerja. Kelas penguasa atau pemilik modal akan selalu melakukan kapitalisasi modal untuk menambah keuntungannya

dengan cara menekan kelas pekerja. Kapitalisme kemudian melahirkan sistem kolonial yang mengharuskan negara-negara barat untuk melakukan penjajahan ke negara-negara lain di dunia. Dengan model sistem kolonial seperti ini maka kemudian membawa konsekuensi terhadap hubungan etnik yang sudah terjalin di dunia menjadi hubungan yang sifatnya hubungan sosio-ekonomi.

Dengan model seperti ini maka dipercaya bahwa hubungan etnik bukanlah semata hubungan etnik, tetapi lebih pada hubungan sosial ekonomi dan politik yang termanifestasikan dalam instruksi politik informal (Cohen, 1983). Hubungan yang tidak seimbang antaretnik ini juga mendapatkan sorotan Horowitz (1985). Horowitz menjelaskan bentuk interaksi sosial antaretnik dalam 2 bentuk, yaitu sistem interaksi kelompok suku bangsa yang bersistem bertingkat (*ranked groups*) dan yang tidak bersistem bertingkat (*unranked groups*) (Horowitz, 1985). Di dalam struktur interaksi yang mapan dan stabil seperti diungkapkan di atas maka yang terjadi adalah pembentukan struktur interaksi yang bersifat hierarkis, atau antara superordinat dan subordinat. Superordinat menguasai subordinat, sistem ini diperlakukan secara asriptif dan didefinisikan sebagai suatu masyarakat yang tunggal oleh superordinat.

Konteks kolonial, kelompok etnik akan menggambarakan kelas sosial tertentu. Hal ini berdasarkan peran dan statusnya dalam *mode of production*. Stratifikasi sosial kemudian juga mencerminkan stratifikasi rasial atau etnik karena berkaitan dengan distribusi kekuasaan. Rodolfo Stavenhagen (1975) menunjukkan beberapa kasus etnik stratifikasi yang terjadi di masyarakat Amerika Latin, terutama di Chiapas, Meksiko dan Guatemala. Ia menunjukkan bahwa stratifikasi *socio-economic* berkoneksi dengan stratifikasi etnik yang ada di daerah itu, yaitu *ladino* sebagai kelas pemilik tanah dan *indiano* sebagai kelas pekerja. Background kolonial ini tidak serta-merta hilang ketika masa kolonial berakhir. Etnik stratifikasi tetap terjadi berdasarkan status sosio-ekonomi yang dimilikinya karena telah melekat dalam hubungan sosial etnik yang ada di masyarakat itu. Berkembang kemudian stereotipe atau stigma yang tetap mengatakan bahwa orang *indiano* tetap sebagai pekerja kelas bawah.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wolf (1982) dalam konteks masyarakat industri. Stigmatisasi terhadap etnik dalam masyarakat industri menurut Wolf juga terjadi dalam masyarakat industri sebagai salah satu cara bagi kelas atas atau dominan group untuk melakukan pelemahan secara politik dan budaya terhadap kelas pekerja yang notabene adalah berbeda etnik. Dengan melakukan stigmatisasi, maka kelas atas dapat

Memang konteks masyarakat plural yang diungkapkan oleh Furnival (1948) adalah pada konteks masyarakat kolonial, namun konteks hubungan antar-etnik yang tidak seimbang karena berdasarkan pertama dalam sistem politik ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial. Kondisi kolonial ini membodahkan wana yang kuat terhadap pembentukan identitas etnis yang ada di dunia, terutama di negara-negara Asia dan Amerika Latin. Cynthia Enloe (1986) dalam beberapa kasus di Malaysia dan Northern Ireland menunjukkan kuat indikasi itu. Etnik kemudian diasosiasikan dengan *occupation* tertentu yang ada dalam masyarakat. Hussein Ali (1984) sangat kuat menunjukkan hal itu dalam konteks masyarakat Malaysia di mana ia menunjukkan identitas etnik di Malaysia identik dengan kelas sosial berdasarkan *occupation*-nya yang ada di masyarakat. Jika dahulu pemerintah kolonial yang memberikan tingkat kebijakan etniknya maka sekarang peran negaralah yang menjadi sentral. Situasi ini kemudian menjadi jurang perpecahan atau potensi etnik konflik semakin tinggi karena *ethnic relations* akan berdasarkan *ethnic stratification* yang

berasal tetapi berdasarkan paksaan.

Karena proses integrasi yang dilakukan bukan dilakukan secara *involuntary* kesempatan praktik dominasi oleh etnik dominan kepada etnik minoritas plural. Ia mengatakakan bahwa model masyarakat plural memberikan kupor. (1971) juga memberikan pandangan yang sama tentang masyarakat hubungan kelompok etnik dominan dan minoritas. M.C. Smith (in Leo pemerintah kolonial kemudian memunculkan stratifikasi etnik menjadi Pola integrasi etnik yang dikembangkan yang bersifat paksaan oleh etnik yang ada adalah hubungan etnik yang bersifat *ethnic stratification*. dengan model masyarakat plural (*plural society*) maka pola hubungan berkonflik dengan sosial stratifikasi. Furnival (1948) menegaskan bahwa konteks masyarakat plural, seperti Indonesia, hubungan etnik selalu

3. Hubungan Etnik = Hubungan Saling Menguasai

Wolf is structural and class relation.

suat ini. So it can be said that ethnic relation in this term according etnik tersebut sangat memengaruhi hubungan etnik yang terjadi pada ada di masyarakat. Proses sejarah pembentukan hubungan antaridentitas sangat melekat dengan kelas sosial berdasarkan status dan perannya yang dari situasi ini. Sehingga tidak mengherankan jika kemudian identitas etnik

berbasis pada *occupation*. Dan ini kemudian menyebabkan *stereotype and prejudice* antaretnik (Tan Chee-Beng, 1982).

Erikson (1983), berkaitan antara etnisitas dan nasionalisme menunjukkan bahwa pengaruh kolonialisme ini sangat memengaruhi pembentukan identitas etnik pada masa post-kolonialisme. Ia menunjukkan korelasi yang kuat sistem politik dan kelas sosial mempunyai kontribusi dalam pembentukan etnik. Meskipun sistem hubungan antaretnik sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan kelas sosial, tetapi kemudian yang terjadi identitas etnik diasosiasikan dengan kelas sosial tertentu karena peran dan statusnya dalam sistem sosial masyarakat. Erikson (1993) mengatakan kemudian, *"Theories of social class always refer to systems of social ranking and distribution of power. Ethnicity, on the contrary, does not necessarily refer to rank; ethnic relations may well be egalitarian in this regard. Still, many poly-ethnic societies are ranked according to ethnic membership. The criteria for such ranking are nevertheless different from class ranking: they refer to imputed cultural differences or races, not to property or achieved statuses."*

Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah pola hubungan mayoritas-minoritas yang tidak seimbang adalah hubungan antara etnik dominan dan etnik minoritas. Keberadaan kelompok etnik tersebut kemudian dilihat apa kontribusi yang diberikannya dalam konteks ekonomi, sehingga yang terjadi adalah sistem eksploitasi terhadap kelompok etnik yang tidak punya kekuasaan terhadap sistem ekonomi (Wolf, 1982). Kelompok etnik yang paling dirugikan dalam konteks hubungan seperti ini adalah kelompok yang dianggap paling kelas bawah, yaitu kelompok *hunter-gatherer*. Keberadaan kelompok ini sejak lama dianggap sebagai ujung tombak mata rantai ekonomi kapitalisme dunia sejak sebelum masa kolonial (Bird-David, 1995).

Kelompok *hunter-gatherer* ini kemudian dieksploitasi oleh kelas atas yang notabene adalah etnik dominan. Lambat-laun identitas etnik menjadi identitas kelas sosial di antara kedua etnik tersebut yang mengacu pada hubungan ekonomi. Status identitas etnik menjadi status ekonomi, antara kelompok dominan yang menguasai modal dan kelompok etnik minoritas yang dikuasai. Dan peran ini lambat-laun menjadi status yang sifatnya *ascriptive* dan menciptakan hubungan yang saling bergantung antara satu dengan yang lain. Nurit H. Bird-David (1995), menunjukkan kasusnya pada masyarakat di India tentang Naikens dan non-Naikens. Etnik Naiken mempunyai status sosial pengumpul *natural resource* untuk kemudian dijual kepada masyarakat Non-Naikens (etnik Tamil Nadu). Hubungan

ekonomi yang diciptakan kemudian memunculkan hubungan yang saling mengikat antara kedua etnik meskipun sangat tidak menguntungkan bagi etnik Naiken.

Harald Eidheim (1969) memberikan contoh hubungan terikat kedua etnik kemudian menjadi hubungan ekonomi, yaitu bagaimana hubungan antara etnik Lapp dan orang Norwegia tersebut diatur oleh suatu tatanan struktur, di mana belum tentu menjadi kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang terjadi kemudian menurut Eidheim adalah secara lambat laun status etnik pada kelas di bawahnya menjadi cacat etnik yang permanen (*social stigma*). Dalam kaitan ini maka bisa dibilang bahwa identitas etnik telah menjadi stigma sosial. Dalam kasus tertentu bahkan stigma sosial yang dilekatkan oleh kelompok dominan ini kemudian berkembang menjadi konstruksi identitas etnik yang melekat pada etnik tersebut. Seperti yang terjadi pada kasus konstruksi identitas Orang Asli oleh Orang Melayu, (Robert K. Dentan, 1997), atau di Philipine, etnik Batek (James Spader, 1993).

Kirk Endicott (1997) dalam konteks masyarakat Malaysia, antara etnik Melayu dan etnik Batek, juga menunjukkan kasus yang sama. Etnik Batek dipandang sebagai bagian dari tata stuktur ekonomi dari masyarakat Melayu yang paling bawah. Beberapa tulisan etnografi tentang kelompok suku yang bertipe *hunter-gatherer* di *Southeast Asia* juga menunjukkan gejala yang sama, seperti masyarakat *Dayak Punan* yang ada di Kalimantan (Carl Hoffman, 1983). Namun prosesnya, dominasi tidak hanya dilakukan hanya pada konteks sosial, politik dan ekonomi saja, tetapi juga selalu bersifat budaya. Proses ini yang disebut oleh Gramsci sebagai hegemoni, yaitu penanaman ideologi semu kepada kelas bawah oleh kelas atas (*ruling class*) dengan tujuan melanggengkan kekuasaan sebagai sesuatu yang normal dan berjalan apa adanya (Gramsci, 1971). Dalam konteks hubungan etnik, kelompok etnik dominan akan melakukan proses akulturasi atau *assimilation* terhadap kelompok etnik minoritas. Rodolfo Stavenhagen (1975) memberikan contoh apa yang terjadi kepada masyarakat Indiano di Chiapas, Meksiko, dan Guatemala. Ada proses yang disebutnya sebagai "ladinonized" atau menjadi ladino. Proses hegemoni atau pemaksaan ideologi terhadap orang-orang Indiano agar mereka menjadi ladino melalui penanaman *social institution, political power, structure social, dan value system*.

B. Peksos dengan Minortas

Langkah proses pelayanan pekerjaan sosial generatis adalah tindakan/ penanganan, karena setiap klien meniall kebutuhan/masalah serta berlatar situasi yang berbeda, maka penanganan/tindakan yang dibutuhkan akan berbeda pula. Pada beberapa kondisi tertentu, tindakan-tindakan pada *case assessment* dan *planning* dibutuhkan untuk membantu klien melakukan perubahan yang dibutuhkan. Terkadang pertolongan muncil dan pengembangan hubungan antara klien dan pekerja sosial sehingga membuat klien bebas untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Pada kondisi yang lain, pekerja sosial mungkin akan lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan dengan orang dan sistem-sistem yang lain daripada dengan sistem klien sebagai salah satu bagian dari proses pemberian bantuan.

Tindakan-tindakan pekerja sosial dalam membantu klien dilaksanakan berdasarkan pendekatan teor terhadap praktik atau metode yang digunakan dalam kegiatan pemberian bantuan. Pekerja sosial perlu memahami berbagai teori yang ada guna menunjang usaha pemberian bantuan yang sebaiknya dipelajari langsung dari sumber aslinya.

Salah satu ciri praktik generatis adalah kemampuan memilih tindakan yang paling tepat di antara berbagai kemungkinan tindakan untuk diterapkan pada kondisi tertentu. Tindakan pekerja sosial dibagi atas 2 (dua) klasifikasi utama yaitu praktik langsung (*direct practice*) dan praktik tidak langsung (*indirect practice*). Praktik langsung terutama terkait dengan tindakan/penanganan terhadap individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok kecil yang dipusatkan baik pada transaksi dalam keluarga dan sistem kelompok kecil atau pada hal-hal di mana individu, keluarga, dan kelompok kecil berfungsi dalam berhubungan dengan orang dan lembaga masyarakat dalam lingkungan tersebut.

Praktik langsung dapat dibagi berdasarkan kategori sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan pengembangan hubungan.
2. Tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan peningkatan pemahaman tentang orang dalam situasi tertentu.
3. Tindakan dalam proses perencanaan.
4. Tindakan yang diambil untuk memungkinkan klien mengetahui dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
5. Tindakan untuk memberdayakan klien.
6. Tindakan yang diambil dalam krisis.
7. Tindakan yang dilakukan untuk keberuntungan sosial klien.

8. Tindakan yang melibatkan klien sebagai dasar dari pertolongan.
9. Tindakan menghubungkan klien dengan sistem di lingkungan mereka.

Penanganan/tindakan bergantung pada skill pekerja sosial, tujuan pelayanan, dan cara-cara yang biasanya digunakan lembaga dalam memberikan pelayanannya. Pekerja sosial cenderung untuk lebih sering menggunakan jenis tindakan yang sudah biasa dipakai daripada tindakan di luar kebiasaan. Keterampilan menggunakan berbagai jenis tindakan itu akan berkembang jika sering dipraktikkan. Agar tindakan tersebut efektif, pekerja sosial harus terampil dalam menggunakan berbagai jenis tindakan dan memilih tindakan terbaik yang cocok untuk klien tertentu dan situasi tertentu. Pekerja sosial sebaiknya memiliki catatan tentang tindakan-tindakan yang diterapkannya dalam membantu individu, keluarga, organisasi, dan masyarakat. Seringkali beberapa jenis tindakan diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kadang-kadang terjadi tumpang tindih antara kemungkinan strategi dan tindakan serta secara kreatif pekerja sosial seringkali menggabungkan strategi-strategi atau membuat penyesuaian strategi-strategi sehingga dapat menanggapi suatu keadaan tertentu secara lebih baik. Seni dan pekerjaan sosial menjadi hal yang penting karena tindakan merupakan fokus dari pelayanan.

Pada saat pekerja sosial memutuskan jenis kegiatan apa yang akan diambil dalam suatu masalah tertentu, ada beberapa prinsip yang dapat dipakai:

1. Prinsip ekonomi, tindakan yang dipilih haruslah yang memakan waktu dan energi klien dan pekerja sosial yang sekecil-kecilnya. Umumnya, seorang pekerja sosial membantu klien untuk melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri dan melakukan sesuatu untuk klien hanya jika klien tidak mampu melakukannya.
2. Penentuan nasib sendiri, tindakan yang paling diharapkan oleh klien harus dilakukan kapan pun memungkinkan. Tindakan pekerja sosial direncanakan bersama klien selama tahap perencanaan proses pertolongan.
3. Individualisasi, tindakan apa pun yang diambil harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sistem klien. Pekerja sosial perlu menyesuaikan tindakan, bergantung pada karakter dan situasi klien dan kreatif dalam menerapkan setiap tindakan.
4. Pengembangan, tindakan pekerja sosial bergantung pada tingkat perkembangan sistem klien. Setiap perbedaan perkembangan individu, keluarga, dan kelompok kecil menuntut penanganan yang berbeda.

5. Ketergantungan, tindakan pekerja sosial bergantung pada tindakan klien. Selalu ada pertimbangan atas tindakan dan kemampuannya untuk melakukan perubahan. Tindakan pekerja sosial dan klien saling melengkapi.
6. Fokus pada tujuan pelayanan, seluruh tindakan harus berkaitan dengan tujuan-tujuan pelayanan sebagaimana telah dikembangkan oleh pekerja sosial dan klien selama tahap perencanaan.

1. Peranan Pekerjaan Sosial

a. Sebagai pemercepat perubahan (*enabler*)

Sebagai *enabler*, seorang pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya. Peran *enabler* dalam kelompok minoritas, pekerja sosial berusaha membantu mengubah kelompok minoritas dalam hal cara pandang mereka dan diarahkan agar memanfaatkan sumber-sumber yang ada untuk kepentingannya.

b. Peran sebagai perantara (*broker*)

Peran sebagai perantara yaitu menghubungkan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini; Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat. Kelompok minoritas memerlukan orang ketiga agar ia tidak selalu menjadi korban kelompok mayoritas, untuk itu pekerja sosial berusaha menjadi perantara antara kelompok mayoritas dan minoritas agar mereka bisa hidup berdampingan dan tidak ada yang dirugikan.

c. Pendidik (*educator*)

Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, *community worker* diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan. Pekerja sosial membantu para kelompok minoritas tidak menjadi korban dan agar mereka bisa mencapai kebutuhan sosialnya sehingga kelompok minoritas

tidak selalu dirugikan atau melakukan preventif atau penyuluhan kepada masyarakat agar tidak mendiskriminasi kelompok minoritas.

d. Fasilitator

Pekerja sosial sebagai fasilitator, dalam peran ini berkaitan dengan menstimulasi atau mendukung pengembangan masyarakat. Peran ini dilakukan untuk mempermudah proses perubahan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menjadi katalis untuk bertindak dan menolong sepanjang proses pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

e. Mediator

Memberikan layanan mediasi jika klien mengalami konflik dengan pihak lain atau orang lain agar dicapai kesesuaian antara tujuan dan kesejahteraan di antara kedua belah pihak.

f. Advokator

Di dalam masyarakat terdapat masyarakat mayoritas dan minoritas secara jumlah rata-rata kelompok minoritas lebih sedikit, jadi akan menerima banyak tekanan dari kelompok mayoritas. Jadi, pekerja sosial harus bisa mengadvokasi hak-hak masyarakat minoritas yang mendapat tekanan.

g. Pembimbing Sosial Kelompok

Memberikan intervensi pada sejumlah klien yang berkumpul dan berbagi berbagai isu (topik yang mereka minati) melalui pertemuan yang teratur dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah disusun bersama.



BAB X

PEKERJA SOSIAL DENGAN KELOMPOK INDIGENOUS

Indigenous

Indigenous adalah kelompok sosial yang tak menyusun mayoritas populasi total dari voting dominan secara politis dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Indigenous dapat pula merujuk kepada kelompok adat. Indigenous tak perlu bersifat numerik sebab dapat mencakup kelompok yang di bawah normal dengan memandang pada kelompok idem dalam hal status sosial, pendidikan, pekerjaan, kekayaan, dan wawasan politik.

Istilah "kelompok Indigenous" sering diterapkan bersama dengan wacana hak asasi manusia dan hak kolektif yang mengemuka di abad ke-20. Dalam definisi yang dikenal dalam PBB misalnya, indigenous adalah suatu kelompok warga suatu negara, namun sedikit dari sisi jumlah, tidak dominan, yang berkaitan dengan etnik, agama, dan bahasa mereka. Yang perlu diperhatikan kelompok yang dianggap indigenous ini adalah warga negara yang memiliki keunikan dibanding kelompok "besar" lain dalam lingkup suatu etnik, agama, dan bahasa. Dianggap Indigenous karena jumlahnya kecil.

Hal yang perlu diperhatikan dalam definisi itu "penduduk pribumi/asli" (*indigenous people*) apakah "penduduk asli" bisa dilihat sebagai kelompok asli? Ada pendapat yang menjawab "iya" ada yang "tidak", namun karena mereka di beberapa negara jumlahnya semakin sedikit, akhirnya dianggap sebagai "kelompok asli".

Di sinilah problem lain mulai dimulai, bahwa kategori dan definisi *indigenous* ini menjadi persoalan serius apabila yang terjadi—dan ini banyak contohnya—praktik "*indigenous*" (memasukkan suatu kelompok adat). Misalnya dalam konsep kewarganegaraan seharusnya tidak dikenal kategori "modern" dan "*indigenous*" karena seluruh penduduk adalah warga negara yang berarti seluruh penduduk masuk dalam kategori "asli".

Kemajemukan yang tumbuh di Indonesia akan dianggap membanggakan dan dipandang sebagai kekayaan kalau dilihat dari perspektif budaya. Namun kalau dibawa pada ranah politik kekuasaan akan menimbulkan pengalaman yang bertolak belakang. Dalam konteks kekuasaan akan muncul politik identitas yang tiba-tiba mengubah kemajemukan sebagai petaka. Salah satu anasir dalam kemajemukan akan dipolitisir—seperti etnis dan agama—sebagai kekuatan yang bisa menindas anasir yang lain dalam pertandingan kuantitas. Yang banyak akan menindas yang sedikit. Di sinilah petaka awal soal "modern" dan "*indigenous*" muncul. Dalam ranah ini, kemajemukan yang sudah tumbuh berabad-abad dan hidup berdampingan tiba-tiba ingin disangkal dan dipaksa ada penyeragaman. Yang sedikit dipaksa untuk berasimilasi dengan yang banyak. Yang kuat menundukkan yang lemah.

Pengelompokan menjadi kaum indigenous dapat dilakukan atas dasar perbedaan agama, ras, bahasa, paham politik (misalnya kaum komunis di Australia), asal usul daerah (misalnya orang Afrika yang dibawa ke Amerika Serikat yang menjadi indigenous di sana), kelas sosial (seperti buruh dan majikan serta penganggur) ataupun perbedaan dalam pendapat (misalnya pendapat orang Papua untuk melepaskan diri dari NKRI atau pendapat



entang paham politik). Berdasarkan kenyataan yang ada kebanyakan kaum indigenous tergolong Masyarakat Adat.

Dalam konteks NKRI, suku-bangsa Papua adalah minoritas, tetapi pada saat orang Indonesia berada di Papua Barat, mereka menjadi indigenous di dalam wilayah Masyarakat Adat Papua (MADAT Papua). Kebanyakan MADAT menjadi kaum indigenous karena begitu dekolonisasi terjadi. Akibatnya banyak sekali peta kolonialisme yang telak dipetak menurut kepentingan perut dunia barat itu dipertahankan, sehingga peta-peta di atas kertas yang memotong hubungan kekerabatan dan batas-batas suku/belan secara sombarangan itu juga terus terbawa ke dalam negara-negara yang didekolonisasi.

Kita kenal orang Melanesia sekarang terkotak-kotak di dalam tujuh negara yang didekolonisasi, berdasarkan peta politik kaum penjajah. Kita juga tahu orang Kurdistan yang jumlahnya tidak sedikit, tetapi mereka terbagi-bagi ke dalam lima negara atas pengotakan penjajah Inggris, sehingga sampai hari ini mereka dipandang kaum indigenous di lima negara, termasuk Irak, Turki, dan Iran.

Berdasarkan kecenderungan ini, ditambah lagi dengan keluhan-keluhan pelecehan dan peremehan hak karena mereka dianggap minoritas, tak berguna ataupun tak berkuasa, khususnya karena prinsip demokrasi adalah *rule by the indigenous rights*, maka dirasa perlu ada wadah yang memperhatikan mereka. Sering terjadi segala keluhan Masyarakat Adat diarahkan agar disampaikan di Kelompok Kerja Kaum Indigenous (*Working Group on Indigenous*) di bawah Komisi HAM, yang merupakan bagian dari Economic and Social Council (ECOSOC/PBB, yang ada di bawah Security Council. Diskriminasi antara kaum indigenous diwarnai dengan demokrasi yang selalu dikaitkan dengan "*rule by indigenous rights*", yaitu menyangkut "*pluralism*" dan/ atau "*multiculturalism*", yang dikaitkan juga dengan kebijakan politik devolusi dan otonomisasi.

B. Hak Indigenous

Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, bergantung pada misalnya, jabatan atau kedudukan dalam masyarakat.

Beberapa Persoalan Penting seputar Kelompok Indigenous. Persoalan yang sering muncul yang berhubungan dengan interaksi sosial di antara kelompok masyarakat adat adalah:

1. Adanya politik pencitraan yang disematkan kepada komunitas tertentu. Politik pencitraan berupa stigma dan stereotipe ini merupakan awal dari munculnya hubungan sosial yang diskriminatif. Seperti pencitraan negatif terhadap komunitas wetu telu, tana toa kajang, sedulur sikep, badui, dan sebagainya sebagai kelompok yang "berbeda", "terbelakang", "bodoh", dan sebagainya.
2. Dukungan pencitraan dan diskriminasi melalui instrumen hukum/kebijakan, seperti kebijakan mengenai KAT, cagar alam, dan pariwisata. Seperti kebijakan tentang Cagar Alam Morowali Sulawesi Tengah yang lebih menekankan perlindungan negara terhadap potensi alamnya, bukan dalam hal perlindungan terhadap komunitas (sebagai individu maupun kelompok) yang hidup di dalamnya.
3. Implikasi dari poin kedua seringkali berbentuk perlakuan masyarakat mayoritas terhadap kelompok minoritas untuk mengikuti tata cara kehidupan kelompok mayoritas.
4. Pemisahan kategori agama dengan kehidupan komunitas minoritas tersebut. Misalnya, ketika terjadi penghinaan terhadap orang sedulur sikep, maka itu tidak dianggap sebagai penghinaan terhadap tata cara hidup mereka secara keseluruhan. Padahal, menyebut nama sedulur sikep, itu berarti termasuk di dalamnya kepercayaan dan tata-cara kehidupan mereka secara keseluruhan.
5. Batasan tentang "agama resmi" dan "tidak resmi" yang dicanangkan oleh pemerintah juga berakibat pada terlanggarnya hak asasi manusia, khususnya komunitas-komunitas minoritas di mana praktik dan bentuk keagamaan mereka tidak diakui oleh Negara. Kenyataan ini melanggar ketentuan kovenan, di antaranya pasal 2, pasal 4, pasal 18, pasal 26, dan pasal 27.

Mengenai hak-hak indigenous itulah, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:

1. Kelompok memiliki hak untuk mengembangkan, menikmati, dan memberdayakan seluruh kekayaan kultur, tradisi, dan bahasa mereka sesuai dengan kearifan lokal yang mereka miliki sebagai 'ruang perkembangan kebudayaan'.
2. Kelompok yang hidup dalam lingkup teritorial mereka memiliki hak untuk menerima atau menolak hadirnya misi-misi dari pihak luar yang

- ingin mengambil atau memberi manfaat dalam bentuk apa pun dan atau terhadap kehidupan mereka.
3. Di dalam hubungannya dengan perdilan, kelompok minoritas juga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan perdilan, serta berhak memperoleh fasilitas (pemerintah, pengacara, dan lain-lain) yang mendukung berlalunya proses hukum dan perdilan yang berlangsung.
4. Kelompok juga memiliki hak untuk berbagai bentuk tata cara dan perdilan yang berlangsung.
5. Berbagai bentuk ketersediaan fasilitas umum oleh negara, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan yang diperuntukkan bagi kelompok minoritas dilakukan melalui komunikasi yang setara dan tanpa pemaksaan antara berbagai pihak yang terkait, dalam hal ini adalah antara kelompok minoritas dengan negara.
6. Dalam hubungannya dengan wilayah politik, kelompok juga memiliki hak perwakilan.
- Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah, demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederhana, suku bangsa, kesukubudayaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya nasional, HAM/hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Hak indigenous erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu hal-hal yang termasuk ke dalam hak asasi manusia antara lain:
1. Hak asasi pribadi/personal rights
- Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat
 - Hak kebebasan menyatakan atau menyatakan pendapat
 - Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
 - Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing

2. Hak asasi politik/*political rights*
 - Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
 - Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
 - Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya
 - Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
3. Hak asasi hukum/*legal equality rights*
 - Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
 - Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil/PNS
 - Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
4. Hak asasi ekonomi/*property rights*
 - Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
 - Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
 - Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain-lain
 - Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu
 - Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
5. Hak asasi peradilan/*procedural rights*
 - Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
 - Hak persamaan atas perlakuan pengeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
6. Hak Asasi Sosial Budaya/*Social Culture Right*
 - Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
 - Hak mendapatkan pengajaran
 - Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

1. Peksos dengan Indigenous

Pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang berdasar pada praktik dan disiplin akademik yang memfasilitasi perubahan dan pembangunan sosial, kohesi sosial dan pemberdayaan serta kebebasan individu. Pekerjaan sosial juga dapat diartikan sebagai sebuah profesi pertolongan baik itu untuk individu, kelompok, ataupun masyarakat agar mencapai keberfungsian sosial.

Prinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab kolektif dan pengakuan keberagaman adalah prinsip utama bagi pekerjaan sosial.

Diperkuat dengan teori-teori pekerjaan sosial, ilmu-ilmu sosial, humaniora dan pengetahuan-pengetahuan lokal, pekerjaan sosial melibatkan individu dan institusi untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dan untuk meningkatkan kesejahteraan. Intervensi pekerjaan sosial terjadi ketika situasi yang ada, baik itu di tingkat individu, keluarga, kelompok kecil, masyarakat, sangat membutuhkan perubahan dan pengembangan.

Hal tersebut didorong oleh kebutuhan untuk menghadapi dan mengubah kondisi struktural yang berkontribusi terhadap pemiskinan, eksklusi sosial dan opresi. Perubahan sosial meliputi keberadaan institusi individu dalam mengangkat hak asasi manusia dan ekonomi, lingkungan dan keadilan sosial. Profesi pekerjaan sosial juga berkomitmen untuk memelihara stabilitas sosial, sejauh stabilitas tersebut tidak digunakan untuk memarginalisasikan, mengeluarkan atau menekan kelompok-kelompok individu tertentu. Pembangunan sosial dikonseptualisasikan sebagai strategi intervensi, kerangka pikir kebijakan dan negara yang diinginkan, yang disesuaikan dengan kerangka residual dan institusional yang lebih populer. Kerangka tersebut berdasar pada asesmen holistik biopsikososialspiritual dan intervensi yang meliputi pembagian mikro-makro, menggunakan sistem yang bertapis dan kolaborasi antarsektor dan antarprofesi, ditujukan guna tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Pekerjaan sosial memprioritaskan diri pada perkembangan sosio-struktural dan ekonomi dan tidak lagi mengikuti pemahaman konvensional yang menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi adalah prasyarat tercapainya pembangunan sosial.

2. Unsur Indigenous

Kriteria masyarakat indigeneus atau KAT sebagaimana tertuang dalam Keppres No. 111/1995 adalah 7 unsur kriteria yaitu:

1	Jumlah komunitas	Kecil, terjangkau dan hubungan antarpedesaan
2	Sifat sosial	Homogen, menurut garis keturunan suku
3	Sikap terhadap pemerintah	Tertutup
4	Sosok Geografis	Ujungnya terpencil dan relatif sulit dijangkau
5	Teknologi	Berdahasa, tetapi fungsional bahan dan manfaat sesuai dengan kebutuhan setempat
6	Kebertanggung-jawa lingkungan hidup dan sumber daya alam	Relatif tinggi antaranggota komunitas dalam memanfaatkan sumber daya alam
7	Kehidupan sosial	Berutang-jawa antara ketertutupan
8	Sistem ekonomi	Kehidupan dalam sistem ekonomi subsistem
9	Perawatan sosial dasar	Berlun-rita atau sangat terbatas

10	Survei sosial	Belum ada wawancara atau diungkap masalah yang dihadapi keluarga
11	Hubungan sosial	Terdapat di dalam komunitas atau dengan komunitas melalui kegiatan tertentu
12	Alat pemecahan konflik	Untuknya mereka melakukan pertemuan (di hari) bulan
13	Intuisi sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Keseluruhan tradisi kerukun masyarakat - Peningkatan keterampilan dan penguasaan kemampuan diri sebagai keluarga yang akan beradaptasi kepada dalam menghadapi era era baru, praktik dan tradisi - Pendidikan di dalam keluarga (individual, keluarga, sosial), dan mengajar dalam praktik - Kesehatan pribadi dan sosial tidak diabaikan dan penyembuhan melalui komunitas, praktik, dan budaya tradisional - Perilaku yang endogen dalam satu suku, jenis atau kelompok dengan cara lainnya - Keterampilan komunitas bertujuan melalui peningkatan cara hidupnya - Praktik di bawah pengawasan dan pemimpin komunitas atau individu yang bertindak melalui praktik atau - Kepemilikan, kepemilikan individu, budaya diwujudkan melalui wacana, kepemilikan sosial bisa menjadi digunakan untuk kepentingan bersama yang harus bersama saja - Bahasa, Alat komunikasi penting beradaptasi budaya

3. Peran Peksos dalam KAT

a. Strategi Pemberdayaan

Menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung kelompok indigenous untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial budaya, ekonomi, dan politik. Strategi tersebut dilaksanakan dengan pendekatan seperti:

- Pemberdayaan yaitu upaya meningkatkan kepercayaan, peluang dan kinerja warga minoritas untuk mencegah dan mengatasi masalah yang ada di lingkungannya.
- Kemitraan yaitu kerja sama dengan berbagai pihak (*stakeholder*), mencakup kepedulian, kesetaraan, kebersamaan dan kolaborasi dari jaringan kerja yang menumbuhkembangkan kemanfaatan timbal balik (*shareholder*)
- Partisipasi yaitu adanya prakarsa, peran minoritas dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosial warga minoritas.
- Advokasi sosial yaitu upaya perlindungan melalui pemeliharaan dan keterjangkauan terhadap berbagai sumber daya yang dimiliki maupun yang diakses dari luar untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas hidup warga minoritas.

Pengenalan budi daya (domestikasi) di bidang produksi bertujuan agar warga *indigenous* dapat hidup secara menetap dan memiliki alternatif lain selain dari kegiatan produksi yang telah dikembangkan oleh mereka selama ini.

b. Bidang pemberdayaan

Beberapa bidang pembangunan yang dilaksanakan dalam program pemberdayaan KAT antara lain meliputi: kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kehidupan beragama, administrasi kependudukan serta bidang-bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan warga KAT. Khusus di bidang permukiman melalui penataan perumahan dan permukiman dengan 2 alternatif kegiatan:

t. Tipe lokasi

- Di lokasi asal (tipe insitu)
 - Membangun rumah warga, rumah petugas, balai sosial, rumah ibadah, jalan lingkungan dan fasilitas sosial lainnya.
 - Membangun sebagian atau rehabilitasi rumah warga, membuka jalan tembus/sarana perhubungan atau mesata permukiman yang sudah ada. Model ini disebut stimulus pengembangan masyarakat.
 - Memberikan paket-paket bantuan sesuai dengan kebutuhan kelompok minoritas dan kondisi lingkungan.
- Di lokasi baru (tipe eksitu)
 - Membangun rumah warga secara keseluruhan (sesuai dengan target yang direncanakan), rumah petugas, sarana ibadah, jalan lingkungan dan sarana sosial lainnya penyiapan/pembukaan lahan.
 - Memberikan jaminan hidup kepada warga minoritas dan petugas yaitu selama 3 bulan pada tahun pertama dan 12 bulan pada tahun kedua, sedangkan pada pemberdayaan tahun ke-3 dan lokasi stimulus baik warga maupun petugas tidak diberikan.

2. Sistem zonasi

Pemanfaatan SDA yang tidak merusak dan pengelolaan yang berkelanjutan merupakan suatu contoh tindakan bijaksana dan perilaku positif dan dilakukan oleh warga minoritas, di samping sebagai sumber kehidupan bagi mereka alam adalah sesuatu yang harus dijaga karena alam hanya titipan sang Pencipta yang harus diwariskan kepada anak

cucu. Dengan berpijak pada kearifan tersebut dan mempertimbangkan berbagai aspek yang saling terkait dan saling memengaruhi, maka dalam penataan pola ruang pada permukiman minoritas dapat diterapkan suatu sistem zonasi. Pertimbangan utama dalam pembagian ruang di sini adalah berdasarkan dari aktivitas dan tata cara kehidupan serta kebiasaan mereka dalam pemanfaatan ruang.

C. Program Pemberdayaan

- Pemetaan sosial
- Penyusunan rencana dan program pemberdayaan
- Pemberdayaan lingkungan sosial perlindungan komunitas adat terpencil
- Kerja sama pengembangan sosial
- Monitoring dan evaluasi

Evaluasi mengembangkan kehidupan warga KAT dalam bermasyarakat baik di dalam maupun di luar lingkungannya maka penataan perumahan dan permukiman dilakukan secara bertahap seiring dengan kebutuhan prasarana dan dinamika warga.

D. Proses Pemberdayaan

Proses pemberdayaan komunitas adat terpencil dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

Persiapan pemberdayaan: secara sistem kegiatan yang dilaksanakan adalah pemetaan sosial (PS), penjajakan awal (PA), studi kelayakan (SK), penyusunan rencana dan program (PRP) dan penyiapan kondisi masyarakat (PKM). Kesiapan warga untuk dapat menerima perubahan dan berinteraksi dengan masyarakat.

Pelaksanaan pemberdayaan: jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberdayaan sumber daya manusia (PSDM), pemberdayaan lingkungan sosial (PLS), kerja sama pengembangan sosial (KPS). Pemberdayaan terhadap warga minoritas dilakukan terhadap berbagai aspek kehidupan dan penghidupan agar mereka dapat hidup secara wajar dan baik jasmani, rohani, dan sosial sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat.

Pada setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan selama proses pemberdayaan KAT, beberapa jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu: konsistensi, yaitu upaya penyadaran secara fisik, tulisan, dan perasaan; sosialisasi informasi melalui pendampingan sosial; dialog dengan teknik PRA dan FGD; pelayanan berbagai bidang pembangunan dan bantuan berupa jaminan hidup, UCR, pemeliharaan lingkungan dan pelestarian budaya.

E. Jenis Kegiatan Pemberdayaan

Pengembangan program pada tingkat dilakukan dalam rangka peningkatan lingkungan permukiman dan warga ke dalam sistem pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Program bidang kesejahteraan sosial pada sektor lain dan instansi terkait akan mendakiklanjuti seperti pada masyarakat umumnya.

daerah pada sistem pembangunan wilayah yang terintegrasi.

Pengembangan program berupa kegiatan lanjutan oleh pemerintah

program pembangunan lainnya.

Program perkembangannya tetap diketahui sebagai bahan rujukan pada PKAT beraktiv. Namun demikian monitoring dan evaluasi tetap dilakukan warga KAT, maka pemberdayaan yang dilaksanakan melalui program dan untuk mencegah keberlanjutan serta menumbuhkan kemandirian menggerakkan hidupnya keberlanjutan. Setelah tiga tahun pemberdayaan Terminal berupa pengakhiran program pemberdayaan KAT untuk

pada tahun-tahun berikutnya.

kembali tentang berbagai hal dalam rangka perbaikan program PKAT dibatasi dalam bentuk *living experience* sehingga dapat dimasukkan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program PKAT masuk bagi perbaikan dan peningkatan hasil yang telah dicapai, berbagai secara berkala seiring dengan proses pemberdayaan guna memperoleh Rangkaian kegiatan bimbingan, pemantauan dan penilaian yang dilakukan. Supervisi, monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan (SMERP).

Pemikiran feminisme memberikan pengaruh dalam pekerjaan sosial. Secara akademis pemikiran feminisme muncul dalam praktik pekerjaan sosial pada era tahun 1970-an, ketika kata perempuan masuk dalam kurikulum pekerjaan sosial (Domenehl, 2006). Pekerjaan sosial feminis merupakan satu pendekatan dalam praktik pekerjaan sosial yang memadukan kerangka teori feminis dan pekerjaan sosial untuk mengembangkan relasi pertolongan berdasarkan prinsip-prinsip yang menguntungkan perempuan.

A. Feminisme

PEKERJAAN SOSIAL DENGAN GENDER

BAB XI



mengembangkan sumber, keahlian, dan keyakinannya dalam mengontrol serta menentukan hidupnya (Suharto, 2006).

Feminisme dalam praktik pekerjaan sosial didedikasikan untuk menciptakan style dan dinamika baru dalam interaksi dan relasi. Perhatian utama feminisme adalah mengakhiri dominasi dan opresi, baik terhadap perempuan. Feminisme bukan hanya membicarakan isu perempuan saja, tetapi juga perubahan sosial, ekonomi, dan struktur politik yang lebih luas untuk mengakhiri dominasi dan penindasan.

"Feminism is transformational politics a political perspective concerned with changing extant economic, social, and political structure. Basically feminism is concerned with ending domination and resisting oppression as a politics transformation feminism is relevant to more than a constituency of women."

Perspektif feminis sejalan dengan perspektif pekerjaan sosial, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia. Menurut Tropman (1995) pekerjaan sosial memiliki fundamen yang sama dengan feminisme terutama melihat relasi antara individu dan komunitas, antara kebutuhan sosial dan individual, juga perhatian terhadap harkat martabat manusia dan hak untuk menentukan hidup.

Menurut Bambang Rustanto (2010) teori dan pendekatan feminis ini dikembangkan oleh para pemikir feminis yang tidak meyakini lagi teori dan pendekatan yang lebih male centre. Minimal ada 3 teori utama yang dikembangkan yaitu:

1. Feminis Liberal

Teori dan pendekatan ini mengusulkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dengan memberikan kesempatan yang sama dalam semua kedudukan dan pekerjaan yang ada dalam masyarakat. Sekarang, muncul istilah perempuan adalah teman dan mitra sejajar laki-laki, kalau ada pekerja laki-laki juga ada pekerja perempuan, kalau ada pelajar laki-laki juga ada pelajar perempuan, kalau ada pejabat laki-laki juga ada pejabat perempuan, dan kedudukan lainnya dalam masyarakat.

2. Feminis Radikal

Teori dan pendekatan ini percaya bahwa perempuan itu berbeda dengan laki-laki dengan demikian perempuan memiliki kebutuhan dan

Perempuan secara biologis memiliki organ seks yang disebut vagina. Dalam siklus kehidupannya perempuan mempunyai kodrat khasnya yaitu menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui, serta menopause.

b. Perempuan

Jenis kelamin ditunjukkan dengan adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bersifat universal dan tidak dapat diubah. Jadi laki-laki dan perempuan secara kodrat tidak dapat dipertukarkan, karena sudah anugerah dari penciptanya.

a. Jenis Kelamin

1. Identitas

Menurut Bambang Kusanto (2010) beberapa pengertian yang terkait dengan pendekatan Gender dalam pekerjaan sosial, antara lain:

B. Gender

Pekerja sosial saat ini sudah mulai melirik teori dan pendekatan ini di dalam praktik pekerjaan sosial dan intervensi yang berbeda dengan intervensi konvensional sebelumnya yang tidak membedakan kebutuhan dan harapan perempuan.

Teori dan pendekatan ini percaya bahwa perempuan itu dijadikan warga negara kelas dua, karena perempuan dikedudukan dalam aspek ekonomi. Pekerjaan perempuan tidak dihargai secara ekonomi dalam dunia kerja terlebih pekerjaan domestik. Dan pekerjaan di publik juga perempuan mendapatkan penghargaan yang rendah dibandingkan laki-laki. Itu yang menyebabkan perempuan terpuruk dan tertindas dalam masyarakat. Itulah sebabnya dalam keluarga dan masyarakat perempuan mengalami subordinasi, diskriminasi, beban ganda, kekerasan dan marginalisasi.

3. Feminis Sosial

Teori dan pendekatan ini percaya bahwa perempuan itu dijadikan harapan yang khas perempuan sesuai dengan kondisi biologis dan kodrat perempuan yang berbeda dengan laki-laki.

c. Laki Laki

Laki-laki secara biologis memiliki organ seks yang disebut penis. Dalam kehidupannya tidak mengalami siklus seperti perempuan karena laki-laki menghasilkan sperma saja.

2. Kategorisasi

a. Gender

Gender merupakan perbedaan secara sosial dan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh konstruksi sosial masyarakat. Hal ini perlu dipelajari dan sangat bervariasi di dalam maupun antarbudaya serta berubah dari waktu ke waktu. Misalnya di beberapa daerah perempuan mengasuh anak, tetapi di daerah lain semakin banyak laki-laki yang mulai mengasuh anak.

b. Peran Gender

Peran gender merupakan kegiatan yang sebenarnya dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Misalnya anak laki-laki membantu ayah bekerja mencari nafkah dan anak perempuan membantu ibu bekerja di rumah. Peran sosial gender walaupun sering diperkuat oleh nilai, tetapi dapat diubah dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan sosial dalam masyarakat. Seperti sekarang anak perempuan tidak lagi harus tinggal di rumah, tetapi juga bersekolah dan bekerja mencari nafkah sebagaimana halnya anak laki-laki.

c. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

d. Keadilan Gender

Keadilan gender adalah keberadaan laki-laki dan perempuan dari segala usia memiliki peluang yang sama untuk meraih keberhasilan dalam hidup. Dengan kata lain keadilan gender berarti laki-laki dan perempuan memiliki akses dan kontrol yang wajar dan adil terhadap sumber daya dan manfaatnya agar semua orang dapat berpartisipasi di dalamnya serta memutuskan dan memperoleh manfaat pembangunan yang sama.

Tindakan spesifik gender melihat bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan berbeda karena fungsi biologis dan atau status sosialnya berbeda sehingga adanya norma, nilai, stereotype dan praktik gender di tengah masyarakat. Oleh karena itu upaya ekstra perlu dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender.

e. Tindakan Spesifik Gender

Tanggung jawab gender perlu dicapai kesepakan dalam keluarga dan masyarakat tentang kesetimbangan yang diinginkan antara peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Setiap generasi juga perlu mencapai pengetahuan tentang cara mencapai kesetaraan gender di rumah, tempat kerja, dan di masyarakat.

d. Tanggung Jawab Gender

Kontrol gender adalah semua anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kewajiban yang sama untuk menanggapi keputusan dalam mengatasi masalah dan memilih peluang dalam keluarga dan masyarakatnya. Selain itu juga untuk saling menghormati, menghargai apa ada yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan nilai dalam keluarga dan masyarakatnya.

c. Kontrol Gender

Akses gender adalah semua anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memanfaatkan fasilitas yang ada seperti mendapatkan kesempatan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan peluang dalam pengembangan diri.

b. Akses Gender

Pengarusutamaan gender adalah strategi pembangunan untuk meningkatkan dan pengalihan laki-laki dan perempuan sebagai bagian terpadu dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemerintahan serta penilaian atas kebijakan dan program di semua bidang: ideologi politik, hukum, keamanan, dan ekonomi dan sosial, sehingga perempuan dan laki-laki dapat memperoleh keuntungan yang adil dan meningkatkan kesetaraan.

a. Pengarusutamaan Gender

3. Implementasi

C. Praktik Pekerjaan Sosial

Praktik sosial feminis dibedakan berdasarkan kerangka teori feminis yang digunakan pekerja sosial dalam memandang persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Kerangka teoretis tersebut pada empat komponen praktik pekerjaan sosial, yaitu identifikasi masalah, assessment, strategi pertolongan dan tujuan pertolongan, (Ness A Jannet, 1999) sebagai berikut.

1. Identifikasi Masalah

Pekerjaan sosial feminis melihat masalah yang dihadapi individu dipahami sebagai refleksi dari masalah sosial yang lebih besar. Pekerja sosial dan klien bersama-sama mengidentifikasi masalah yang merupakan manifestasi dari opresi kelas, patriarki, dan dominasi. Bagaimana masalah muncul berkaitan dengan kelas sosial dan gender serta bagaimana struktur sosial melakukan pengaturan terhadapnya. Bagaimana krisis personal memiliki komponen subjektif dan objektif serta berakar pada sistem kelas dan gender, serta bagaimana mode produksi yang terjadi dalam sistem sosial yang bersifat patriarki.

2. Assessment

Assesment dilakukan terhadap relasi primer dan sekunder berkaitan dengan karakteristik dan dampak patriarki, bentuk-bentuk kelas sosial dan bentuk-bentuk opresi. Assessment dilakukan juga terhadap isu-isu alienasi, personaliti, identitas, dan kepercayaan diri, pemenuhan kebutuhan diri dan fokus kontrol berkaitan dengan kelas, patriarki dan sistem dominasi.

3. Strategi Pertolongan

Strategi pertolongan mencakup peningkatan kesadaran yang didesain agar individu dapat menginterpretasikan bentuk-bentuk opresi dalam relasi sosial dan bagaimana opresi dapat membatasi pertumbuhan dan pembangunan. Termasuk di dalamnya adalah advokasi sosial bagi pemenuhan kebutuhan dasar dan perubahan sistem dominasi dalam masyarakat. Pengorganisasian komunitas menjadi model penting dalam membangun koalisi kolektif untuk perubahan sosial. Pengorganisasian memungkinkan kelompok yang teropresi menggali kekuatan kolektif untuk melakukan perubahan.

4. Tujuan Pertolongan

Tujuan pertolongan pekerjaan sosial mencakup:

1. Mengembangkan kesadaran bersama bahwa masalah personal berakar pada sistem patriarki;
2. Membangun kesadaran politik dan membangun hubungan di antara sistem dominasi yang berbeda dalam masyarakat;
3. pengorganisasian pengembangan koalisi dan pemberdayaan individu maupun kelompok masyarakat untuk melakukan perubahan sosial bersama;
4. memungkinkan individu-individu dalam masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya;
5. Mengembangkan model pengambilan keputusan yang berkeadilan gender.



BAB XII

PEKERJAAN SOSIAL DENGAN KELOMPOK MARGINAL

A. Pengertian Marginal

Marginal berasal dari bahasa Inggris "*marginal*" yang berarti jumlah atau efek yang sangat kecil. Artinya, marginal adalah suatu kelompok yang jumlahnya sangat kecil. Marginal juga identik dengan masyarakat kecil atau kaum yang terpinggirkan.

1. Pablo Gonzales Casanova (1995)

Marginalisasi adalah fenomena pedesaan yang menimbulkan kemelaratan dan ciri kebudayaan pribumi tertentu yang biasanya tertahan yang menunjukkan fenomena integral dalam masyarakat artinya peminggiran oleh sekelompok orang.

2. Makmur (2002)

Marginalisasi adalah suatu keterpaksaan seseorang dalam menghadapi kenyataan kehidupan sehari-hari yang mungkin sesekali terkait secara mendalam dengan pergaulan dalam menjalankan proses aktivitas administratif secara menyeluruh.

3. Mujiaty (2001)

Marginalisasi merupakan sebuah proses sosial yang membuat masyarakat menjadi marginal, baik terjadi secara alamiah maupun dikreasikan sehingga masyarakat memiliki kedudukan sosial yang terpinggirkan.

Kaum marginal merupakan kaum-kaum yang terdominasi dari sebuah struktur maupun sistem yang berlaku, sehingga mereka menjadi tersisihkan dan tidak mempunyai kesempatan serta kekuasaan untuk mendobrak sebuah praktik-praktik dominasi. Apalagi jika kaum marginal tersebut tak punya kekuatan ekonomi yang cukup, penghasilan pas-pasan dan tidak tentu setiap harinya, maka mereka akan sering menerima praktik-praktik penindasan oleh kaum dominasi. Jadi kaum marginal adalah masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat. Contoh dari kaum marginal antara lain pengemis, pemulung, buruh, petani, dan orang-orang dengan penghasilan pas-pasan atau bahkan kekurangan.

Kesimpulan dari definisi di atas bahwa marginalisasi adalah fenomena pedesaan yang menimbulkan kemelaratan dan ciri kebudayaan pribumi tertentu yang biasanya tertahan yang menunjukkan fenomena integral dalam masyarakat artinya peminggiran oleh sekelompok orang dan merupakan sebuah proses sosial yang membuat masyarakat menjadi marginal, baik terjadi secara alamiah maupun dikreasikan sehingga masyarakat memiliki kedudukan sosial yang terpinggirkan.

B. Kriteria Marginal

1. Secara Sosiologis

Yang termasuk kelompok marginal adalah buruh anak, seorang/kelompok/masyarakat yang mendapatkan perlakuan tidak adil atau diskriminatif karena persoalan gender, seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami peminggiran sosial, dan masyarakat atau kelompok masyarakat yang hak atasnya terlanggar. Dengan demikian, individu atau kelompok masyarakat yang mendapat ketidakadilan/peminggiran karena persoalan-persoalan di atas tersebut, maka ia masuk dalam kategori marginal. Seperti: buruh anak, ketidaksetaraan, eksklusi sosial, kekerasan hak asasi.

2. Secara Infrastruktur

Individu atau kelompok masyarakat dari kultur mana pun ia berasal, ketika keberadaan mereka dalam kehidupan secara geografis mengalami kesulitan pada akses untuk mendapatkan air bersih, jarak transportasi yang tak terjangkau, ataupun akses pada bank dan komunikasi yang sulit, maka kelompok masyarakat ini bisa dikatakan marginal. Kebanyakan kelompok masyarakat demikian biasanya terisolasi dengan masyarakat kebanyakan.

3. Secara Kesehatan

Kelompok masyarakat yang harapan hidupnya rendah, tingkat kematian bayinya tinggi, masyarakat yang mengalami gizi buruk dan kekurangan gizi, semua ini bisa dikategorikan dalam kelompok marginal. Seperti: Tingkat harapan hidup, kematian bayi, kekurangan gizi dan gizi buruk pada masyarakat umum.

4. Secara Pendidikan

Sebuah kelompok masyarakat yang di dalamnya tingkat buta hurufnya tinggi, banyak yang tidak sekolah, maka kelompok masyarakat semacam ini dapat didefinisikan dalam golongan kelompok marginal. Seperti: tingkat buta huruf, rasio bruto pendaftar sekolah, dan lain-lain.

5. Secara Politik

Individu atau kelompok masyarakat yang terhambat atau tidak diberi ruang untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, maka ia tergolong marginal (secara politik). Begitupun kelompok masyarakat yang tidak bisa mendapatkan kenyamanan dan selalu tirancam baik dalam masalah keamanan maupun dari kekerasan ia juga masuk dalam kategori marginal. Dalam konteks ini tentu pemenuhan dan penanganannya pun berbeda. Seperti partisipasi dalam pemilu, indeks korupsi, status keamanan, kriminal atau kekerasan.

6. Secara Ekonomi

Sebuah kelompok masyarakat maupun individu yang pendapatan perkapitanya rendah sehingga ia masuk kategori miskin, maka ia masuk dalam kelompok marginal. Batas bawah pendapatan perkapita dalam hal ini berbeda-beda antara yang biasanya ditetapkan pemerintah maupun lembaga-lembaga internasional. Begitupun kelompok masyarakat yang menganggur dan tidak memiliki pekerjaan, ia juga masuk dalam kategori marginal. Seperti: pendapatan domestik perkapita rendah, tingkat pengangguran tinggi, dan lain-lain.

7. Secara Ekologis

Kelompok masyarakat yang sumber daya alamnya rusak, tereksplorasi sehingga mereka tidak dapat memanfaatkannya lagi untuk kehidupan juga bisa dikategorikan marginal. Seperti: polusi lingkungan, kondisi sumber daya alam yang hancur sehingga tidak bisa berlanjut.

8. Secara Indeks Pembangunan

Sebuah kelompok masyarakat yang indeks pembangunannya rendah, yang meliputi pertumbuhan ekonominya rendah, pemerataan ekonomi juga timpang dan tidak merata, harapan hidup rendah, tingkat melek huruf rendah, tidak adanya kesetaraan gender dalam ruang publik, maka kelompok masyarakat semacam ini juga masuk dalam klasifikasi kelompok marginal. Yang juga masuk dalam kelompok marginal adalah kelompok masyarakat miskin, yang ditunjukkan oleh rendahnya pendapatan perkapita. Seperti: indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan yang berkaitan dengan gender, dan indeks kemiskinan manusia.

C. Jenis Kelompok Marginal

1. Pedagang Asongan

Pedagang asongan adalah pedagang yang menjajakan sesuatu berupa barang di dalam kendaraan umum, di perempatan jalan, dan sebagainya.

2. Pengemudi Becak

Pengemudi becak adalah seseorang yang mencari nafkah dengan mengemudikan becak. Pekerjaan sebagai pengemudi becak sangat berat secara fisik, sebab ia menggunakan tenaga manusia. Secara sosial, pengemudi becak menyandang status rendah, bahkan di kalangan kelompok marginal.

3. Keluarga Miskin

Masyarakat miskin adalah suatu kondisi di mana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, dan dimensi aset.

4. Pemulung

Pemulung adalah orang yang memungut barang-barang bekas atau sampah tertentu untuk proses daur ulang. Pekerjaan pemulung sering dianggap memiliki konotasi negatif. Ada dua jenis pemulung: pemulung lepas, yang bekerja sebagai swasaha, dan pemulung yang bergantung pada seorang bandar yang meminjamkan uang ke mereka dan memotong uang pinjaman tersebut saat membeli barang dari pemulung. Pemulung berbandar hanya boleh menjual barangnya ke bandar. Tidak jarang bandar memberi pemondokan kepada pemulung, biasanya di atas tanah yang didiami bandar, atau di mana terletak tempat penampungan barangnya. Pemulung merupakan mata rantai pertama dari industri daur ulang.

5. Buruh

Buruh yaitu pekerja, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk

mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan.

6. Petani

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain-lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Mereka juga dapat menyediakan bahan mentah bagi industri, seperti sereal untuk minuman beralkohol, buah untuk jus, dan wol atau kapas untuk penenunan dan pembuatan pakaian.

7. Gelandangan

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

8. Anak Jalanan

Anak jalanan adalah seseorang yang masih belum dewasa (secara fisik dan psikis) yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan uang guna mempertahankan hidupnya yang terkadang mendapat tekanan fisik atau mental dari lingkungannya.

Kondisi masyarakat marginal bila dibiarkan berlarut-larut akan berdampak pada beberapa masalah sosial berikut:

- Semakin banyaknya angka putus sekolah (*drop out*) dan buta huruf di kalangan mereka.
- Semakin menurunnya kualitas SDM.
- Semakin tingginya angka pengangguran.
- Semakin tingginya penyakit-penyakit sosial masyarakat dan kerawanan sosial.
- Indeks kemajuan pendidikan di Indonesia semakin tertinggal dengan negara-negara lain.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat dijelaskan bahwa advokat pekerjaan sosial itu terdiri dari beberapa komponen yaitu, Eklakul, Tem yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara klien dan advokat sebagai hubungan timbal kebalikan manusia. Timbal baik (mutual). Tem ini digunakan untuk kepada klien, tanggung jawab utama kepada klien, dan berpusatkan pada yang menunjukkan hubungan tersebut hubungan tunggal, unik, terfokus ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara klien dan advokat pekerjaan sosial itu terdiri dari beberapa komponen yaitu, Eklakul, Tem

in an unjust or unresponsive system
 cause in a form, attempting to systematically influence decision making
 sosial yakni "the exclusive and mutual representation of clients or a
 or outcomes of advocacy) dan terlibat mendefinisikan advokat pekerjaan
 aktivitas bukan peranan atau hasil advokasi (focus on activity, not role
 pembatasan (limited), berorientasi tindakan – oriented), fokus kepada
 dari beberapa kriteria yaitu, kejelasan (clarity), dapat diukur (measurable),
 (2001) mengatakan bahwa definisi tersebut mengenai advokasi harus terdiri
 bertindak secara kolektif untuk memengaruhi perubahan sosial. Schneider
 etektif dan dakawakan. Advokasi juga digunakan untuk memengaruhi dan
 sosial bertanggung jawab memastikan kegiatan sosial dapat berlangsung
 of social workers to the legislative process." Dalam kalimatnya itu, pekerja
 Schneider (2001) mengatakan "advocacy was defined as an obligation

pekerjaan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.
 lembaga atau suatu sistem layanan, dan membantu serta memperkuat
 menolong klien untuk mencapai layanan ketika mereka ditolak suatu
 aksi sosial. Manakala Zastrow (1982) mengatakan advokasi adalah aktivitas
 yang tak dapat didefinisikan karena advokasi merujuk pada semua bentuk
 Kutchins dan Kutchins (1978) mengatakan advokasi sesungguhnya term
 untuk mengubah kebijakan, kedudukan atas program dari suatu institusi,
 antaranya mendefinisikan advokasi adalah suatu tindakan yang ditujukan
 itu, banyak definisi yang diberikan mengenai advokasi. Beberapa di
 menunjukkan keunggulan pekerjaan sosial berbanding profesi lain. Selain
 Kaminski dan Wainley (1995), advokasi adalah satu aktivitas yang

terpanggilan dan mencapai kebutuhan kebutuhan hidup mereka
 ini adalah sebagai advokat karena dapat membantu hak-hak kelompok yang
 Sehingga peran pekerja sosial yang dibutuhkan dalam kelompok marginal
 dengan baik dan dapat menjalankan peran kehidupannya dengan baik.
 sehingga sering menyebabkan kelompok ini tidak mendapatkan haknya
 kelompok marginal yang sering dipinggirkan oleh lingkungannya

0. Peksos dengan Kelompok Marginal

balik, saling kebergantungan, kesamaan, bersama, berbagi tahap hubungan satu sama lain, pertukaran gagasan dan merencanakan bersama-sama, dan memiliki kebersamaan satu sama lain. Hubungan timbal balik bermaksud bahwa advokat tidak mendominasi atau menyusun agenda klien sebab kebutuhan klien diberi perhatian yang khusus.

Advokat bekerja sama dengan klien, dan mereka memprosesnya sesuai dengan kesepakatan yang disetujui bersama-sama. Termasuk dalam term hubungan timbal balik ini adalah pemberdayaan sebagai nilai pekerjaan sosial utama. Representasi. Term ini adalah berkaitan orientasi tindakan dan menjelaskan aktivitas advokat dengan berbicara, menulis, atau bertindak bagi pihak lain, berkomunikasi atau pernyataan kepedulian terhadap klien.

Klien. Dalam advokasi pekerjaan sosial, klien mendelegasikan kepada pekerja sosial untuk bertindak atas dirinya yaitu representation sebagaimana disebutkan di atas. Klien mungkin individu perseorangan, kelompok kecil atau besar, persatuan masyarakat, populasi etnik tertentu, individu-individu dengan kesamaan karakteristik dan kepedulian.

E. Unsur-Unsur Advokasi dalam Kelompok Marginal

Memilih tujuan advokasi. Masalah yang diadvokasi yaitu kelompok yang terpinggirkan (marginal). Oleh sebab itu, agar advokasi berhasil maka tujuan advokasi harus mampu meningkatkan keberfungsian dan membela hak kelompok ini.

Apakah tujuannya mungkin tercapai? Apakah tujuannya benar-benar menangan masalah itu?

- Menggunakan data dan penelitian untuk advokasi. Data dan penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat ketika memilih masalah yang akan diadvokasi, mengidentifikasi cara permasalahan bagi masalah tersebut, dan menentukan tujuan yang realistis. Data yang valid, lengkap dan akurat juga dapat menjadi argumentasi yang kuat. Dengan data dapatkah kita mencapai tujuan dengan realistis? Data apa yang dapat digunakan untuk mendukung suatu argumentasi?
- Mengidentifikasi Sasaran Advokasi. Jika masalah dan tujuan telah ditetapkan, maka kegiatan advokasi harus diarahkan kepada orang-

orang yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan, pimpinan, orang tua, media, dan masyarakat. Siapa para pengambil keputusan yang dapat membuat tujuan umum kita menjadi kenyataan? Siapa dan apa yang memengaruhi para pengambil keputusan ini?

- Mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi. Sasaran advokasi berbeda-beda memberikan respons terhadap pesan yang berbeda pula.
- Membentuk koalisi. Kekuatan advokasi kerap kali ditentukan oleh kuatnya koalisi beberapa orang, organisasi, atau lembaga yang mendukung tujuan advokasi. Bahkan melibatkan banyak orang yang mewakili kepentingan berbeda-beda dapat memberi keuntungan dari sisi keamanan bagi advokasi.



BAB XIII

PEKERJAAN SOSIAL DENGAN MULTIKULTUR

Sudah 50 tahun ilmu pekerjaan sosial berkembang di Indonesia, namun kiblat teori, pendekatan dan terapi masih berkiblat ke Barat yang dianggap lebih ilmiah dan modern. Padahal negara Indonesia adalah negara majemuk (multikultural) yang terdiri dari berbagai daerah, suku, budaya, adat istiadat, agama dan kebiasaan, yang selama ratusan tahun telah hidup dan mengatasi masalahnya dengan kekuatannya sendiri. Untuk itu ke depan perlu kita gali teori, pendekatan dan terapi dalam pekerjaan sosial yang Indonesia bahkan khas sesuai dengan lokalitas dan

ciri masyarakat multikultur yang berbeda-beda itu menjadi kekuatan besar bagi pengembangan pekerjaan Indonesia khas Indonesia atau indigenisasi pekerjaan sosial di Indonesia ke depan.

A. Belajar dengan Peksos Lokal

Mungkin sesuatu yang aneh di saat kita menggalakkan sertifikasi pekerjaan sosial yang lulus dari perguruan tinggi ilmu kesejahteraan sosial maupun ilmu pekerjaan sosial, justru sekarang dianjurkan belajar dengan pekerja sosial lokal yang tidak mempunyai berpendidikan ilmu kesejahteraan sosial maupun ilmu pekerjaan sosial dan tidak punya sertifikat sebagai pekerja sosial. Menurut Osei Hwidi (1993) menyatakan bahwa kita perlu menggali dan belajar dari pengalaman dan praktik dari praktisi pekerjaan sosial lokal yang memiliki pengetahuan berdasarkan teori dan pengetahuan lokal yang masih murni. Sama halnya dengan Kwong (1996) menyatakan bahwa kita harus mengakui adanya praktik pekerja sosial lokal yang berlandaskan pada pengetahuan lokal dan struktur sosial masyarakatnya yang membawa para pekerja sosial lokal melakukan praktik berdasarkan konteks lokal dengan pendekatan dan teori budaya masyarakat setempat.

Croger (1999) menemukan praktik pekerja sosial lokal ini sudah diterapkan di beberapa negara seperti India, pekerja sosial dalam mengatasi kenakalan remaja dan kecanduan alkohol, mereka menggunakan teori, pendekatan dan terapi berdasarkan budaya setempat dalam konsep *dharma* dan *karma*. Bahkan Lynn (1998) juga menemukan praktik pekerjaan sosial bagi masyarakat Aborigin di Australia dan masyarakat Miori di Selandia Baru yang menerapkan pekerjaan sosial dengan pendekatan budaya setempat.

Selama ini pekerja sosial dari negara Timur ataupun non-Barat selalu berkiblat dan mengadaptasi teori, pendekatan dan terapi dari negara Barat sehingga mereka seringkali mengalami keterasingan dengan dirinya sendiri dan masyarakatnya atau alienasi diri. Saatnya sekarang pekerja sosial di negara Timur atau non-Barat termasuk di Indonesia mulai belajar tentang pengetahuan indigenous dan pendekatan budaya dari masing-masing masyarakat lokal.

B. Pendekatan Pekerjaan Sosial Lokal

Akhir akhir ini sedang dikembangkan pendekatan dan model pekerjaan sosial lokal berlandaskan hal berikut.

Sistem pelayanan lokal dan praktik indigenous yang sudah diterima masyarakat yang berarti adalah ini untuk bisa diterima di kalangan akademik maka perlu ditunjukkan pengalaman praktik lokal ini menjadi teori lokal dengan penelitian yang terus-menerus agar dapat diterima secara ilmiah.

2. Menumbuhkan Teori Lokal

Kini saatnya pekerja sosial lokal mulai menerima sistem pelayanan lokal yang berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan etika yang berarti indigenous.

1. Menerima Sistem Pelayanan Lokal

Setelah muncul kepercayaan terhadap teori, pendekatan dan terapi pekerjaan sosial lokal sekarang saatnya memprioritaskan dalam hal berikut.

C. Memprioritaskan Pekerjaan Sosial Lokal

Pekerja sosial lokal sudah mulai mengembangkan teori, pendekatan dan terapi berdasarkan pengalaman yang diujikan dan dipraktikkan pekerja sosial yang ternyata dapat diterima masyarakat lokal dan mampu membantu memecahkan masalah mereka selama bertahun-tahun dalam kehidupan masyarakat setempat.

3. Teori, Pendekatan, dan Terapi Lokal

Pekerja sosial lokal di beberapa negara Timur belajar dari sistem pelayanan lokal yang berarti indigenous dengan kepercayaan lokal, terapi healing lokal, dan dukungan jaringan pertolongan tradisional yang berarti kehidupan masyarakat setempat.

2. Memadukan Praktik dengan Pelayanan Lokal

Pekerja sosial lokal mempunyai kepercayaan terhadap budaya lokal, seperti pekerja sosial di India, Australia, Kanada, Selandia Baru belajar kepada masyarakat Urdu, Aborigin, Maori dan Cubeg.

1. Pekerja Sosial dengan Budaya Lokal

D. Budaya Lokal sebagai Ilmu

Menurut Kresing (1981) kebudayaan adalah sistem yang terorganisasi dan pengetahuan dan kepercayaan dari struktur pendudukan berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka sendiri. Namun saat ini budaya lokal sering terkalahkan dengan budaya modern karena kekuatan kelompok dominan yang berlandaskan kapitalisme yang menguasai ekonomi, politik bahkan kekuatan yang telah menghegemoni kekuatan minoritas yang menyebabkan budaya lokal menjadi subordinate.

Beberapa negara sudah mulai menyeminarkan pentingnya pengembangan dan mengangkat budaya lokal menjadi ilmu yang sejajar dan setingkat dengan ilmu yang datang dari barat. Seperti di Malaysia pada 1997 telah diadakan seminar melawan kekuatan besar dalam globalisasi dan pengetahuan Barat. Ternyata ditemukan bahwa budaya lokal mempunyai kekuatan yang dapat mengubah kekuatan teori pekerjaan sosial Barat yang selama ini sudah menjadi agama bagi pekerja sosial di negara Timur termasuk di Indonesia.

Menurut Hartman (1990) ternyata untuk mendapatkan ilmu dan teori dapat dilakukan dengan berbagai macam cara termasuk menggali dari budaya lokal, yang terpenting mengikuti kaldah ilmiah yang tidak meninggalkan acuan umum secara ontologi, epistemologi dan asumsi nilai yang benar. Karena selama ini dominasi Barat dalam praktik pekerjaan sosial melalui teori, pendekatan dan terapi yang berlandaskan paradigma ilmiah atau saintifik. Padahal teori, pendekatan dan terapi dari Timur berlandaskan paradigma alamiah atau *nature*. Paradigma bersifat nonrasional, subjektif, dan berpandangan pada kekuatan alam. Sedangkan dari Barat memandang paradigma yang percaya pada rasionalitas, objektivitas, pandangan dari luar dirinya, dominasi paradigma ini ternyata selama ini membelenggu kebebasan dan kreatif pekerja sosial dari negara dunia Timur termasuk di Indonesia.

E. Peksos dengan Teori Barat vs Teori Indigenous Peksos dengan Teori Barat

Pekerja sosial selama ini pasti mengenal beberapa teori Barat atau teori modern (*modern social work theory*) yang diterapkan dalam praktik pekerja sosial di Indonesia dari dulu sampai sekarang, antara lain:

1. Teori Psikodinamika

Teori ini dikembangkan dengan mengadopsi pendekatan Freudian (1937) dengan sebutan *psychic determinism* atau *psychoanalytic approach* yang melihat kembali pengalaman hidup sejak masa pertama anak-anak (*early childhood*). Teori dikembangkan dalam relasi pengasuhan anak dengan orangtuanya dan lingkungan sosial sekitarnya yang menumbuhkan kepribadian anak berdasarkan kekuatan sendiri dalam bentuk *id*, *ego* dan *Superego*. Teori ini berlandaskan pada tahapan perkembangan anak yang dimulai pada awal masa *oral*, *anal*, *phallic*, *latency period*, *genital beginning*, dan diakhiri dengan masa *maturity*. Kemudian teori ini dikembangkan lagi oleh Erikson (1977) dengan teori perkembangan manusia yang menyempumakan teori sebelumnya dengan memerinci tugas-tugas kehidupan manusia berdasarkan klasifikasi perkembangan dari bayi, anak, remaja, dewasa muda, dewasa, dan lanjut usia. Teori ini berkembang terus melalui praktik pekerjaan sosial, di mana pada awalnya banyak pekerjaan sosial sangat mendukung teori ini, namun sampai sekarang masih banyak juga pekerja sosial yang sangat fanatik dengan teori ini.

2. Teori Behavioural

Teori ini berlandaskan teori belajar sosial yang dimotori oleh Ivan Pavlov (1960) seorang Psikolog dari Rusia yang menguji coba seekor anjing lapar dan makan dengan bunyi dering bunyi bel yang kemudian disimpulkan ke dalam konsep *Stimulus (S)* dan *Respons (R)*. Konsep S-R sebagai bagian dari proses belajar yang merupakan refleksi dari peluang dan kondisi yang diciptakan secara teratur.

Kemudian Hudson dan Macdonald (1986) mengembangkan lebih lanjut konsep Pavlov dengan konsep *Respons (R) – Stimulus (S) – Respons2 (R2)* dia mengatakan manusia bukan hewan dan manusia punya kepandaian dan naluri yang melebihi hewan. Setiap tindakan manusia ada *operant conditioning* (kondisi penentu) dalam bentuk perilaku satu merupakan antiseden bagi perilaku berikutnya seperti sebagai awal perilaku A akan membawa dampak pada stand perilaku B itu sendiri dan akan membawa dampak pada stand perilaku C begitu dan seterusnya.

Seterusnya Stuart (1974) terdapat 3 bentuk antiseden dalam perilaku manusia yaitu:

a. *Material and competence antecedent*

Perilaku manusia ditentukan oleh alat yang digunakannya manusia untuk melakukan tindakan. Seperti siswa akan menulis kalau dia diberi buku dan pensil.

b. *Instructional antecedent*

Perilaku manusia ditentukan oleh aturan atau nilai yang dibuat manusia lainnya terutama yang lebih senior. Seperti anak akan belajar karena mendapat perintah orang tuanya.

c. *Potentiation antecedent*

Manusia berperilaku karena ingin mendapatkan hadiah atau untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai harapannya. Seperti anak akan menunjukkan rasa sayang kepada orangtuanya karena dia ingin dibelikan sepeda untuk bermain dengan teman-temannya.

Teori behavioral ini terus berkembang dalam praktik pekerjaan sosial dengan praktik pekerjaan sosial untuk intervensi perubahan perilaku. Banyak pekerja sosial yang menggunakan teori ini terutama untuk penanganan masalah-masalah disorganisasi sosial pada klien individu maupun kelompok.

3. Teori Kognitif

Teori ini dikembangkan oleh Cigno (1971) yang menyatakan bahwa perilaku manusia terbentuk sebagai respons tidak hanya ditentukan oleh stimulus saja, tetapi juga dikonstruksi secara rumit oleh berbagai macam variabel dari unsur problematik kehidupan yang membuat manusia terjepit dalam tekanan (depresi).

Kemudian Ellis (1972) juga menyatakan bahwa perilaku manusia didorong juga oleh rasa takut (*anxiety*) dan rasa cemas (*depression*) yang menjadi penyebab *operant conditioning* (kondisi penentu). Contoh seseorang kehilangan pekerjaan karena PHK sebagai perilaku A kemudian akan berdampak dia tidak dapat menghidupi dirinya dan keluarganya dan lama-lama dia kehilangan kepercayaannya sebagai perilaku B, dan kalau keadaan ini berlarut-larut maka dia akan menjadi depresi dan sakit sebagai perilaku C. Ellis percaya bahwa semua perilaku ABC itu sebagai bentuk manifestasi proses kognitif (*cognitive process*).

Selanjutnya Burn (1979) mengembangkan teori kognitif ini lebih lanjut dan dia membagi dampak dari proses kognitif ini terhadap perilaku manusia akan kemunduran manusia itu sendiri. Antara lain dampak yang terjadi yaitu:

Para ahli di negara Timur menemukan teori *Indigenous* yang telah diterapkan pekerja sosial lokal di beberapa negara antara lain India, Malaysia, Australia, dan Selandia Baru, serta Kanada. Beberapa teori itu yaitu:

F. Peksos dengan Teori *Indigenous*

Pekerja sosial saat ini mengenal pendekatan sistem sosial yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori dan pendekatan *task centre* ini dan saat ini menjadi mode dalam intervensi pekerjaan sosial terutama di luar negara Barat.

Pekerja sosial saat ini mengenal pendekatan sistem sosial yang berlandaskan pada perilaku personal seseorang.

manusia ada hubungannya dengan perubahan sosial dari sistem sosial sosialnya (*person-environmental interactions*), sehingga ketidakbertujuan ini terkait dengan masalah interaksi antara individu dan lingkungan.

Selanjutnya Logan (1990) menyatakan bahwa teori dan pendekatan untuk memberikan solusi bagi ketidakefektifan aktivitasnya.

dalam mengatasi ketidakefektifan sosialnya untuk itu diperlukan bantuan dengan masalah psikososial yang terkait dengan kemampuan dan kawasannya.

Menurut Reid (1978) pentaya teori dan pendekatan ini berhubungan

4. Teori *Task Centre*

Teori belajar lainnya dikembangkan oleh Skinner (1959) melalui usahanya untuk mengembangkan model *conditioning operant* dan memperluas prinsip belajar pada konteks pengajaran dan kehidupan.

Pekerja sosial saat ini menggunakan teori kognitif ini untuk menangani klien remaja naka, anak yang mengalami kesulitan, *sumi-siri* dalam masalah perkawinan dan kasus lainnya.

- Emosi tinggi
- Tidak mau berpikir
- Labeling diri
- Berpikir negatif
- Mencolak orang lain

1. *Multiculture Perspective*

Menurut Lum dan Ling How Kee (1995) multikultur perspektif adalah cara pandang dan nilai budaya yang digunakan pekerja sosial lokal untuk membantu mengatasi permasalahan individu, kelompok dan masyarakat berdasarkan strategi dari berbagai elemen pengetahuan, keterampilan dan etika lokal.

Elemen multikultural meliputi:

a. Kedekatan dengan Keluarga Besar

Keluarga besar dalam masyarakat lokal merupakan kekuatan besar untuk memberikan dukungan keluarga (*family support*) dalam menyelesaikan masalah dan solusi penyelesaian yang dihadapi anggota keluarga kecilnya.

b. Konsep "Malu"

Perasaan malu dari individu masyarakat lokal untuk terbuka dan mengutarakan keluhan dan masalahnya di hadapan pekerja sosial. Sehingga mereka mencari pihak lain yang dianggap dan dipercaya untuk menjadi sahabat atau teman untuk curhat tentang pribadinya. Biasanya, para pihak yang dipercaya mampu menjaga rahasia dan memberikan solusi yang sederhana dan mudah dilaksanakan untuk perubahan hidupnya. Para pihak itu dapat disebut tokoh masyarakat atau orang dianggap sakti seperti pak ustaz, guru, kiai, romo dan lainnya dengan nama lain yang ada dalam setiap masyarakat, terlebih dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini.

c. Pentingnya Self Control

Individu dalam masyarakat Indigenous yang mempunyai nilai tradisional menyosialisasikan cara mengatasi masalah dengan *self control* yang tinggi. Seperti menerima takdir yaitu *nrimo* dan sabar. Ekspresi emosional dan fungsional psikologi dalam konsep *nrimo* dan sabar ini sudah menjadi *fashion* dalam masyarakat lokal, yang selama ini dijadikan dasar untuk mengatasi masalah kepribadian yang tidak terbuka.

d. Kepercayaan pada "Dharma dan Karma"

Kepercayaan masyarakat lokal pada kekuatan alam dalam bentuk dharma dan karma. Kepercayaan dharma dan karma ini menjadi pegangan bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan lain atau kehidupan

kedua. Apabila dalam kehidupan di dunia berbuat baik (dharma) maka di kehidupan kedua akan juga menjadi orang baik, tapi kalau dalam kehidupan pertama berbuat jahat (karma) maka di kehidupan kedua akan menjadi orang jahat. Kepercayaan ini percaya bahwa kekuatan alam yang berprinsip seperti roda berputar, jadi dalam menyelesaikan masalah orang harus menjauhkan kejahatan (karma) dan mencari jalan hidup yang baik (dharma) agar hidup di dunia dan di dunia kedua mendapatkan bahagia dunia dan akhirat.

e. Kepercayaan pada Kekuatan Supranatural

Masyarakat tradisional ketika mengalami masalah bahkan penyakit kejiwaan (*mental illnesses*) meskipun telah diintervensi secara ilmiah oleh para ahli seperti dokter jiwa (psikiater) bahkan pekerja sosial profesional dengan teori pendekatan dan terapi modern, sesudahnya mereka tetap percaya kepada dukun atau orang pintar yang dianggap mempunyai kekuatan supranatural.

Individu yang sakit atau bermasalah dianggap diganggu atau kerasukan kekuatan asing bahkan sering disebut kekuatan hitam atau kekuatan setan sehingga sering disebut kerasukan atau kesurupan. Itu tidak bisa diatasi dengan pengobatan modern tetapi hanya dapat diatasi dengan pengobatan tradisional melalui kekuatan supranatural-atau-ilmu-putih atau ilmu agama.

2. Minoritas Perspektif

Menurut Haluk Saldan (1998) minoritas diartikan sebagai kelompok kecil di tengah kelompok lainnya yang lebih besar atau dominan di dalam masyarakat. Kelompok minoritas selalu mengalami tekanan atau opresi dari pihak mayoritas yang menguasai kehidupan masyarakat. Tekanan dan opresi ini disebabkan oleh prasangka sosial yang berasal dari orientasi psikologi dan ketakutan tersaingi kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, sehingga berdampak dalam kehidupan sosial di mana kelompok minoritas sering mengalami perlakuan diskriminasi atau dibedakan bahkan dikucilkan.

Kelompok minoritas adalah kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dengan mayoritas penduduk. Kelompok minoritas ialah kelompok sosial yang tak menyusun mayoritas populasi total dari voting dominan secara politis dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Minoritas sebagai

'kelompok' yang dilihat dari jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari negara bersangkutan dalam posisi yang tidak dominan. Keanggotaannya memiliki karakteristik etnis, agama, maupun bahasa yang berbeda dengan populasi lainnya dan menunjukkan setidaknya secara implisit sikap solidaritas yang ditujukan pada melestarikan budaya, tradisi, agama, dan bahasa. Sehubungan dengan hal tersebut beberapa wilayah di Indonesia akhir-akhir ini sering muncul kerusuhan sosial yang dilatarbelakangi etnis dan agama.

Terdapat 5 aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pekerjaan sosial, yaitu:

a. **Motivasi**

Kelompok minoritas dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Kelompok minoritas perlu didorong untuk ikut berpartisipasi dalam hal melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya. Seperti keluarga miskin yang kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

b. **Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan**

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, pemasyarakatan imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu kelompok minoritas untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

c. **Manajemen diri**

Kelompok minoritas harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok minoritas kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

d. Mobilisasi sumber

Merupakan sebuah metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang, jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

e. Pembangunan dan pengembangan jaringan

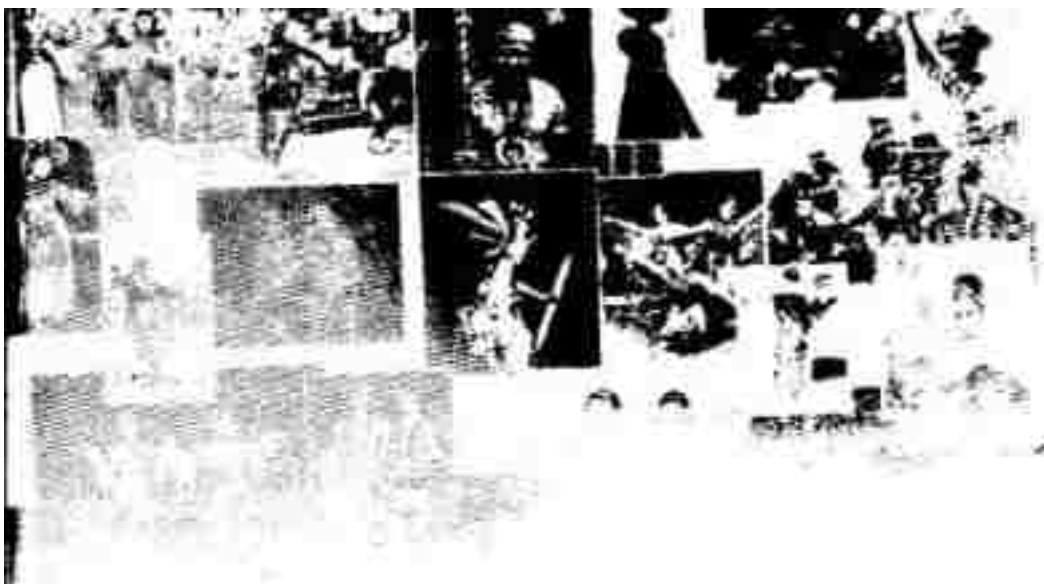
Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan kelompok minoritas.

- Abdiah S. Ubéd. 2002. *Politik Identitas Etnis*. Magelang: Indoneastara.
- Gerungan, W.A. 2004. *Psikologi Sosial*. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Ling, How Koc. 2007. *Indigenising Social Work Research and Practice*. Sakarjor: Sird.
- Nashun. 1984. *Sistem Sosial Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Peta.
- Salim, Agus. 2006. *Stratifikasi Etnik*. Semarang: FIP UNNES dan Tara Wacana.
- Setiadi, dkk. 2009. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kembara.

DAFTAR PUSTAKA



Setiadi, Ely M dan Kofip Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persaja.
Soydan, Haluk. 1998. *Social Work and Minorities*. New York: Roultege.
Suharto. 1986. *Stratifikasi Sosial*. Yogyakarta: Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga.



TENTANG PENULIS



Dr. Bambang Rustanto, M.Hum adalah kelahiran di Solo yang lulus Program Doktor (S-3) Studi Sosiologi Universitas Indonesia tahun 2008. Dari tahun 1997 sampai sekarang menjadi Dosen Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung untuk mata kuliah Sosiologi untuk Pekerjaan Sosial, Penelitian Pekerjaan Sosial Kuantitatif, Penelitian Pekerjaan Sosial Kualitatif, Sistem Perlindungan Sosial, Pekerjaan Sosial dengan Masyarakat Multikultur, dan Pekerjaan Sosial dengan Kemiskinan, Teknologi Pekerjaan Sosial Komunitas dan *Human Right and Social Work*.

Selain mengajar di STKS Bandung pernah menjadi dosen tamu di Studi Gender UI Jakarta, STSIP Widuri Jakarta, STIA Lan Bandung, dan Kesos-Unpad, dan pernah menjadi konsultan serta peneliti di NGO antara lain di Plan, Smeru, UNDP, PATH, DFID, Ford, Yapika, dan YPM Kesuma, serta perusahaan konsultan bidang amdal dan Laraf, pengembangan masyarakat, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, naskah akademik perda dan kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan.

Buku yang pernah diterbitkan antara lain Pekerjaan Sosial dengan Masyarakat Multikultur di Indonesia, Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia, Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Kemiskinan di Indonesia, Penelitian Pekerjaan Sosial dengan Pendekatan Kuantitatif dan Pekerjaan Sosial dengan Pendekatan Kualitatif, serta Metode *Assessment Partisipatori* dalam Pekerjaan Sosial.



Masyarakat MULTIKULTUR di INDONESIA

 ptremajarosdakarya

 @rosdakarya - @e_rosda



Buku ini lebih menyajikan panduan dan acuan bagi mahasiswa dalam melatih dan bekerja sama dengan masyarakat dalam praktik pekerjaan sosial komunitas. Bahwasanya masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen, baik itu suku, ras, agama, pendidikan, ekonomi, politik, bahasa, dan lain-lain yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki satu pemerintahan.

Tentunya buku ini dapat membantu pendalaman konsep dan pemahaman mahasiswa dalam hal keterampilan pekerjaan sosial komunitas dengan masyarakat.



ISBN 978-979-692-625-1



9 789796 926251